

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SEKITAR PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA

1954 - 1965

SKRIPSI



Oleh :

SULATI

NIM : 92214018

NIRM : 920052010604120017



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1997

**SEKITAR PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA
1954 - 1965**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Di Universitas Sanata Dharma**

Oleh :

SULATI

NIM : 92214018

NIRM : 920052010604120017

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

YOGYAKARTA

1997

**SEKITAR PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA
1954 - 1965**

SKRIPSI

Oleh :

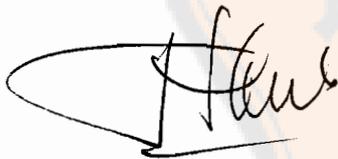
SULATI

NIM : 92214018

NIRM : 920052010604120017

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. A.K. Wiharyanto

Tanggal

5 September '97

Pembimbing II



Drs. Y.B. Dwija Atmaka, S.J., M.A.

Tanggal

6 September 1997

**SEKITAR PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA
1954 - 1965**

SKRIPSI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

SULATI

NIM : 92214018

NIRM : 920052010604120017

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 13 September 1997
dan dinyatakan memenuhi syarat.

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Drs. A.K. Wiharyanto

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M. Pd.

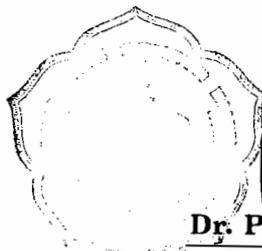
Anggota : 1. Drs. A.K. Wiharyanto

2. Drs. Y.B. Dwija Atmaka, S.J., M.A.

3. Drs. J.B.M. Mudjihardjo

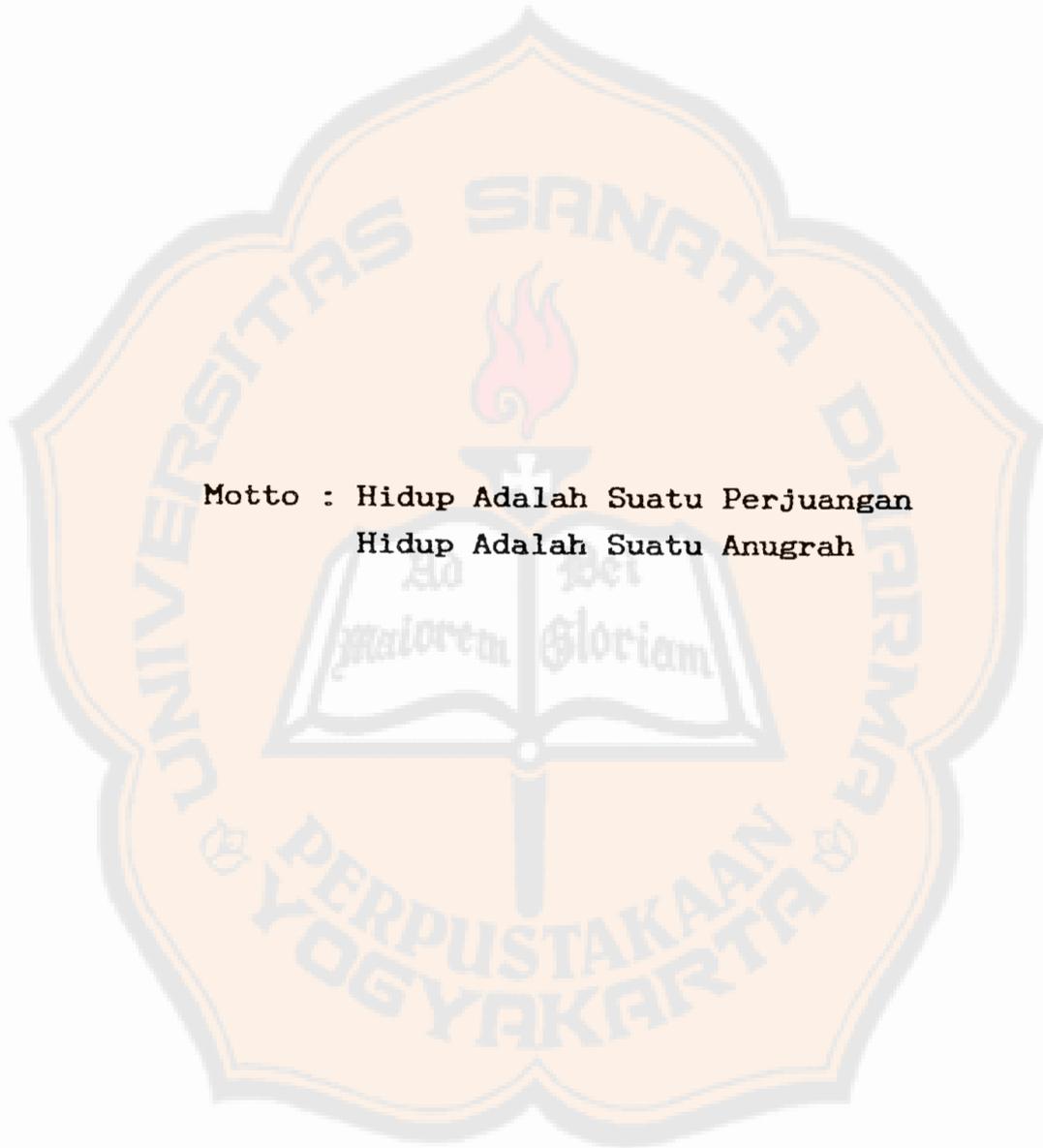
Yogyakarta, 9 Oktober 1997
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Dekan,



Dr. Paulus Suparno, S.J., M.S.T.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Motto : Hidup Adalah Suatu Perjuangan
Hidup Adalah Suatu Anugrah

Persembahan

1. Mama Suzanna, Papa Johannes Mاما, dan adik-adikku tercinta.
2. Ibunda S. Lestari, (alm) Bapak Moeljanto, dan keenam kakakku yang terkasih.
3. Mas Seno Kristianto yang tercinta, terima kasih atas bimbingan, pengertian, dan kasihnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin selesai jika tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah.
3. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
4. Rm. Drs. Y.B. Dwija Atmaka, S.J., M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, koreksi, dan masukan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A., Bapak Drs. Y.R. Subakti, M.Pd., dan Bapak Drs. Silverio R.L. Aji Sampurno, yang telah bersedia meminjamkan buku-bukunya yang diperlukan oleh penulis.
6. Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan peminjaman buku-buku yang diperlukan penulis bagi penyusunan skripsi ini.
7. Staf Perpustakaan Museum Sonobudoyo Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan untuk meneliti surat kabar-surat kabar lama seputar skripsi ini.
8. Yayasan Tunas Karya yang telah membiayai studi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu di sini, yang telah memberikan dukungan

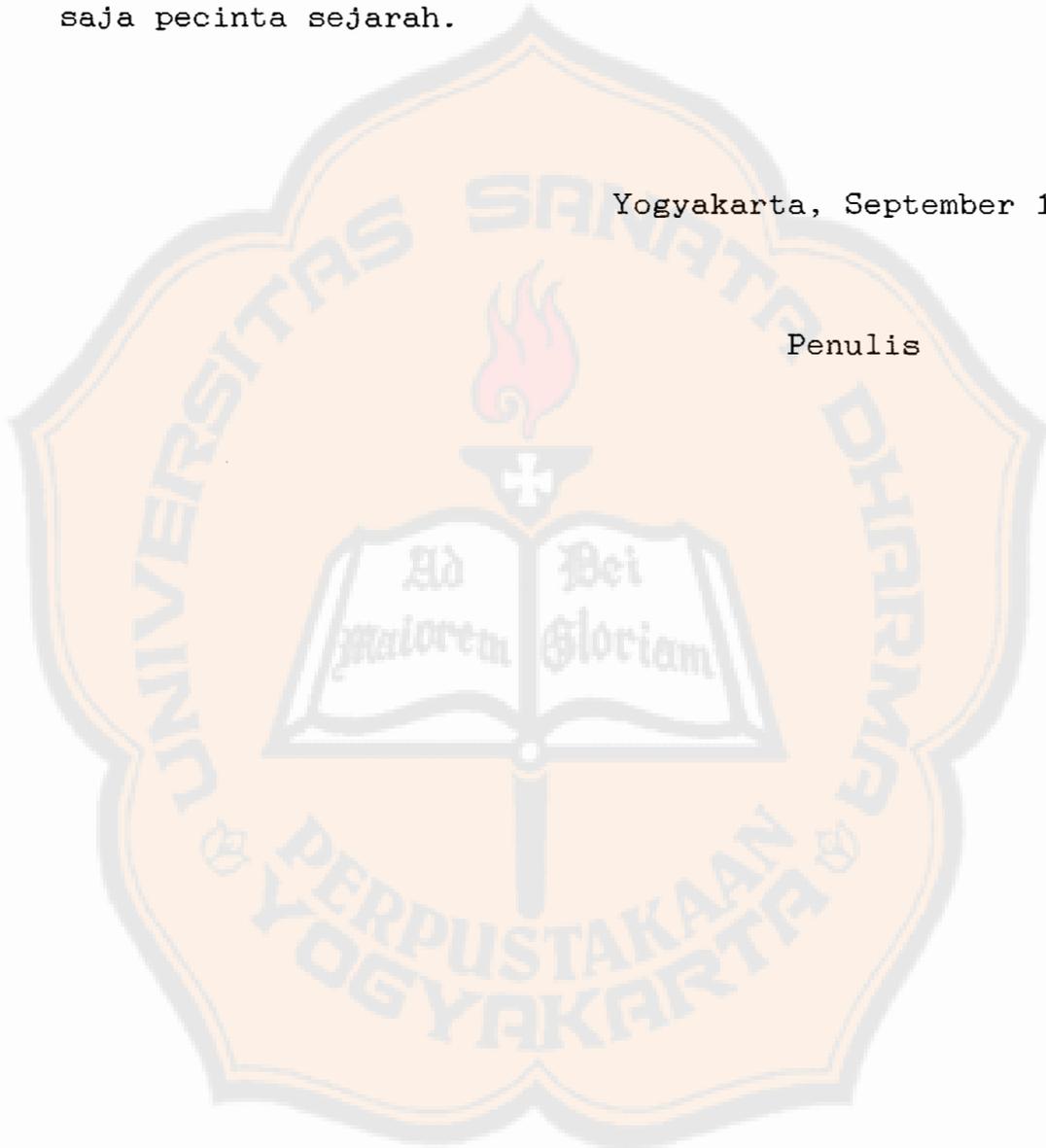
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan perhatian dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan baik pemikiran, kritik, maupun saran yang membangun guna penyempurnaannya. Semoga skripsi ini berguna bagi siapa saja pecinta sejarah.

Yogyakarta, September 1997

Penulis



DAFTAR ISI



Halaman sampul	i
Halaman judul	ii
Halaman persetujuan	iii
Halaman pengesahan	iv
Halaman motto	v
Halaman persembahan	vi
Kata pengantar	vii
Daftar isi	ix
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka ...	7
F. Metodologi Penelitian	15
BAB II LATAR BELAKANG KEMERDEKAAN MALAYA (PTM) 1906 - 1957	24
A. Timbul Dan Perkembangan Nasionalisme Malaya	24
B. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1954 - 1957	50
C. Motivasi Inggris	57
BAB III PERUBAHAN PTM MENJADI FEDERASI MALAYA 1957 - 1963	73
A. Peluang Perubahan	73
B. Proses Perubahan Dari PTM Menjadi Federasi Malaya	78
C. Kemerdekaan Federasi Malaysia	87

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB	IV	REAKSI INDONESIA TERHADAP PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA	93
	A.	Latar Belakang Umum	93
	B.	Reaksi Awal Indonesia 1960 - 1961	99
	C.	Reaksi Keras Indonesia 1963 - 1965 ..	113
	D.	Arti dan Dimensi Konfrontasi	126
	E.	Pandangan Dunia Sukarno	131
BAB	V	REAKSI NEGARA LAIN TERHADAP PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA	136
	A.	Latar Belakang Umum	136
	B.	Reaksi Filipina	139
	C.	Reaksi Brunei	145
	D.	Reaksi Singapura	151
BAB	VI	PENUTUP	158
DAFTAR PUSTAKA		165
LAMPIRAN			

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Sulati : Sekitar Pembentukan Federasi Malaysia 1954-1965.

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan : pertama, untuk mengetahui latar belakang kemerdekaan Malaya (Persekutuan Tanah Melayu) 1906-1957 ; kedua, proses perubahan dari PTM menjadi Federasi Malaysia 1957-1963 ; ketiga, reaksi dari Indonesia dan reaksi dari negara-negara lain terhadap pembentukan Federasi Malaysia khususnya Filipina, Singapura, dan Brunei. Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan dengan teknik deskriptif analitik.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini membuktikan bahwa proses kemerdekaan Malaysia terjadi dua kali : pada tahun 1957 dalam bentuk Persekutuan Tanah Melayu dan 1963 menjadi Federasi Malaysia. Wilayah kekuasaan Federasi Malaysia mencakup : Semenanjung Malaya, Serawak, Sabah, dan Singapura. Tetapi Singapura memutuskan keluar dari Federasi pada tahun 1965. Kemerdekaan pertama tahun 1957, tidak sesuai dengan kehendak rakyat Malaya. Mereka menerima rancangan Inggris hanya dijadikan sebagai batu loncatan untuk mewujudkan keinginan sesungguhnya yakni mewujudkan negara kesatuan Malaysia. Agar tujuan ini tercapai maka tidak ada cara lain kecuali bekerjasama dengan Inggris.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rencana pembentukan Federasi Malaysia tidaklah berjalan lancar. Banyak rintangan yang harus dilewati. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri tidak semua rakyat Malaya setuju dengan cara yang ditempuh oleh pemerintah Persekutuan Tanah Melayu dalam mewujudkan negara Malaysia. Sedangkan tentangan dari luar negeri datang dari Filipina, Indonesia, Brunei, dan Singapura. Tetapi itu tidak menggoyahkan keinginan Malaysia.

ABSTRACT

Sulati : On The Founding of The Federation of Malaysia
1954-1965.

This thesis aims at adressing three things : first, the background of Malaya's Independence (The Federation of Malaya) 1906-1957 ; second, the development of The Federation of Malaya to be The Federation of Malaysia 1957-1963 ; third, reaction of Indonesia and other countries to the founding of Federation of Malaysia, especially The Philipines, Singapore, and Brunei.

Methodically this thesis is the result of a library research narrated in descriptive technique.

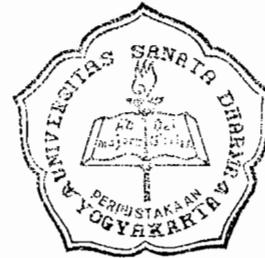
The result of this research shows that the process of Malaysian Independence occured in two occasions : the first was in 1957 in the form of The Federation of Malaya, and the second was in 1963 when it changed into The Federation of Malaysia. The Federation of Malaysia consist of The Malay Peninsula, Serawak, Sabah, and Singapore. Yet in 1965 Singapore decided to leave The Federation. The first independence in 1957 was not in accordance with the Malayan people's will. They accepted Britain plan only as a stepping stone to reach their real goal, that was to create Malaysian unitary state.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

In order to reach this goal there was no other way but to cooperate with Britain.

The plan of founding The Federation of Malaysia did not run smoothly. There were so many obstacles and problems to solve, both internal or external. The internal obstacle was that not all Malayan people agreed with the ways used by the government to create a unified Malaysian state. While the external obstacle came from The Philippines, Indonesia, Brunei, and Singapore; but all those obstacles could not change the will of The Malaysian people.

BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Malaysia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada tahun 1963. Sebelumnya Malaysia sudah memperoleh kemerdekaan dari Inggris dalam bentuk Persekutuan Tanah Melayu (PTM) pada tahun 1957. Kemerdekaan ini bukanlah puncak dari perjuangan rakyat Malaya, karena keinginan mereka untuk mendirikan negara Malaysia belumlah tercapai.

Sebelum membahas tentang negara Malaysia ada baiknya terlebih dulu mengetahui keadaan penduduk pada waktu itu. Keadaan penduduk yang dimaksud adalah komposisi ras yang ada di tanah Melayu. Hal ini disinggung oleh penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang keinginan mereka untuk membentuk negara Malaysia. Dari komposisi ras tersebut akan diketahui negara yang bagaimana yang mereka inginkan.

Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai latar belakang warna kulit dan suku bangsa. Penduduk asli Malaysia memiliki kesamaan ras dengan orang Indonesia dan Filipina dan ini merupakan golongan penduduk yang terbesar. Selain penduduk asli, di sana juga terdapat orang-orang Cina, India, Pakistan, Sri Langka, dan lain-lain. Beberapa penduduk ada yang berdiam di Serawak dan Sabah.

Perbedaan latar belakang penduduk Malaysia sangat rawan perpecahan. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia dalam mengambil kebijakan pembangunan selalu disertai pertimbangan yang matang agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Hal ini ditempuh agar tidak ada golongan masyarakat yang tersisih dalam proses pembangunan. Meskipun demikian, kebijakan ekonomi lebih diutamakan kepada perbaikan hidup golongan bumiputera.

Malaysia terdiri dari satu kerajaan persekutuan, sembilan kesultanan, dan empat propinsi. Kerajaan kesultanan yaitu Kuala Lumpur yang sekaligus menjadi ibukota Federasi Malaysia. Sembilan kesultanan yaitu : Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Selangor, Perak, dan Trengganu. Sedangkan empat propinsi adalah Malaka, Pulau Penang, Sabah, dan Serawak. Secara geografis seluruh daerah itu terbagi menjadi daratan dan kepulauan. Sabah dan Serawak masuk Malaysia Kepulauan¹.

Malaysia adalah kerajaan berkonstitusi yang diperintah oleh seorang Yang Dipertuan Agong, artinya raja atau kepala negara tertinggi. Raja dipilih untuk masa lima tahun. Dia dipilih oleh dan dari antara para penguasa sembilan negeri Melayu. Sebagai kepala negara, raja mengangkat perdana menteri dan kabinet. Semua

¹Richard Butwell, **Negara dan Bangsa** (terj), (Jakarta: Glorier International INC, 1988), hlm. 208 cf Sekretariat Nasional ASEAN Deplu RI, **ASEAN Selayang Pandang**, (Jakarta : Sekretariat Nasional ASEAN Deplu RI, 1986), hlm. 157.

menteri harus dari anggota parlemen yang terdiri dari senat dan dewan perwakilan/rakyat. Empat puluh anggota senat diangkat oleh raja. Dua puluh enam lainnya dipilih oleh majelis legislatif ke-13 negara bagian Malaysia, dan dua anggota diangkat oleh Yang Dipertuan Agong dari wilayah persekutuan (Kuala Lumpur). Semua anggota dewan perwakilan dipilih oleh suara rakyat².

Selama berabad-abad penduduk asli berdiam terpencah sepanjang pantai di desa-desa kecil. Dari abad VIII hingga akhir abad XIII M, kerajaan Budha Indonesia kuno Sriwijaya menguasai sebagian besar Semenanjung Malaka. Kemudian selama masa yang lebih pendek kerajaan Hindu Majapahit di Jawa memerintah wilayah itu.

Pada tahun 1511 Portugis merampas Malaka, mulailah kekuasaan penjajah Eropa di wilayah ini selama lebih dari empat abad. Kemudian Malaka direbut oleh Belanda pada tahun 1641. Pada tahun 1786 Inggris menduduki lepas pantai Pulau Penang. Pengaruh Inggris di wilayah ini cepat meluas. Pada abad XIX semua negeri di Malaya jatuh di bawah pengawasan Inggris.

Di bawah pemerintahan Inggris perkebunan karet didirikan, pertambangan diperluas, dan jalan kereta api dibangun. Pada tahun 1941 - 1942, dalam Perang Dunia II, Jepang menyerbu Asia Tenggara termasuk jajahan Inggris di Malaya. Namun, pada tahun 1945 Inggris

²Richard Butwell : 213 cf Sekretariat Nasional ASEAN : 160.

memperoleh kembali jajahannya ini. Tiga tahun kemudian mereka menyusun kembali kesembilan negeri Melayu menjadi Persekutuan Tanah Melayu (PTM), yang mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957. Pada waktu itu, dua daerah protektorat Inggris yakni Malaka dan Pulau Penang juga menjadi bagian dari Federasi itu. Dari tahun 1948 -1960, Federasi tersebut diguncang oleh pemberontakan komunis yang tidak menghendaki adanya raja dan kerja sama antara penduduk bumiputera dengan pemerintah Inggris dalam memerdekakan Malaya. Pemberontakan ini akhirnya dapat ditumpas dengan bantuan militer Inggris³.

Pada tahun 1961, Perdana Menteri PTM, Tengku Abdul Rahman Putera, (kemudian PM pertama Malaysia) menyarankan menyusun negara Malaysia dengan memasukkan Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei dalam PTM. Rencana ini sesuai dengan cita-cita rakyat Malaya untuk mempersatukan seluruh daerah jajahan Inggris di kawasan itu di bawah satu pemerintahan. Setelah melalui perundingan selama dua tahun, Federasi Malaysia didirikan pada tanggal 16 September 1963. Brunei daerah protektorat Inggris di Kalimantan Utara memutuskan untuk tidak

³S. Husin Ali, **Rakyat Melayu Nasip dan Masa Depan**(terj), (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1985), hlm. 26-27 cf A.K. Wihar-yanto, **Peranan UMNO Dalam Perjuangan Malaya**, (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 1991), hlm. 16 cf Tan Ding Eing, **Sejarah Malaysia dan Singapura**, (Kuala Lumpur : Fajar Bakti, 1975), hlm. 272-273 cf Amat Johari Moain, **Sejarah Nasionalisme Maphilindo**, (Kuala Lumpur : Utusan Melayu Berhad, 1969), hlm. 204.

bergabung, sedangkan Singapura keluar dari Federasi tahun 1965.

Pembentukan Federasi Malaysia ini mendapat reaksi dari negara-negara di sekitarnya, khususnya Indonesia dan Filipina. Reaksi Indonesia terhadap Federasi ini karena menurutnya pembentukan Malaysia adalah ide Inggris untuk mempertahankan daerah jajahannya dalam bentuk baru. Reaksi serupa datang dari Filipina, berkenaan dengan Sabah, karena masalah Sabah belum terselesaikan dan statusnya secara hukum masih menjadi milik Filipina.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka ada beberapa pertimbangan penulis untuk menyusun berdirinya Malaysia menjadi sebuah skripsi. Pertimbangan penulis memilih topik tersebut karena kedekatan emosional dan intelektual. Kedekatan tersebut secara objektif dan subjektif sangat penting karena orang akan bekerja dengan baik kalau ia senang dan dapat⁴.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian di muka maka dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya diharapkan mampu memperjelas tulisan mengenai *Sekitar Pembentukan Federasi Malaysia 1954 - 1965*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁴Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Yayasan Bentang, 1995), hlm. 89.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Bagaimana latar belakang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1906 - 1957 ?
2. Bagaimana proses perubahan dari PTM menjadi Federasi Malaysia 1957 - 1963 ?
3. Bagaimana reaksi Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia ?
4. Bagaimana reaksi negara-negara lain terhadap pembentukan Federasi Malaysia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh perjuangan dari rakyat Malaysia dalam mencapai kemerdekaannya.

2. Tujuan khusus.

- a. Untuk mendeskripsi dan menganalisis latar belakang kemerdekaan Malaya (PTM) 1906 - 1957.
- b. Untuk mendeskripsi dan menganalisis proses perubahan dari PTM menjadi Federasi Malaysia 1957 - 1963.
- c. Untuk mendeskripsi dan menganalisis reaksi Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia.
- d. Untuk mendeskripsi dan menganalisis reaksi negara-negara lain terhadap pembentukan Federasi Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian untuk ilmu pengetahuan.

2. Bagi Dunia Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan

Untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang sejarah Asia Tenggara, khususnya Malaysia.

3. Bagi peneliti

a. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang sejarah Malaysia.

b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan menguraikan beberapa hal seputar judul dan istilah yang sering muncul. Hal ini sengaja diuraikan sebagai landasan berpikir untuk memperjelas arti dari beberapa kata penting dalam tulisan ini. Dengan demikian diharapkan nantinya ada kesamaan persepsi mengenai konsep-konsep yang dikemukakan oleh penulis.

Judul skripsi ini adalah **Sekitar Pembentukan Federasi Malaysia 1954 - 1965**. *Sekitar* berasal dari kata kitar yang berarti berpusat pada sumbu atau dapat

diartikan beredar⁵. Bila kata sekitar dikaitkan dengan skripsi ini maka berarti hal-hal yang terjadi di sekeliling proses pembentukan Malaysia. Hal di sekeliling proses pembentukan Malaysia akan ditinjau dari tahun 1906 sebagai landasan pergerakan nasional di negara tersebut.

Pembentukan berasal dari kata bentuk yang menunjuk pada cara (sistem) dan susunan yang digunakan dalam arti ketatanegaraan⁶. Pembentukan ini diamati sehingga memiliki bentuk atau wujud yang nyata. Apabila dihubungkan dengan negara Malaysia maka pembentukan ini merupakan suatu proses nyata dari gerakan kebangsaan menuju kemerdekaan.

Federasi memiliki dua arti : pertama, gabungan beberapa badan perhimpunan yang bekerja sama seakan-akan merupakan satu badan, tapi masing-masing perhimpunan tetap berdiri sendiri ; kedua, persatuan dari beberapa negara, dengan pemerintah pusat untuk mengurus hal-hal mengenai persatuan seluruhnya seperti : keuangan, urusan luar negeri, pertahanan, dan sebagainya. Sedangkan negara bagian atau negara anggota mengurus urusan dalam di daerah masing-masing⁷.

Menilik kedua arti dari Federasi maka yang sesuai

⁵W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia** (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm. 889.

⁶Poerwadarminta : 122.

⁷Poerwadarminta : 281.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9

dengan keadaan Malaysia adalah arti yang kedua. Di mana pemerintah pusat yakni Kuala Lumpur mengurus hal-hal yang ekstern dari ketiga belas negara bagian dan masing-masing dari negara bagian tersebut mengurus urusan daerahnya sendiri.

Setiap unit sejarah memiliki lingkup temporal dan spasial (waktu dan ruang)⁸. Dimensi ruang yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Malaysia. Sedangkan dimensi waktu pada penelitian ini adalah tahun 1954 - 1965. Tahun 1954 digunakan sebagai awal penelitian ini karena pada tahun ini terjadi peristiwa penting yang sangat berperan dalam menentukan kemerdekaan Malaya di kemudian hari, yakni bersekutunya tiga partai besar (UMNO-MCA-MIC) yang mewakili tiga etnis besar di Malaya.

Sebelumnya ketiga partai ini justru berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan tujuannya masing-masing. UMNO (United Malay National Organization) mewakili tekad dan keinginan bangsa Melayu untuk menjadikan Malaya hanya bagi orang Melayu. Sedangkan MCA (Malayan Chinese Association) mewakili orang-orang Cina di Malaya yang bertujuan menjadikan Malaya sebagai tanah air kedua. Begitu juga halnya dengan MIC (Malayan Indian Congress) mewakili orang-orang India di Malaya.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa orang-orang

⁸Sartono Kartodirdjo, **Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah**, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 72.

Melayu harus bersaing dengan orang-orang India, dan Cina untuk memiliki tanah air mereka. Hal ini terjadi karena sistem penjajahan Inggris yang memperhatikan kesejahteraan penduduk koloninya sehingga kurang menyadari bahaya yang mengancam.

Sampai dengan tahun 1957 kerajaan-kerajaan di Malaya terorganisir dengan baik karena Inggris menempatkan seorang residen di Malaya, dimaksudkan untuk melakukan pembinaan administrasi dan birokrasi modern di tiap-tiap kerajaan Melayu. Pada tahun 1942 sampai 12 September 1945 kekuasaan Inggris atas Malaya harus berakhir untuk sementara waktu, karena kemenangan Jepang pada perang Pasifik. Pada tahun yang sama, Inggris kembali menginjakkan kakinya di Malaya.

Gambaran kesadaran kebangsaan Malaya tampak jelas setelah pendudukan Jepang berakhir di Malaya. Hal itu disebabkan karena siksaan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Malaya sewaktu dijajah Jepang. Pendudukan Jepang ini juga mengakhiri anggapan yang selama ini melekat di sanubari bangsa Malaya yakni, **Inggris tidak dapat dikalahkan**, dan menumbuhkan apa yang disebut sebagai sikap anti penjajahan pada masyarakat Malaya. Mulai saat ini rakyat Malaya berjuang untuk memerdekakan bangsanya dari penjajahan Inggris.

Kemudian tahun 1965 digunakan sebagai akhir penelitian ini karena pada waktu itu Singapura memutuskan untuk keluar dari Federasi Malaysia.

Penggabungan Singapura dengan Federasi Malaysia hanya berumur kurang lebih dua tahun. Sejak saat itu Malaysia harus berjuang sendiri untuk memajukan negara barunya. Pada tahun yang sama Indonesia memutuskan keluar dari PBB karena Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan akhir tahun 1964. Hal ini merupakan reaksi Indonesia atas terbentuknya Federasi Malaysia tahun 1963. Setelah sebelumnya Indonesia mengeluarkan proyeknya yang dikenal dengan nama **Ganyang Malaysia** dengan Dwikoranya. Menurut Indonesia Malaysia tidak menepati kesepakatan semula antara Indonesia, Malaya, dan Filipina dalam menentukan wilayah kekuasaan dari Malaysia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses kemerdekaan Malaysia yang berhubungan atau bersinggungan dengan kepentingan ketiga negara itu.

Malaysia sebagai dimensi ruang pada penelitian ini merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1963. Sebelumnya pada tahun 1957, sebenarnya Malaysia sudah memperoleh kemerdekaan dalam bentuk Persekutuan Tanah Melayu (PTM). Tetapi kemerdekaan itu belum sesuai dengan kehendak rakyat Malaya, karena keinginan rakyat untuk mendirikan negara Malaysia dengan wilayah kekuasaan yang terdiri dari Semenanjung, Sabah, Serawak, Brunei, dan Singapura pada awalnya ditolak oleh Inggris. Campur tangan Inggris masih besar karena kemerdekaan yang didapat masih berada dalam **Commonwealth**

British.

Secara geogarfis Malaysia terletak antara 0,5° - 7° Lintang Utara dan 100° - 119,5° Bujur Timur. Luas wilayah Malaysia kurang lebih 332.961 Km², terbagi atas Malaysia Barat ± 131.870 Km² dan Malaysia Timur ± 201.091 Km². Malaysia Timur terdiri dari Sabah ± 76.115 Km² dan Serawak ± 124.976 Km². Di bagian utara berbata-san dengan Thailand, sebelah selatan dengan Indonesia, dan sebelah barat dengan Selat Malaka. Malaysia terdiri dari tiga belas negara bagian dan satu kerajaan persekutuan atau Federasi. Ketiga belas negara bagian itu terbagi menjadi dua bagian yakni sembilan kesultanan dan empat propinsi. Kesembilan kesultanan yaitu : Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Selangor, Perak, dan Trengganu. Sedangkan keempat propinsi yaitu : Malaka, Pulau Penang, Sabah, dan Serawak⁹.

Di samping itu ada beberapa kata penting lainnya yang perlu mendapat penjelasan yaitu : *Melayu*, *Malaya*, *Malayan*, dan *persekutuan*. *Melayu* ialah ras atau suku bangsa asli yang mendiami Malaya. Sedangkan *Malaya* adalah tanah yang didiami oleh orang-orang Melayu tersebut. *Malayan* adalah kata sifat dari bahasa Inggris. Arti *Malayan* menurut Inggris adalah bahwa bangsa Melayu, India, dan bangsa-bangsa lainnya di

⁹Richard Butwell : 210 cf Sekretariat Nasional ASEAN : 157.

Malaya merupakan satu bangsa Malaya, semua bangsa yang kosmopolitan ini adalah warga negara Malaya yang mempunyai hak yang sama dengan bangsa Melayu sebagai penduduk asli Malaya. Kebangsaan baru ini disebut oleh Inggris dengan kata Malayan. Sedangkan *persekutuan* adalah bergabungnya beberapa badan atau organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Persekutuan dalam hal ini adalah bergabungnya UMNO-MIC-MCA dengan tujuan yang sama yaitu memerdekakan Malaya.

Pembahasan skripsi ini memfokuskan pada empat bagian penting yaitu : Latar belakang terbentuknya PTM, perubahan PTM menjadi Federasi Malaysia, reaksi Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia, dan reaksi negara-negara lain terhadap pembentukan negara itu. Untuk itu pada bagian pertama akan dideskripsikan dan dianalisis bagaimana timbul dan berkembangnya nasionalisme Malaya, proses kemerdekaan Malaya pertama dan motivasi Inggris. Pada bagian kedua akan dideskripsikan dan dianalisis mengenai bagaimana peluang, proses dan kemerdekaan Malaysia 1963. Pada bagian ketiga akan dideskripsikan dan dianalisis bagaimana reaksi negara-negara lain yang memiliki kepentingan langsung di Semenanjung Malaya terhadap pembentukan Malaysia, baik reaksi positif maupun negatif.

Untuk itu akan digunakan beberapa buku pokok dalam membahas bagian perbagian. Buku-buku yang dijadikan

panduan antara lain : *Sejarah Asia Tenggara* (Hall, D.G. E. dan Brian Harrison), buku ini menguraikan dan membahas sejarah dari Malaya, perjuangan, dan hasilnya. *Sejarah Nasionalisme Maphilindo*, di dalam buku ini dijelaskan hal-hal yang melatarbelakangi terbentuknya PTM, perubahan, dan reaksi yang timbul akibat itu. *Sekitar Malaya merdeka*, buku ini menguraikan dan membahas secara jelas sebab-sebab terbentuknya PTM 1957 dan peran rakyat Malaya yang begitu besar dalam memerdekakan tanah airnya. *Malaysia*, buku ini menguraikan secara rinci bagaimana proses perubahan itu terjadi secara bertahap. *Sejarah Malaysia dan Singapura*, buku ini menguraikan secara rinci keadaan Malaya, motivasi Inggris, dan sikap Malaysia-Singapura terhadap penjajah. *TNI Dalam Politik Luar Negeri*, buku ini menguraikan dan menjelaskan sebab-sebab perubahan sikap Indonesia yang semula menyetujui proyek Federasi Malaysia sampai pada pernyataan penolakan. *Sukarno, Biografi Politik*, di dalam buku ini menguraikan pandangan-pandangan Sukarno mengenai bentuk baru dari PTM. *Reaksi Terhadap Pembentukan Federasi Malaysia*, buku ini membahas tentang reaksi negara-negara tetangga terhadap aksi dari PTM. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, membahas sebab-sebab mengapa Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia. Dan masih banyak buku-buku lain yang sangat membantu penulisan ini. Selain buku digunakan pula sumber-sumber dari surat kabar, majalah, pidato-

pidato, dan ketetapan-ketetapan.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian sejarah memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Penelitian sejarah lebih menekankan pada dua hal pokok yang cukup mendasar yaitu mencakup dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu setiap topik penelitian sejarah yang kemudian menjadi historiografi harus mengandung kedua unsur dimensi itu. Penelitian ini secara eksplisit telah menunjukkan adanya dua dimensi tersebut.

Metode penelitian secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif berarti bahwa data-data yang dikumpulkan dan dianalisis akan dikonversi dalam bentuk angka-angka. Sedangkan metode kualitatif datanya berupa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat. Karena skripsi ini datanya berupa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat maka termasuk penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif bisa ditempuh dengan dua cara yaitu penelitian lapangan dan studi pustaka. Penelitian lapangan berarti peneliti harus mencari sumber baik dengan wawancara langsung, penyebaran kuesioner maupun yang lainnya. Sedangkan studi pustaka (Library Research) berarti peneliti harus mencari data-data yang telah dibukukan, seperti halnya dengan skripsi ini. Pada penelitian ini penulis ingin menggali teori-

teori atau konsep-konsep yang telah diketemukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder dan juga primer dan menghindari duplikasi penelitian¹⁰.

Penelitian ini perspektif historis. Oleh karena itu data yang digunakan juga bersifat historis. Data historis yang dimaksud adalah pengumpulan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan perkembangan historis dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial dalam perunutan temporal yang mengandung dimensi waktu, memberikan stempel pembentuk sehingga terwujud keadaan sekarang¹¹.

Data ini diperoleh dari sumber-sumber berupa literatur yang ada di perpustakaan, baik berupa buku, majalah, surat kabar, maupun publikasi lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka skripsi ini menempuh langkah-langkah metodologi penelitian sebagai berikut :

¹⁰Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), **Metode Penelitian Survei**, (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm. 45.

¹¹Kartini Kartono, **Pengantar Metodologi Research Sosial**. (Bandung : ALUMNI, 1980), hlm. 225-226.

1. Penentuan sumber

Penelitian ini memiliki dua ciri yaitu, pertama mengandung perspektif historis dan kedua bersifat kualitatif. Oleh karena itu, data yang akan digunakan harus memenuhi dua kriteria tersebut. Pertama, mengandung perspektif historis berarti data yang akan digunakan merupakan kumpulan fenomena-fenomena yang dibatasi dalam dimensi ruang dan waktu. Berarti data pada penelitian ini berdasar pada fenomena yang terjadi dalam satu tempat dan dibatasi oleh waktu seperti yang tercantum pada judul skripsi ini. Kedua, sifat dari penelitian ini adalah kualitatif maka data yang digunakan akan berupa pernyataan-pernyataan atau tulisan.

Data pada penelitian ini akan diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu metode penelitian di mana peneliti menggali dan mengolah data yang sudah berbentuk tulisan atau pernyataan menjadi suatu historiografi. Ini berarti menandakan bahwa data yang akan digunakan sudah ada kemudian tinggal mencari, mempelajari, dan memperdalam.

Sumber data pada penelitian ini akan mengandalkan dari buku-buku dan surat kabar. Buku-buku yang digunakan bisa terbitan dalam negeri maupun luar negeri khususnya Malaysia sendiri. Pada buku-buku tersebut diharapkan terdapat pernyataan-pernyataan mengenai gejala atau peristiwa yang rele-

van dan sezaman dengan kurun waktu telah ditentukan. Sedangkan surat kabar yang akan digunakan adalah terbitan dalam negeri.

2. Kritik Sumber.

Kritik sumber merupakan tahap penelitian sejarah setelah pengumpulan data. Kritik bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas dan otentisitas sumber. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kritik adalah uji terhadap data pada penelitian sejarah¹².

Kritik sumber pada penelitian sejarah merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini untuk menghindari adanya kepalsuan dan keberpihakan suatu sumber. Apalagi data pada penelitian ini sebagian besar merupakan sumber sekunder. Oleh karena itu peneliti akan memperlakukan sumber sedemikian rupa supaya hasilnya bisa mendekati kebenaran.

Salah satu cara yang ditempuh penulis untuk kritik intern adalah membandingkan antar sumber. Bila perbandingan ini kesemuanya positif maka sumber tersebut bisa diakui kredibilitasnya. Sedangkan untuk melakukan kritik ekstern sumber tertulis biasanya dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa, dan sebagainya.

¹²Kuntowijoyo : 99 cf Louis Gottschalk (terj), **Mengerti Sejarah**, (Jakarta : UI Press, 1975), hlm. 95 cf Sartono Kartodirdjo, 1992 : 16.

Setelah identitasnya terbukti asli, baru diteliti isinya, apakah isi pernyataan, fakta-fakta dan ceritanya dapat dipercaya. Untuk itu perlu diidentifikasi penulisnya, beserta sifat dan wataknya, daya ingatannya, jauh dekatnya dari peristiwa dan lain sebagainya.

Pada umumnya sumber seperti surat kabar dan majalah tidak memerlukan kritik ekstern. Setiap sumber memuat sejumlah data tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Peneliti perlu menyelidiki mana yang relevan dengan pokok penelitian kemudian menyediakannya lewat pengolahan sebagai fakta-fakta. Hasil kritik sumber ialah fakta yang merupakan unsur-unsur bagi penyusunan atau rekonstruksi.

Untuk sumber primer terutama terbitan Malaysia relatif sukar ditemukan. Oleh karena itu penulis mengalami sedikit kesulitan untuk mendapatkan sumber primer.

3. Analisis

Data yang telah diseleksi dan diuji, kemudian dilanjutkan dengan analisis. Analisis merupakan tahap yang penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Jenis analisis akan ditentukan oleh sifat data yang dikumpulkan. Apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit bersifat monografis

atau berwujud kasus-kasus maka analisisnya pastilah bersifat kualitatif¹³.

Hasil analisis akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian. Penulis akan berusaha menempatkan data secermat mungkin supaya hasil penelitian ini bisa mendekati keadaan yang sebenarnya. Pengolahan data secara cermat diharapkan mampu mengurangi subjektivitas yang biasanya muncul dalam sebuah historiografi. Sebab, sejarah dalam arti objektif (peristiwa) yang diamati dan dimasukkan kepikiran subjek tidak akan pernah murni tapi telah diberi warna sesuai kaca mata subjek¹⁴.

Analisis dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan sintesis dari tesis dan antitesis yang telah diolah oleh penulis. Sintesis dalam hal ini adalah kemampuan untuk menghasilkan unsur baru yang belum pernah diungkapkan oleh penulis terdahulu. Oleh karena itu penulis akan berusaha memunculkan ide baru pada penelitian ini tanpa mengurangi obyektivitas. Obyektivitas yang sempurna memang sukar dicapai tetapi setidaknya akan diusahakan oleh penulis.

Unsur baru yang diusahakan oleh penulis

¹³Koentjaraningrat, ~~Metode-metode~~ **Penelitian Masyarakat**, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 269.

¹⁴Sartono Kartodirdjo : 62.

merupakan salah satu ciri pada penelitian ini. Adanya ide baru inilah yang menunjukkan keberhasilan penulis dalam melakukan analisis.

4. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran secara menyeluruh mengenai skripsi ini maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.

Bab II Menguraikan latar belakang kemerdekaan Malaya (PTM) 1906 - 1957 dengan sub permasalahan :

a. Timbul dan berkembangnya nasionalisme Malaya. Pada bagian ini akan diuraikan dalam tiga sub bahasan :

1. Tahap keagamaan 1906 - 1926

Tahap ini merupakan awal dari kesadaran berpolitik bangsa Melayu. Gerakan nasionalisme pada tahap ini berlatar belakang agama yang sangat kuat.

2. Tahap sosial ekonomi 1926 - 1937

Pada tahap ini perkembangan nasionalisme di Malaya lebih bersifat

sekuler (duniawi)

3. Tahap politik 1937 - 1948

Tahap ini merupakan perkembangan nasionalisme Malaya yang sepenuhnya dipengaruhi oleh unsur-unsur politik.

b. Proses kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1954 - 1957.

Pada bagian ini akan diuraikan dalam tiga sub bahasan :

1. Perkesutuan UMNO - MCA - MIC.
2. Perundingan kemerdekaan Malaya.
3. Motivasi Inggris.

Bab III Menguraikan proses perubahan dari PTM menjadi Federasi Malaysia 1957 - 1963.

Pada bagian ini akan diuraikan menjadi tiga sub bahasan :

- a. Peluang kemerdekaan
- b. Proses kemerdekaan
- c. Kemerdekaan Federasi Malaysia

Bab IV Menguraikan reaksi Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia.

Pada bagian ini akan diuraikan menjadi lima sub bagian :

- a. Latar belakang umum
- b. Reaksi awal Indonesia
- c. Reaksi keras Indonesia

d. Arti dan dimensi konfrontasi

e. Pandangan dunia Sukarno

Bab V Menguraikan reaksi negara-negara lain terhadap pembentukan Federasi Malaysia.

Pada bagian ini akan diuraikan menjadi empat sub bagian :

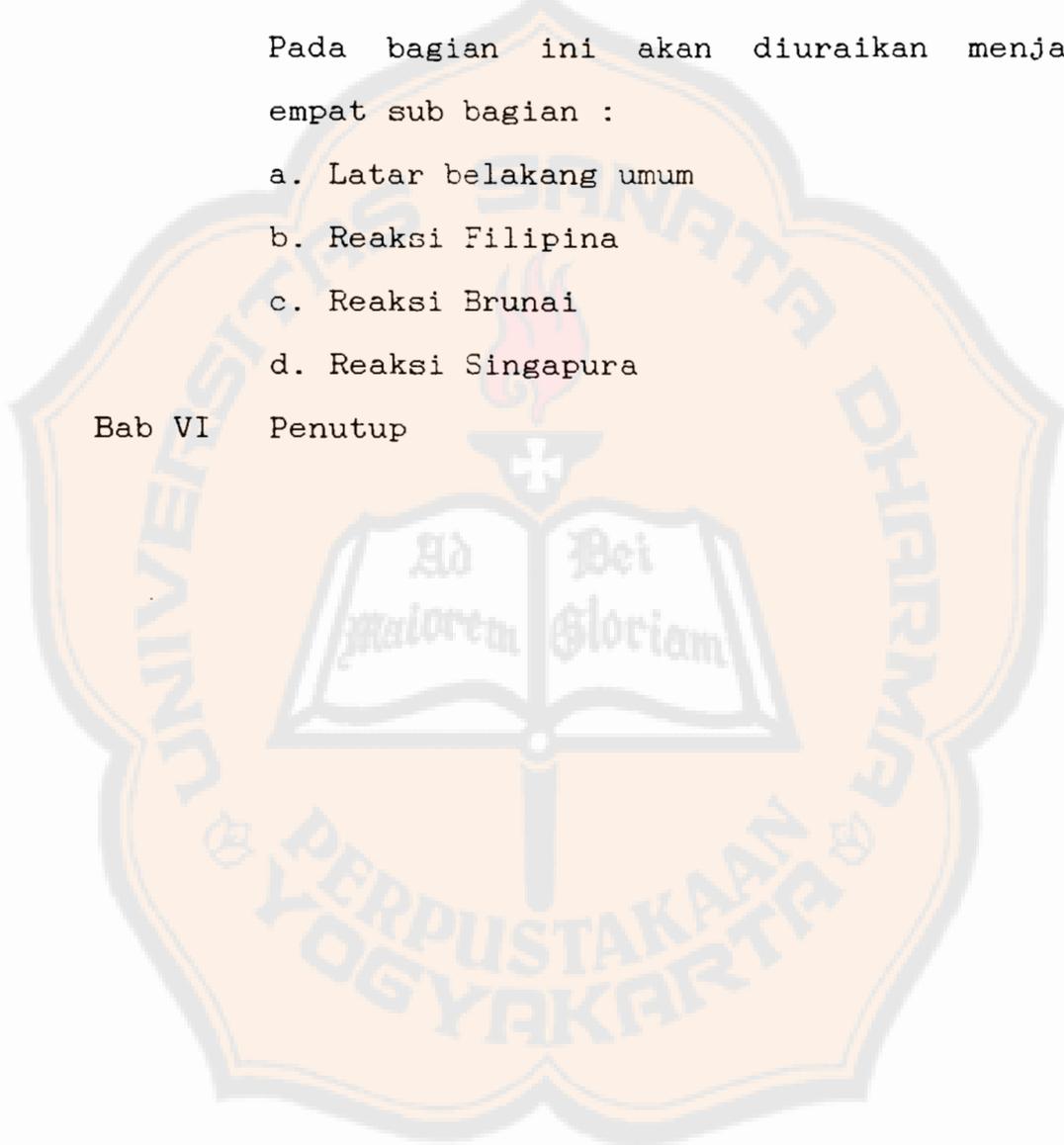
a. Latar belakang umum

b. Reaksi Filipina

c. Reaksi Brunai

d. Reaksi Singapura

Bab VI Penutup



BAB II

LATAR BELAKANG KEMERDEKAAN MALAYA (PTM)

1906 - 1957

A. Timbul Dan Perkembangan Nasionalisme Malaya

Membicarakan kemerdekaan suatu bangsa harus mengetahui terlebih dahulu proses kesadaran berbangsa dan bernegara yang merupakan faktor terpenting bagi suatu negara merdeka.

Timbulnya semangat kebangsaan atau kecintaan pada tanah air (nasionalisme) pada orang-orang Malaya (termasuk Penang dan Singapura) tidak transparan. Amat Johari Moain dalam bukunya yang berjudul **Sejarah Nasionalisme Maphilindo**, menyatakan kelahiran nasionalisme Malaya hampir bersamaan masanya dengan kelahiran nasionalisme Indonesia. Tetapi sayang dia tidak menyebutkan angka tahun yang jelas, hanya disebutkan antara 1926 - 1927. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan nasionalisme pada masyarakat koloni Inggris ini tidak berkembang sebagaimana layaknya bangsa terjajah.

Kesadaran cinta tanah air, pada bangsa Malaya berkembang sangat lambat. Hal ini terjadi karena sistem penjajahan Inggris yang sedikit lunak terhadap daerah jajahan bila dibandingkan dengan penjajah lainnya. Kebijakan politik penjajahan inilah yang menyebabkan Malaya kurang menyadari keadaan sesungguhnya.



Nasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu **nation** berarti bangsa. Dalam bahasa Latin yaitu **natio** dari **natus** = lahir. Nasionalisme modern di Eropa bangkit pada abad XVIII, dan merupakan suatu gerakan politik untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Lagi pula gerakan ini untuk membina masyarakat sipil yang liberal dan rasional.

Kebangkitan nasional negara-negara Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin berbeda-beda coraknya. Nasionalisme di beberapa negara di Eropa adalah suatu usaha untuk mencari batas-batas negara dan bangsa yang tinggal di wilayah negara tersebut¹.

Di negara-negara Asia pada jaman modern, nasionalisme merupakan dampak dari pengaruh kekuasaan kolonial bangsa Barat. Nasionalisme di Asia umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya, apabila pengertiannya dihubungkan dengan politik kolonial Barat, maka timbul dan pertumbuhannya di kawasan tersebut berbeda-beda coraknya. Politik kolonial Inggris di semenanjung Malaya menciptakan suatu hubungan ekonomi dan sosial-politik, di mana daerah koloni diberi kesempatan memerintah sendiri. Sedangkan daerah koloni dan negeri induk membentuk pemerintahan "commonwealth". Daerah

¹Lihat Suyatno, **Timbul dan Perkembangan Nasionalisme Indonesia**, (*Basis*, November 1985 no XXXIV), hlm. 14.

koloni bukan semata-mata untuk dieksploitasi tetapi perlu ditingkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya bangsa Belanda di Indonesia mempraktekkan politik kolonial yang mementingkan negeri induk. Bagi Belanda daerah koloni adalah sumber ekonomi untuk memakmurkan negeri induk. Mulai politik kolonial lama, seperti Tanam Paksa, Politik Liberal, dan Politik Etis. Kesemuanya menunjukkan daerah koloni menjadi penyangga negeri Induk².

Perbedaan politik kolonial Barat di Asia menyebabkan beragamnya reaksi pribumi. Seperti yang telah diketahui reaksi pribumi di bawah politik kolonial Belanda relatif lebih radikal dibandingkan dengan jajahan Inggris. Perbedaan perlakuan dan reaksi tersebut akan memberikan karakteristik tersendiri bagi muncul dan berkembangnya nasionalisme di Asia Tenggara.

Untuk memahami perkembangan nasionalisme Malaya maka dimunculkan beberapa definisi nasionalisme sebagai alat analisis. Dari definisi-definisi ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai nasionalisme di Malaya.

Beberapa definisi nasionalisme antara lain :

1. Ernest Renan

Nasionalisme berasal dari kata **nation** : suatu perasaan atau kehendak untuk tetap hidup bersama,

²Suyatno : 14-15.

yang timbul antara golongan besar manusia yang nasibnya sama dalam masa lampau, terutama dalam penderitaan bersama dan tetap ingin mempertahankan kebersamaannya³.

2. Hans Kohn

Nasionalisme menyatakan bahwa negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik dan bahwa bangsa adalah sumber dari sumber tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi⁴.

3. Otto Bauer

Nasionalisme : suatu persamaan perangai yang terjadi dari persatuan hal ikhwal yang dijalani oleh rakyat itu⁵.

Dari ketiga definisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan rumusan tetapi memuat unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur itu misalnya kemauan untuk bersatu dalam bidang politik, dalam suatu negara kebangsaan (nasional). Inilah yang diperjuangkan oleh rakyat Malaya. Jadi rasa nasionalisme itu sudah dianggap muncul manakala suatu bangsa sudah bercita-cita ingin

³Ernest Renan, **Apakah Bangsa Itu**, (Bandung : ALUMNI, 1994), hlm. xvii-xviii.

⁴Hans Kohn, **Nasionalisme Arti dan Sejarahnya**, (Jakarta : PT Gramedia, 1976), hlm. 12.

⁵Sukarno, **Di Bawah Bendera Revolusi**, jilid 2, (Jakarta : Gunung Agung, 1965), hlm. 2 cf Badri Yatim, **Soekarno, Islam dan Nasionalisme**, (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1985), hlm. 61.

mendirikan suatu negara kebangsaan dengan jalan bersatu.

Untuk lebih memperjelas timbulnya semangat nasionalisme pada orang-orang Melayu di Malaya, ada baiknya sekilas kita lihat kebelakang sejarah masuknya bangsa asing (penjajah) ke Malaya. Malaya yang dulu termasuk dalam wilayah Sriwijaya, kemudian Majapahit adalah pusat kekuasaan orang Melayu di Asia Tenggara. Tetapi, pada tahun 1511 pusat kerajaan Melayu di kota Malaka diserang dan dikalahkan oleh angkatan perang Portugis. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kakinya di Asia Tenggara. Dan di Malaya juga merupakan bangsa Eropa yang pertama. Kemudian pada tahun 1641, kota Malaka dirampas oleh Belanda dari Portugis. Sesudah itu Inggris menduduki Malaka pada tahun 1786⁶.

Kerajaan Melayu yang tadinya berpusat di kota Malaka dipindahkan ke Johor, kemudian ke Kampar (Sumatera), dan akhirnya ke Riau.

Pada waktu itu perjuangan yang dilakukan oleh orang Melayu melawan penjajah bersifat kedaerahan dan tidak bersatu. Oleh karena itu pada abad XVII, terjadilah persekutuan orang Melayu Malaya dan Bugis

⁶Ibrahim Yaacob, **Sekitar Malaya Merdeka**, (Djakarta : Kesatuan Malaya Merdeka Bagian Penerangan, 1957), hlm. 18 cf Sukarno, **Indonesia Menggugat**, (Djakarta : Deppen RI, 1956), hlm. 16 cf **Kompas**, 17 Januari 1997 : hlm. 22.

untuk menentang penjajah Belanda dan Inggris di sekitar selat Malaka.

Akan tetapi perjuangan orang Melayu-Bugis ini menjadi lemah, karena infiltrasi-infiltrasi penjajah Inggris dari Singapura, dan Belanda dari Batavia. Akhirnya pada tahun 1824, Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian di Eropa, yang isinya membagi-bagikan wilayah kerajaan Melayu yaitu ; Inggris menjadikan Malaya di bawah pengaruhnya yang berpusat di Singapura dan kepulauan Riau (Sumatera) di bawah pengaruh penjajahan Belanda.

Pada tahun 1824 Inggris berangsur-angsur memasukkan kekuasaannya di Malaya dan Kalimantan Utara. Empat kota pelabuhan didudukinya yaitu : **Singapura, Malaka, Pulau Penang, dan Pulau Labuhan**(di Kalimantan Utara). Usaha Inggris untuk menguasai daerah tanah Melayu itu mendapat perlawanan dari raja-raja setempat. Baru pada akhir abad XIX Inggris dapat menguasai beberapa negeri di Malaya. Keberhasilan Inggris ini ditempuh dengan cara memerangi raja-raja yang menentangnya. Sedangkan raja-raja yang berpihak padanya dijadikan sultan-sultan Melayu dan dilindungi oleh Inggris.

Permulaan abad XX berdirilah sebelas buah kerajaan Melayu kecil sebagai negeri yang bersultan di Malaya terdapat : Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Kedah, Perlis, Trengganu, dan Kelantan ; sedang-

kan Serawak dan Brunei di Kalimantan Utara. Semua negeri itu di bawah perlindungan (protectorate) kekuasaan Inggris yang berkedudukan di Singapura⁷.

Dapat dikatakan bahwa pada akhir abad XIX Inggris berhasil menjajah Malaya. Perjuangan orang Melayu pun terhenti sementara, karena mereka harus taat kepada sultan atau raja yang dilindungi oleh kekuasaan penjajah Inggris⁸.

Memasuki abad XX, yang merupakan abad kebangkitan nasionalisme di Asia-Afrika, Malaya pun kembali bergejolak.

Bertolak dari kenyataan itu perkembangan nasionalisme Malaya melalui beberapa tahap. Perkembangan nasionalisme Malaya akan dibagi dalam tiga tahap sebagai berikut⁹:

1. Tahap keagamaan 1906 - 1926.

Tahap ini merupakan awal dari kesadaran berpolitik bangsa Malaya/Melayu. Gerakan nasionalisme pada tahap ini berlatar belakang agama yang sangat kuat. Ide nasionalisme ini diilhami oleh para pelajar-pelajar Malaya yang belajar di Kairo

⁷Yaacob : 19.

⁸Pada tahun 1877, orang-orang Cina terus berdatangan ke Malaya dan Singapura sebagai buruh-buruh kasar.

⁹Pembagian nasionalisme Malaya ke dalam tahap-tahap ini menurut **Radin Soenarno** dalam bukunya Amat Johari Moain, **Sejarah Maphilindo**, hlm. 171.

(Mesir). Dari gerakan reformasi Islam yang memperjuangkan PAN ISLAMISME, penyatuan dunia Islam untuk menentang perluasan kekuasaan Barat, dan "membebaskan" dari kepercayaan kuno yang tidak berhubungan dengan ajaran Islam. Gerakan ini dipelopori oleh Saiyid Jamaluddin Al-Afghani dan Imam Sheikh Muhammad Abduh¹⁰.

Tokoh Islam di Malaya adalah Sheikh Taher Jalaluddin, Saiyid Sheikh Al-Hadi, dan Sheikh Muhammad. Ketiga tokoh ini belajar bersama pelajar-pelajar dari Indonesia. Kemudian mereka mendirikan PERPINDOM (Perkumpulan Pemuda Indonesia Malaya).

Pada tahun 1904, para pelajar itu kembali ke Malaya. Tindakan awal yang dilakukan ialah berbakti kepada kerajaan Negeri Melayu dalam bidang agama dan pemerintahan. Karena ajaran yang dibawa agak berlainan dengan paham yang sudah mendarah daging di negeri ini, maka mereka pun ditentang oleh golongan tua yang konservatif dan ortodok.

Gerakan mereka pun terbatas pada tiga tempat di Negeri Selat, yaitu : Singapura, Malaka, dan Pulau Penang. Di tiga tempat tersebut gerakan keagamaan bebas dijalankan. Sedangkan di negeri Melayu bidang

¹⁰Amat Johari Moain, **Sejarah Nasionalisme Maphilindo** (Kuala Lumpur : Utusan Melayu Berhad, 1969), hlm. 161-162 cf S. Husin Ali, **Rakyat Melayu Nasip dan Masa Depan**, (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1985), hlm. 24 cf Tan Ding Eing, **Sejarah Malaysia dan Singapura**, (Kuala Lumpur : Fajar Bakti, 1975), hlm. 270.

agama dan adat istiadat dikuasai oleh sultan.

Sebagai tindak lanjut mereka menerbitkan surat kabar **Al-Imam** pada tahun 1906 di Singapura. Surat kabar ini merupakan media massa pertama terbitan orang Melayu, yang berisikan ide-ide perubahan sosial dan politik berdasarkan agama Islam. Terbitnya **Al-Imam** tersebut kemudian disusul oleh surat kabar lainnya seperti : **Neraca** (Singapura 1911 - 1915), **Al-Ikhwān** (1926 - 1931), **Saudara** (1928 - 1941), dan **Edaran Zaman** (1925 - 1930). Surat kabar ketiga terakhir adalah terbitan Pulau Penang.

Selain melalui kotbah di masjid-masjid, menerbitkan surat kabar, dan majalah-majalah, mereka juga mendirikan sekolah-sekolah (madrasah) diantaranya : **Al-Ikbal** (1907), **Muhammadiyah** (Kota baru 1917), **Al-Hadi** (Malaka, 1917), dan **Al-Diniyah** (Perak, 1924)¹¹.

Dalam tahap pertama perkembangan nasionalisme Malaya ini pengaruh agama sangat dominan. Hal ini disebabkan karena agama Islam telah berakar dalam kehidupan orang-orang Melayu. Tetapi gerakan reformis Islam ini akhirnya kandas di tengah jalan, karena tidak adanya persatuan di antara orang-orang Melayu di Malaya. Golongan tua yang terdiri dari para ulama negara dan kelompok elit tradisional

¹¹Moain : 164-165 cf Ali : 25 cf Eing : 270-271.

Melayu berjuang keras untuk memamatkan ide-ide dari golongan muda ini. Gerakan reformis Islam ini dituduh oleh golongan tua tidak menjalankan perintah agama (menyimpang). Kemudian mereka dilarang berkotbah di masjid-masjid, menerbitkan surat kabar dan majalah.

2. Tahap Sosial-Ekonomi 1926 - 1937.

Pada tahap ini perkembangan nasionalisme di Malaya lebih bersifat sekuler (duniawi). Perubahan sifat ini disebabkan oleh tentangan hebat dari golongan tua kepada reformis Islam dan golongan muda. Di samping tentangan dari golongan tua juga adanya faktor lain yaitu memudarnya semangat Pan Islamisme dikalangan penganut agama Islam, manakala Kekhalifahan Turki hancur pada tahun 1924.

Sifat sekuler nasionalisme Malaya ini pada umumnya lebih disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan politik dan ekonomi orang-orang asing, khususnya Cina. Serta munculnya intelektual Melayu berpendidikan Melayu dan intelektual Melayu berpendidikan Inggris. Kesadaran ini bertambah besar sesudah terjadi pemberontakan melawan Belanda di Jawa dan Sumatera pada tahun 1926¹².

Telah menjadi mitos bahwa orang Melayu

¹²Yaacob : cf Moain : 176.

dilindungi oleh Inggris. Tetapi keadaannya semakin memprihatinkan karena daerah pedesaan mereka dan seluruh negeri itu telah tergadai oleh kekuasaan kolonial. Orang-orang pedesaan melihat keadaan pedagang-pedagang Cina dan rentenir-rentenir bangsa India semakin makmur, sehingga dilihat sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan hidup mereka. Orang-orang Melayu yang tinggal di kota-kota terdiri dari pegawai negeri menengah dan rendah. Mereka melihat bahwa orang-orang Cina, India, dan Arab telah mengendalikan sebagian besar perekonomian negara itu sehingga menambah "ketidakpastian" terhadap masa depan Malaya. Mereka sering mengutarakannya dalam surat kabar, majalah, dan juga melalui suara organisasi yang dibentuk oleh orang Melayu¹³.

Ketidakpuasan orang Melayu bukan ditujukan kepada kekuasaan kolonial, melainkan kepada bangsa Cina, India, dan juga Arab yang dianggap orang asing dan pemeas¹⁴.

Hal ini dapat dimengerti karena orang-orang Melayu masih berpikiran apa adanya (lugu) itu melihat bangsa-bangsa Cina, India, dan Arab hidup makmur. Kekayaan dan kekuasaan orang Inggris tidak

¹³Ali : 24.

¹⁴Tetapi kebencian kepada orang-orang Arab di Malaya tidak sebesar kebencian yang ditujukan kepada orang-orang Cina dan India. Karena jumlah orang Arab tidak banyak dan dapat dikatakan semua beragama Islam.

terjangkau oleh pengetahuan mereka yang terbatas. Terlebih karena para penguasa dan sultan-sultan beserta stafnya diberi kedudukan oleh Inggris. Perwira-perwira menengah diberi kesempatan untuk bekerja pada pemerintah kolonial. Mereka menganggap Inggris sebagai pelindung dan karena itu kedudukannya tidak dipersoalkan.

Seperti sudah diterangkan sebelumnya yaitu pada akhir abad XIX perjuangan rakyat Melayu mempertahankan kemerdekaannya sudah patah. Raja-raja Melayu dijadikan alat oleh penjajah Inggris guna menjalankan kekuasaannya. Selain itu juga untuk mendapatkan hak-hak monopoli mengeksploitasikan Malaya oleh kaum bordjuis-kapitalis Inggris. Ekonomi rakyat Melayu ditekan dengan politik pintu terbuka, Malaya dijadikan negeri kosmopolitan dengan orang-orang Melayu dipecah-pecah dalam sebelas negeri-negeri kecil.

Akan tetapi ternyata tekanan-tekanan politik ekonomi penjajah itu, dalam waktu yang singkat telah memberikan kesadaran kepada orang Melayu untuk memunculkan bibit-bibit kesadaran nasional. Selanjutnya kesadaran ini bertambah besar sesudah terjadi pemberontakan melawan Belanda di Jawa dan Sumatera tahun 1926. Berita terjadinya pemberontakan di Indonesia itu dengan diam-diam disambut oleh orang Melayu di Malaya dengan perasaan gembira.

Sambutan ini disebabkan karena perasaan serumpun antara Indonesia dan Malaya. Selain itu tokoh-tokoh pemberontak dari Indonesia ada yang melarikan diri ke Malaya seperti Tan Malaka, Alimin, Djameluddin Tamin, Semaun, Sutan Djenain, Darsono, Mukhtar Lutfi, Burhan Djamin, Moh. Arif, dan lain-lain. Mereka inilah yang menyebarkan doktrin-doktrin nasionalisme melawan penjajah¹⁵.

Kesadaran nasional di Malaya semakin cepat tumbuhnya sesudah lahirnya Partai Nasional Indonesia (PNI) di Jawa. PNI didirikan oleh Sukarno pada tahun 1927, yang menuntut Indonesia merdeka sekarang juga. Gerakan ini diam-diam disambut oleh orang Melayu di Malaya dengan antusias. Ada pula orang Melayu Malaya yang menjadi anggota PNI, antara lain Ibrahim Yaacob yang memimpin perkumpulan mahasiswa di Sultan Idris Training College-Tanjung Malim (Perak) beserta kawan-kawannya¹⁶.

Gerakan mereka lebih kuat, tegas, dan terorganisir, sebab sudah mendapat pelajaran-pelajaran berharga dari perjuangan golongan agama

¹⁵Yaacob : 21 - 22 cf John D. Legge, **Sukarno, Sebuah Biografi Politik**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1985), hlm. 105 cf Moain : 176 cf Eing : 272 - 273.

¹⁶Yaacob : 21 cf Legge : 110 - 111 cf Moain : 176 - 177 cf Eing : 272.

dalam tahap nasionlisme pertama¹⁷.

Selain itu, juga mendapat dorongan semangat dari perjuangan yang dilakukan oleh nasionalis bangsa lain di luar negeri. Misalnya perjuangan bangsa Jepang melawan Russia di Asia Timur ; Sun Yat Sen dengan pergerakannya menentang Manchu di negeri Cina ; perjuangan Mahatma Gandhi, Nehru, Ali Jinnah, Ali Khan, Iqbal, dan tokoh-tokoh pergerakan lain di India ; perjuangan Sukarno, Hatta, Syahrir, dan tokoh-tokoh lain di Indonesia ; perjuangan nasionalis Filipina seperti Jose Rizal dan Aquinaldo.

Kaum intelektual Melayu yang berpendidikan Inggris banyak yang pro penjajah, karena telah terdidik secara kolonial. Sikap mereka terhadap penjajah pun relatif tidak anti kolonial. Tetapi, adakalanya mereka mengkritik pemerintah Inggris dalam masalah-masalah yang merugikan orang-orang Melayu umumnya, seperti mengizinkan orang-orang asing dari Cina dan India masuk ke Malaya.

Di antara nasionalis Melayu yang berpendidikan Inggris ialah Raja Sir Chulan (Raja Hilir Perak) dan Dato Sir Onn Bin Ja'afar. Keduanya mendapat tempat dalam *council federal* (majelis permusyawaratan

¹⁷Perbandingan dalam pergerakan Melayu Malaya saja. Kalau dibandingkan dengan pergerakan nasional lain kedudukannya sangat rendah.

federal)). Mereka memperjuangkan nasib dan hak-hak orang Melayu serta menuntut kepada pemerintah Inggris agar keistimewaan yang diberikan kepada orang Inggris juga diberikan kepada orang Melayu¹⁸.

Adapun kesadaran nasional di Malaya itu terpecah menjadi dua aliran besar yaitu ¹⁹:

- a. Kesadaran nasional dengan tuntutan, **Malaya Untuk Malaya** (Malaya for the Malaya). Dasar ini diikuti oleh kaum bordjuis-feodal yang memandang dari kepentingan kaum raja dan kaum terpelajar, sudah mulai terdesak hidupnya oleh penjajah dan kaum bordjuis asing.
- b. Kesadaran nasional yang menuntut hak hidup bagi seluruh rakyat yang tertindas supaya men dapat kemerdekaan. Kesadaran inilah yang melahirkan ide kesatuan Indonesia-Raya, yaitu menurut pandangan mereka seluruh keturunan suku bangsa Melayu (Malay Archipelago) wajib bersatu menjadi satu bangsa besar, berdasarkan pada ikatan persatuan ras, sejarah, peradaban/kebudayaan, bahasa, alam/geografis, dan kepentingan hidup bersama.

Maka di samping dua aliran kesadaran nasional ini, pada tahun 1924 pergerakan komunis yang dipelopori oleh orang Cina berhubungan dengan

¹⁸Eing : 203.

¹⁹Yaacob : 21.

perkembangan aktivitas nasionalis Kuomintang pada tahun 1926 mengatakan bahwa Malaya (termasuk Penang dan Singapura) adalah daerah atau propinsi kesembilan belas dari negeri Cina.

Dengan adanya suara dari orang-orang Cina itu timbullah rasa curiga penduduk Melayu terhadap mereka di Malaya. Keadaan ini juga menjadi salah satu sebab yang mempercepat kesadaran nasional orang Melayu yang terpecah pada dua aliran seperti yang diterangkan sebelumnya. Pertentangan di antara Melayu dengan Cina semakin meluas ; mereka menjadi tidak percaya satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh tahun 1929-1930, surat kabar-surat kabar Melayu menunjukkan sikap anti Cina.

Keadaan yang kacau ini menjadi bertambah kusut ketika suku bangsa penduduk Malaya yang lain, yaitu orang India juga menggiatkan pergerakan India-Congressnya. Sama halnya dengan golongan Eurasian dan Ceylonese (merupakan suku bangsa minoritas) juga menuntut hak politik di Malaya. Tuntutan-tuntutan ini dirasakan oleh orang Melayu untuk merebut hak warisannya.

Berhubung dengan timbulnya kesadaran nasional yang begitu rumit di Malaya, di mana penduduk keturunan asing menuntut hak yang sama dengan penduduk pribumi, maka sejak tahun 1930 semakin besarlah persengketaan antar kaum di Malaya. Di

kalangan penduduk Malaya yang kurang lebih 48% orang Melayu, 40% orang Cina, 10 % orang India, selain itu ialah orang Ceylon (Sri Langka), Eurasian (campuran Eropa Asia), dan lain-lain²⁰. Masing-masing menuntut hak yang sama tetapi terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok sendiri. Perpecahan inilah yang menjadi alat yang paling berguna bagi kaum penjajah. Oleh karena itu sebelum tahun 1946 tidak terdapat suatu organisasi nasional yang terorganisir dan kuat untuk menentang penjajah Inggris di Malaya.

3. Tahap Politik 1937 - 1948

Tahap ini merupakan tahap perkembangan nasionalisme Malaya, yang sepenuhnya dipengaruhi oleh unsur-unsur politik.

PNI dibubarkan pada tahun 1931, dengan ditangkapnya Sukarno pada tahun 1930 oleh pemerintah Hindia Belanda. Tetapi, kaum nasionalis di Malaya yang tergabung di dalam PNI tetap meneruskan perjuangannya secara diam-diam. Dan kelanjutannya pada tahun 1937, kaum nasionalis merencanakan untuk membentuk satu partai politik Melayu yang progresif revolusioner. Pada awal tahun 1938 barulah keinginan ini terwujud dengan lahirnya **Kesatuan Melayu Muda**

²⁰Yaacob : 23 of A.K. Wiharyanto, **Peranan UMNO Dalam Perjuangan Malaya**, (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 1991), hlm. 6 of Ali : 83.

(KMM) yang dipelopori oleh Ibrahim Yaacob²¹.

Adapun lahirnya KMM ini dapat dikatakan mirip dengan lahirnya Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan lain-lain di Hindia Belanda (Indonesia). KMM didukung oleh sebagian besar pemuda-pemuda pelajar. KMM adalah organisasi politik pertama yang bergerak meliputi seluruh Malaya yang bercorak non-cooperation. Lahirnya KMM kemudian diikuti oleh berdirinya organisasi-organisasi setempat seperti *Kesatuan Melayu Selangor*, *Fahang*. Didirikan antara tahun 1937-1939, dipimpin oleh kaum bordjuis-feodal yang makin sadar akan hak nasionalnya. Gerakan ini adalah pihak yang co-operation dengan Inggris.

Seperti sudah diterangkan di depan, sejak berdirinya KMM, maka timbullah organisasi perjuangan nasional di Malaya yang terang-terangan melawan Inggris. Pihak Inggris segera menyadari kenyataan tersebut. Oleh sebab itu sebelum pecahnya perang Pasifik yang digerakkan Jepang terhadap tanah jajahan Inggris dan Sekutu pada akhir tahun 1941, Inggris sudah menangkap hampir semua orang anggota pimpinan pusat dan cabang anggota KMM di seluruh

²¹Dibantu oleh Hasan Manan, A. Karim Rasjid, Isa Muhammad, dkk, yang pada tahun 1929 telah menjadi anggota PNI. Ali : 24 - 25 cf Eing : 272 cf Moain : 180 cf Yaacob : 24.

Malaya²². Alasan penangkapan dan penahanan itu ialah berdasarkan pada Undang-undang Pertahanan (*Defence Regulation*), maka semua orang yang anti Inggris dimasukkan penjara di Kuala Lumpur dan Singapura. Tetapi di awal tahun 1942 keadaan telah berubah, dimana pada bulan Februari 1942, Inggris menyerah kalah kepada Jepang. Situasi di seluruh Asia Tenggara pun berubah total. Para pemimpin KMM yang ditangkap Inggris dibebaskan oleh Jepang.

Pada masa kekuasaan Jepang semua partai politik dibubarkan kecuali KMM, yang waktu itu terpaksa bekerja sama dengan Jepang demi menyelamatkan Malaya. Tetapi sebagian rakyat Malaya percaya dengan janji-janji yang diberikan oleh Jepang untuk memerdekakan Malaya. Janji ini tidak pernah dipenuhi. Sebaliknya Jepang bercita-cita hendak **menjepangkan** Malaya, termasuk orangnya dengan segala cara. Untuk mewujudkan keinginan ini Jepang memusnahkan segala sesuatu yang berbau budaya musuhnya (Inggris). Akibatnya rakyat Malaya semakin tertindas²³.

Pada tahun 1943, pemerintah Jepang telah membentuk satu pasukan tentara yang diberi nama PETA

²²Pemimpin KMM yang ditawan Inggris antara lain : Ibrahim Yaacob, Ishak Mohammad, Mohd. Isa Mahmud, A. Karim Rasjid, Hasan Manau, Idris Hakim, Ahmad Boestaman, dan lain-lain dengan jumlah keseluruhan lebih dari 150 orang.

²³Eing : 212 - 213.

(*Fasukan Pembela Tanah Air/Malay Giyu Gun*) di Singapura. Kesempatan ini digunakan oleh KMM untuk melatih pemuda Melayu supaya mahir menggunakan senjata. Tujuannya agar tentara yang terlatih itu dapat digunakan untuk melawan pasukan Jepang/Inggris pada suatu saat nanti. Sebagai ketuanya terpilih Ibrahim Yaacob.

PETA pimpinan Ibrahim Yaacob ini bekerja sama dengan MPAJA (*Malayan People's Anti Japanese Army*) yang dibentuk oleh tentara Sekutu. MPAJA juga bekerja sama dengan MCP (*Malayan Communist Party*) dan golongan-golongan lain yang anti Jepang. Meskipun demikian cita-cita ini kembali tersendat karena pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada Sekutu setelah pemboman atas Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945²⁴.

Dengan kalahnya Jepang, Inggris kembali menginjakkan kakinya di Malaya. Tetapi, keadaan di Malaya telah jauh berubah. Gambaran kesadaran pada bangsa Melayu di Malaya setelah pendudukan Jepang, dapat dikatakan jauh berbeda dengan keadaan ketika Inggris berkuasa. Hal itu disebabkan siksaan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Malaya ketika dijajah Jepang.

Pendudukan Jepang yang hanya berusia kurang

²⁴Eing : 213 - 306.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lebih tiga tahun ini juga telah mengakhiri anggapan yang selama ini melekat di hati bangsa Melayu yaitu. **Inggris tidak dapat dikalahkan.** Serta menumbuhkan apa yang disebut sebagai sikap anti penjajahan pada masyarakat Malaya. Bahkan sikap kebangsaan ini juga muncul dikalangan orang-orang Cina dan India di Malaya.

Semangat nasionalisme di antara orang-orang Cina muncul di Malaya, disebabkan oleh sikap tidak bersahabat yang ditujukan Jepang kepada mereka. Adapun semangat nasionalisme orang India timbul sebagai akibat dukungan Jepang terhadap usaha-usaha mereka untuk memerdekakan diri dari Inggris di India. Menghadapi kenyataan itu, Inggris menerapkan pola baru dari sistem kolonialnya, yaitu membentuk **Persekutuan Malaya (Malayan Union)**. Mulai diterapkan pada tanggal 1 April 1946²⁵.

Dalam rangka pemerintahan Malayan Union ini kesembilan negeri Melayu yang diperintah oleh seorang raja. dan kedua negeri Selat (kecuali Singapura) dimasukkan ke dalam negara kesatuan (*Malayan Union*). Singapura diasingkan dan kedudukannya tetap sebagai tanah jajahan Inggris yang mempunyai guber-

²⁵Sembilan negeri yang diperintah oleh raja-raja Melayu : Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Terngganu, Perak, Kelantan, Kedah. dan Perlis. Dua negeri Selat : Pulau Penang dan Malaka.

nur sendiri²⁶.

Dalam Malayan Union (MU) pemerintahan dijalankan atas nama Mahkota Raja Inggris dan raja-raja Melayu yang berada di bawah pemerintahan Inggris (boneka Inggris). Raja-raja Melayu dipaksa menandatangani rencana pembentukan itu.

Untuk menghadapi pembentukan MU, para pejuang Malaya menyadari bahwa mereka harus bersatu agar mudah untuk mencapai tujuan. Untuk itu bergabunglah gerakan-gerakan nasional ke dalam *United Malays National Organization* (UMNO) pada bulan Mei 1946, dan Dato Sir Onn bin Ja'afar terpilih sebagai ketuanya²⁷.

UMNO yang baru lahir ini segera mendapat ujian yang berat. Karena UMNO merupakan organisasi gabungan, berarti di dalam UMNO tetap ada beberapa golongan politik yang berbeda-beda ; bahkan ada golongan yang bertentangan tetapi bergabung bersama UMNO. Ada golongan yang ingin bergabung dengan Indonesia, ada yang menuntut berpemerintahan sen-

²⁶Sebab Singapura dikeluarkan dari Malayan Union ialah pertama, supaya jumlah orang Melayu lebih banyak dari dari rakyat bukan Melayu di Malaya. Kedua, Inggris berusaha mengekalkan pemerintahannya di Singapura sekalipun Malaya memperoleh kemerdekaan di kemudian hari. Karena Singapura merupakan pelabuhan paling baik yang dimiliki oleh Inggris di Timur, serta memiliki Naval Base (pangkalan kapal perang) dan lapangan terbang Angkatan Udara Diraja Inggris (Moain : 204)

²⁷Ali : 26-27 cf Eing : 295 cf Yaacob : 45 cf Wiharyanto, Peranan...., 14 cf **Forum** no. 15 Tahun II 11 November 1993.

diri, ada yang ingin mendirikan negara Komunis Melayu. Dan terakhir golongan feodal (raja-raja dan pembesar-pembesar Melayu), dapat menguasai UMNO. Serta membuat organisasi ini menjadi sebuah badan politik yang co-operation dengan pemerintah Inggris, untuk mengembalikan kekuasaan simbolis raja-raja Melayu.

Dalam perkembangannya kelompok nasional radikal keluar dari UMNO, yaitu golongan MNP (*Malay National Party*), AMI (*Angkatan Muda Insyaf*), AWAS (*Angkatan Wanita Sedar*), dan kelompok-kelompok lain yang sehaluan²⁸.

UMNO berkeyakinan bahwa raja adalah lembaga pemersatu yang menjadi sumber kewenangan final dalam masalah adat dan agama. Dengan demikian tidak terjadi alienasi (keterasingan) antara sultan dengan rakyatnya. Karena itu setiap perjuangan yang berusaha memisahkan raja dan rakyat akan berhadapan langsung dengan kemarahan rakyatnya.

Struktur feodal masih kuat di kalangan raja Melayu, maka perjuangan UMNO dalam memajukan hak-hak orang Melayu tidak bisa mengesampingkan sultan begitu saja.

Sebaliknya kaum nasional radikal berpendapat bahwa raja-raja Melayu itu harus dilenyapkan karena

²⁸Eing : 296 cf Moain : 213 cf Yaacob : 4.

mereka adalah kaki tangan pemerintah kolonial. Di samping itu, Malaya yang terkotak-kotak oleh adanya raja, akan mempersulit persatuan bangsa Melayu. Dengan dibentuknya sebuah republik, maka kaum nasionalis yakin bahwa peranan raja-raja itu akan tersingkir²⁹.

Untuk merealisasikan cita-citanya, UMNO berpendapat bahwa satu-satunya cara yang dianggap paling mungkin adalah bekerja sama dengan Inggris. Sebaliknya Inggris yang sejak semula membendung masuk dan berkembangnya komunis di Malaya, berpendapat bahwa dengan membimbing UMNO untuk kelak berkuasa di Malaya adalah satu-satunya jalan yang paling tepat. Seandainya Inggris memberi kesempatan kepada kaum nasionalis yang non-kooperasi maka situasi waktu itu memberi kemungkinan komunis untuk menunggangi gerakan komunis tersebut.

Dengan keluarnya kelompok ekstrim dari UMNO, maka UMNO terus berusaha mengembalikan kekuasaan raja-raja Melayu, meskipun hanya kekuasaan simbolis saja, serta terus menentang Malayan Union.

Ternyata usaha-usaha dari para pemimpin UMNO ini tidak sia-sia karena para para mantan pejabat Inggris dan Malaya, seperti Sir Richard Winstedt, Sir George Maxwell, Sir Rolland Braddie, Frank

²⁹Wiharyanto, Peranan...., 19.

Swettenham, dan Sir Cecil Clementi tidak setuju dengan Malayan Union. Mereka menganggap pelaksanaan MU merupakan penghilangan hak-hak istimewa orang Malaya.

Selain itu pihak Inggris sendiri merasakan bahwa MU tidak dapat dipertahankan lagi, karena satu-satunya kelompok (UMNO) yang pro Inggris saja menentang MU. Kecuali itu Inggris sedang dihadapkan pada bahaya yang datang dari tiga penjuru yaitu :

(1) **Cina nasionalis** yang ingin menguasai Malaya untuk dijadikan propinsi kesembilan belas dari negeri Cina ; (2) **Cina Komunis** yang bertujuan mendirikan Republik Komunis Malaya dan ; (3) **Perkembangan gerakan nasional Indonesia yang mendalam di kalangan orang-orang Melayu di Malaya**³⁰.

Hasilnya MU dibubarkan pada bulan Februari 1948 dan diganti dengan Federation of Malaya, dengan memberikan kekuasaan simbolis kepada kesembilan orang raja Melayu di bawah Komisaris Tinggi.

Semua negara bagian Melayu dan Straits Settlement³¹, kecuali Singapura mempunyai Dewan Legislatif

³⁰Wiharyanto, Peranan...., 16 cf Yaacob : 44.

³¹Straits Settlement : Pulau Penang, Singapura, Province of Wellesley. Straits Settlement ini adalah daerah daulat Inggris (British Territory), yang berbeda dengan kerajaan-kerajaan Malaya yang berdaulat sendiri-sendiri. Straits Settlement ini merupakan kesatuan yang mempunyai pemerintah sendiri. Semula berpusat di Penang, milik Inggris yang tertua, tetapi kemudian pindah ke Singapura tahun 1932 sampai memperoleh kemerdekaan.

yang terdiri dari 74 anggota. Mereka dipilih dari antara pegawai-pegawai Inggris yang mewakili para penguasa di negeri itu. Bentuk pemerintah baru ini ternyata lebih maju karena peranan orang-orang Melayu semakin besar.

Dengan bentuk Federasi, semua keinginan pihak UMNO dan Inggris dapat disatukan. Ditinjau dari kepentingan UMNO, keuntungan bentuk Federasi sudah terlihat. Namun bagi Inggris perlu dikaji lebih dulu. Dengan bentuk Federasi, Inggris dapat menciptakan Malaya sebagai negara dengan kebangsaan baru. Maksud dari kebangsaan baru di sini yaitu bahwa Cina, Malaya, India, Indo-Inggris dan bangsa-bangsa lainnya, merupakan satu bangsa Malaya. Semua adalah warga negara Malaya yang mempunyai hak yang sama. Kebangsaan baru ini disebut **Malayan Nationality**.

Mengenai pembentukan Malayan Nationality ini antara UMNO dengan nasionalis radikal berbeda pandangan. Bagi UMNO pembentukan Malayan Nationality secara sungguh-sungguh tidak mungkin sebab dalam bentuk Federasi itu raja-raja Melayu memperoleh kembali kekuasaannya sehingga hubungan raja dengan rakyat makin kuat. Hak bangsa Melayu lebih mudah dipertahankan. Kaum nasionalis radikal menyatakan bahwa dengan dibentuknya Federasi ini, Inggris akan segera membentuk Malayan Nationality. Hal ini akan

sangat merugikan bangsa Melayu³².



B. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1954 - 1957

Malaya dipaksa oleh Inggris untuk menerima pemerintahan dalam bentuk Federation of Malaya pada tahun 1948. Pada bulan Juni 1948 Inggris menempatkan Malaya di bawah Undang-undang Darurat (*State of Emergency*), karena golongan komunis mengobarkan pemberontakan bersama-sama dengan kaum nasionalis radikal. Pada masa ini semua partai-partai politik dilarang, karena mereka dituduh membantu pemberontak.

Perlawanan terhadap Inggris semakin luas setelah *Malayan Chinese Association* (MCA) tumbuh pada tahun 1949. Sementara itu orang-orang India di Malaya membentuk *Malayan Indian Congress* (MIC). Organisasi ini akhirnya nanti bergabung bersama UMNO untuk memerdekakan Malaya.

Pada tahun 1949 perjuangan gerilya Malaya menentang pasukan bersenjata penjajah Inggris semakin hebat. Penyebabnya adalah pembentukan Federation of Malaya. Maka Inggris berpendapat bahwa sistem pemerintahan itu perlu diganti. Oleh karena itu Komisaris Jenderal Inggris untuk Asia Tenggara, **Mac Donald**, mengusahakan untuk membentuk panitia penghubung antar golongan (*Communities Liasion Commite*). Tujuannya

³²Wiharyanto, Peranan...., 20.

supaya pemimpin kaum bordjuis Melayu, Cina, India, dan lain-lain bersatu untuk membentuk bangsa Malayan yang akan disertai oleh Inggris untuk memerintah Malaya³³.

Pada tahun 1950, Jenderal Sir Herald Briggs, diangkat sebagai Panglima Operasi Tentara penjajah untuk membasmi gerilya *Tentara Pembebasan Rakyat Malaya* (TPRM). Sementara itu Inggris menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Malaya, bila penduduk kosmopolitan itu mau bersatu menjadi Bangsa Malayan dan bersama-sama menentang TPRM³⁴.

Walaupun Inggris bertindak tegas dan berusaha mematahkan perjuangan rakyat Malaya, tetapi semangat nasionalisme tetap tumbuh subur. Sehingga Inggris pada tahun 1951 menganggap perlu mengambil langkah dengan mengubah sistem pemerintahan Federation of Malaya dengan pemerintahan bermenteri (Ministerial Government), dengan mengangkat beberapa orang Melayu menjadi menteri di bawah Komisaris Tinggi Malaya. Ketua UMNO, Dato Sir Onn bin Ja'afar, diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri, yaitu jabatan tertinggi yang dapat ditempati oleh bangsa Melayu. Tetapi, atas pengangkatan ini Inggris berusaha agar rencananya untuk membentuk bangsa Malayan demi mengekalkan kekuasaannya

³³Eing : 317 cf Moain : 226 cf Wiharyanto, Peranan...., 23 cf Yaacob : 59.

³⁴Eing : 314 cf D.G.E. Hall, **Sejarah Asia Tenggara**, (Surabaya : Usaha Nasional, 1988), hlm. 1081 cf Yaacob : 61.

di bumi Malaya terwujud, dengan mengusahakan kerjasama antara UMNO-MCA-MIC.

Oleh karena itu Inggris mengusahakan agar Dato Sir Onn bin Ja'afar membentuk *Independence of Malayan Party* (IMP), yang keanggotannya terbuka untuk semua penduduk Malaya yang merasa dirinya bangsa Malaya dan menyatakan sebagai tanah airnya. Usaha ini mendapat dukungan dari MCA, MIC, dan golongan lainnya. Untuk memusatkan pikirannya pada IMP, Dato Sir Onn bin Ja'afar mengundurkan diri dari UMNO. Meskipun demikian UMNO tetap mempertahankan pendiriannya bahwa Malaya bukan Malayan dan meneruskan pergerakannya, dengan memilih **Tengku Abdul Rahman Putera bin Sultan Hamid Kedah** menjadi ketua umum UMNO pada tahun 1952³⁵.

1. Persekutuan UMNO, MCA, dan MIC

Sikap UMNO yang tetap memperjuangkan hak-hak orang Melayu membubarkan tujuan IMP. Kegagalan IMP membuat Inggris berubah sikap dan berusaha membujuk para pemimpin MCA dan MIC yang masih bergabung di dalam IMP untuk bekerja sama dengan UMNO.

Usaha Inggris ini tidaklah berjalan mulus, karena UMNO mencurigai MCA dan MIC yang masih bergabung dalam IMP. UMNO sendiri khawatir jika IMP

³⁵Ali : 28 cf Eing : 317 - 318 cf Hall : 1082 cf R.O. Winstedt, **A History of Malaya**, (Singapura : Marican Son, 1962), hlm. 226 cf Wiharyanto, *Peranan....*, 25 cf Yaacob : 21.

yang bercorak kosmopolitan ini dapat menguasai rakyat Malaya. Salah satu cara untuk melemahkan IMP ialah menerima ajakan MCA untuk bekerja sama.

Persekutuan UMNO dan MCA ini ternyata membuahkan hasil yang baik. Pada pemilihan Dewan Kotapraja Kuala Lumpur bulan Februari 1952, persekutuan UMNO-MCA berhasil mengalahkan IMP dengan 9 kursi untuk UMNO-MCA dan 2 kursi untuk IMP³⁶.

Kemenangan ini disebabkan perubahan dalam tubuh UMNO sendiri. Di bawah pimpinan Tengku Abdul Rahman, UMNO mau menerima bentuk Malayan yang ditawarkan oleh Inggris. Bentuk Malayan ini berarti bahwa Malaya terbuka untuk semua golongan masyarakat yang mengakui Malaya sebagai tanah airnya dan terbatas pada negeri-negeri Melayu yang dinamakan Federation of Malaya saja. Sementara itu UMNO berusaha supaya orang-orang Melayu dapat menguasai kunci dalam pemerintahan. Diterimanya bentuk Malayan oleh UMNO menjadi alasan MCA mau bekerja sama dengannya. Mengingat dalam hal ini MCA lebih mementingkan ekonomi dari pada politik.

Sikap yang diambil oleh UMNO benar-benar menarik simpatik semua penduduk Malaya yang menyukai perdamaian dan kemerdekaan. Itulah sebabnya persekutuan UMNO dan MCA akhirnya diikuti oleh MIC pada

³⁶Hall : 1080 - 1082.

tahun 1954. Kemudian Inggris mengangkat Tengku Abdul Rahman untuk menggantikan kedudukan Dato Sir Onn bin Ja'afar, sebagai Menteri Dalam Negeri. Dan masih dijanjikan kedudukan yang lebih besar yaitu dengan mengusulkan pemilihan umum, yang akan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini untuk membentuk pemerintahan berkabinet dengan demokrasi parlementer³⁷.

Dengan bersekutunya UMNO, MCA, dan MIC, berarti tiga bangsa besar di Malaya telah bersatu. Persekutuan ini memperoleh kemenangan mutlak pada pemilu tahun 1955 dan berhasil merebut 51 kursi dari 52 kursi yang diperebutkan. Satu kursi diperoleh Partai Persatuan Islam Malaya (PAS). Dengan kemenangan ini persekutuan UMNO-MCA-MIC yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman, membentuk satu Dewan Menteri di bawah Komisaris Tinggi Inggris pada tahun 1955. Dan Tengku Abdul Rahman dipilih sebagai Kepala Menteri (Chief Minister). Menteri-menteri lainnya ialah orang-orang Malayu dari persekutuan itu. Dewan Menteri ini juga dinamakan Pemerintahan Persekutuan di Malaya.

2. Perundingan Kemerdekaan Malaya

Inggris merasa puas dengan persekutuan

³⁷Ali : 28 - 29 cf Eing : 299 - 300 cf **Ensiklopedi Indonesia** jilid V, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1980), hlm. 55 cf Moain : 236 cf Wiharyanto, Peranan..., 29 cf Yaacob : 65 cf Hall : 28 - 29.

UMNO-MCA-MIC, karena tujuannya untuk mengekalkan kekuasaannya dan membuat Malaya tergantung kepada Inggris berhasil. Untuk menentukan pola pemerintahan dari persekutuan tersebut maka pada bulan Januari 1956, diadakan perundingan antara persekutuan dengan pemerintah Inggris yang berlangsung di London. Perundingan ini dihadiri oleh utusan persekutuan, wakil-wakil dari raja-raja Malaya, dan wakil-wakil dari kerajaan Inggris. Hasil dari perundingan ini menyatakan bahwa Malaya akan memperoleh kemerdekaan dengan status (taraf hak penuh memerintah sendiri dan mereka dalam lingkungan **British Commonwealth**. Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 31 Agustus 1957³⁸.

Selain itu ditentukan bahwa bentuk pemerintahan dari Malaya adalah monarki konstitusional, diperintah oleh seorang raja, dengan gelar Yang Dipertuan Agong. Undang-undang Dasarnya disusun oleh satu panitia yang dibentuk oleh kerajaan Inggris. Di samping itu kerajaan Persekutuan Tanah Melayu diwajibkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian pertahanan, keuangan, keamanan, dan politik luar negeri dengan kerajaan Inggris³⁹.

Kecuali itu ditetapkan pula wilayah kerajaan

³⁸Ali : 29 cf Eing : 300 cf Hall : 1082 cf Wiharyanto, Peranan...., 30 cf Yaacob : 10.

³⁹Hall : 1082 - 1083.

PTM yang meliputi sembilan buah negeri Kesultanan Melayu : Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Trengganu, Perak, Kelantan, Kedah, dan Perlis. Ditambah dua daerah kecil bekas jajahan Mahkota Inggris (Crown Colonies) yaitu : Malaka, dan Pulau Penang. Jadi keinginan rakyat supaya Brunei, Serawak (di Kalimantan Utara) dan juga Singapura (walaupun sebagian besar dari penduduk Malaya tidak setuju) supaya bersatu untuk melahirkan persatuan negara Malaysia belum tercapai, tetapi justru dipecah-pecah oleh Inggris⁴⁰.

Kemerdekaan yang dikarenakan Inggris ini diterima oleh rakyat Malaya sebagai anak tangga atau batu loncatan menuju bentuk yang dicita-citakan bangsa Malaya yang sesungguhnya yaitu merdeka sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun lamanya pasukan-pasukan bersenjata Inggris mencoba membasmi perlawanan Tentara Pembabasan Rakyat Malaya (TPRM). Ternyata kekuatan pasukan Inggris itu tidak dapat mematahkan perjuangan kemerdekaan rakyat Malaya, yang dinamakan komunis oleh Inggris itu.

Dengan situasi yang demikian, Inggris terpaksa mengulurkan suatu tawaran kemerdekaan kepada rakyat Malaya. Di mana pada hakekatnya segala sesuatu tentang garis-garis besar kemerdekaan itu sudah

⁴⁰Yaacob : 11 - 12.

disusun oleh pihak Menteri Jajahan Inggris untuk Malaya. Adapun pihak yang non-kooperatif, yaitu dari pihak Malay National Party (MNP), Malayan Democratic Union (MDO), tidak dapat menerima taraf kemerdekaan Malaya yang diberikan oleh Inggris itu. Tetapi kepada rakyat diserukan supaya menerima kemerdekaan yang bertaraf mendirikan "pemerintahan sendiri" (*Self Government*). Dengan pengertian bahwa perjuangan rakyat Malaya baru sampai pada satu anak tangga kemerdekaan dan perjuangan itu masih harus diteruskan.

Sebagai Yang Dipertuan Agong menurut konstitusi Federasi Malaya yang dipilih Dewan Raja-raja Melayu ialah **Tuan** **Abdul Rahman**. Kepala negara pertama bagi PTM (1957), Raja Negeri Sembilan sejak tahun 1933. Dan sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri ialah **Tengku Abdul Rahman Putera**, sedangkan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Malaya ialah **Tun Abdul Razak**⁴¹.

C. Motivasi Inggris

Inggris menginjakkan kakinya untuk pertama kali di Malaya pada tahun 1795. Akan tetapi yang dapat dikuasai oleh Inggris hanya sebagian Kota Malaka dan sekitarnya. Inggris kemudian menduduki Singapura pada tahun 1819

⁴¹Ensiklopedi Indonesia : 55 - 56.

dan mengambil alih seluruh tanah Malaya dari tangan Belanda pada tahun 1824 sesuai dengan isi Traktat London.

Isi Traktat London antara lain :

1. Belanda menyerahkan Malaka dan Singapura kepada Inggris.
2. Belanda tidak akan menduduki sesuatu daerah di Malaya atau membuat perjanjian dengan raja-raja Malaya.
3. Inggris menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda (Bangkahulu atau Banegkulen diduduki Inggris sejak tahun 1684).
4. Inggris tidak akan menduduki sesuatu daerah atau meluaskan pengaruhnya di daerah selatan Singapura.
5. Inggris menerima semua koloni Belanda di India bersama dengan uang tambahan sebesar \$ 100.000 sebagai pelunasan hutang Belanda kepada Inggris⁴².

Kemudian Pulau Penang, Malaka, Province of Wallesley, dan Singapura dijadikan daerah Straits Settlement oleh Inggris. Semua itu dilakukan Inggris dengan alasan ekonomi. Di samping itu Inggris juga berusaha untuk mencampuri urusan politik orang-orang Melayu di Semenanjung Malaya.

Keterlibatan secara aktif dalam bidang politik pertama kali dimulai di Perak pada tahun 1873. Pada waktu itu Inggris ikut campur tangan dalam konflik antara raja atau sultan setempat di Perak. Padahal sebelum tahun 1873, Menteri Tanah Jajahan di London mengumumkan bahwa pemerintah Inggris di Malaya tidak mencampuri politik negeri-negeri Melayu. Campur tangan

⁴²A.K. Wiharyanto, *Perkembangan Singapura*, (Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma, 1991, hlm. 26.

ini di satu sisi juga disebabkan oleh permintaan dari negeri-negeri Melayu untuk mendapatkan perlindungan karena alasan keamanan atau untuk menguatkan posisi mereka sebagai penguasa daerah. Inggris memenuhi permintaan ini karena terkait dengan usahanya di Malaya, baik berupa saham dalam perusahaan-perusahaan atau perkebunan-perkebunan maupun dalam bentuk lain.

Kerusuhan-kerusuhan sering terjadi di daerah pertambangan-pertambangan maupun perairan-perairan. Jalan tengah dari penyelesaian itu pasti akan melibatkan Inggris. Perompak-perompak di perairan Malaya, sulit diatasi oleh Inggris. Selain jumlahnya cukup banyak, mereka sudah mengenal dengan baik kondisi dan situasi daerah sekitar Malaya. Seperti kerusuhan di Larut pada bulan Juli 1873 (pertambangan timah di daerah Pulau Penang) yang penyelesaiannya menurunkan *Earl of Kimberley* (Menteri Negara Tanah Jajahan). Dalam menyelesaikan kerusuhan ini Kimberley mengatakan bahwa Inggris akan berusaha menyelesaikan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, karena kestabilan politik adalah satu syarat yang wajib bagi perekonomian. Karena akan mengurangi bahaya-bahaya spekulasi⁴³.

Motivasi Inggris pada bidang politik tampak pada perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada tahun 1874, oleh perwira-perwira Inggris dari Straits Settlement

⁴³Eing : 155 - 156.

dan sultan serta pembesar-pembesar Perak. Perjanjian ini timbul sebagai akibat dari kesepakatan Abdullah dengan pemerintah Inggris. Abdullah meminta bantuan Inggris untuk mendapatkan tahta Perak dari sultan yang sah, Ismail, serta menyelesaikan masalahnya dengan pemimpin orang Cina, Kim Cheng, di Singapura sehubungan dengan tahta tersebut. Dengan alasan ini gubernur Sir Andrew Clarke mengambil keputusan untuk bertindak.

Clarke memutuskan untuk membantu, karena Abdullah bersedia menerima seorang pegawai Inggris sebagai pengawas di Perak. Selain itu Abdullah mempunyai dukungan dari pembesar-pembesar Hilir Perak, di mana terdapat pusat-pusat dagang Inggris. Sedangkan Ismail tidak bersedia bekerja sama dengan Inggris, dan pendukung-pendukungnya terdapat di Hulu Perak, di mana Inggris belum mempunyai hubungan dagang⁴⁴.

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat di daerah Pangkor ini, sangatlah merugikan rakyat Malaya, khususnya rakyat Melayu Perak. Dan memberi kesempatan kepada Inggris untuk memainkan peranannya lebih jauh lagi. Untuk memperjelas ada baiknya kita lihat isi dari perjanjian Pangkor ⁴⁵:

1. Raja Muda Abdullah diakui sebagai Sultan Perak.
2. Raja Ismail, sekarang pemangku Sultan Perak akan

⁴⁴Eing : 157.

⁴⁵Eing : 156 - 159.

dibenarkan mengekalkan gelar sultan muda dan disediakan suatu daerah khusus untuknya.

3. Ngah Ibrahim (orang kepercayaan Ismail) diakui oleh Inggris sebagai penguasa Larut, tetapi tidak dapat memerintah dengan bebas.
4. Sultan Abdullah harus menyediakan tempat kediaman untuk seorang pegawai Inggris yang akan memangku jabatan sebagai residen, dan menerimanya untuk ambil bagian di dalam istana. Nasehat dari residen ini harus dituruti kecuali mengenai agama dan adat istiadat Melayu.
5. Penguasa Larut juga harus menerima seorang residen.
6. Semua penghasilan dan pendapatan negeri diatur oleh residen.
7. Residen, sultan, dan pembesar-pembesar lainnya akan dibayar dari pendapatan negeri tersebut.
8. Keputusan yang dibuat oleh pegawai-pegawai Inggris mengenai pengembalian tambang-tambang timah di Larut dan ganti rugi harus dibayar oleh raja yang berkuasa.
9. Pembesar Larut harus membiayai anggaran pemulihan keamanan di Perak.

Setelah Perak, penguasa-penguasa daerah Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang, juga menandatangani perjanjian yang sama dengan Inggris, dengan alasan keamanan. Keempat negeri itu dipersatukan oleh Inggris

menjadi Negeri Federasi Melayu pada tahun 1895⁴⁶.

Negeri-negeri di utara yakni Perlis, Kedah, Kelantan, dan Trengganu sebelumnya di bawah kekuasaan Raja Siam dan setiap tahun harus membayar upeti kepada Bangkok. Tetapi sejak tahun 1909, negeri-negeri itu menjadi protektorat kerajaan Inggris. Tidak lama setelah itu Johor membuka perjanjian yang sama dengan Inggris demi melindungi daerahnya dari bajak laut dan penguasa-penguasa Cina. Kelima negeri ini kemudian dikenal sebagai negeri-negeri Melayu non-federasi.

Sementara negeri-negeri federasi menerima pegawai Inggris sebagai residen dan wakil residen, negeri-negeri federasi menerima penasehat dan wakil. Meskipun bentuk tersebut berbeda, namun fungsi, pengaruh dan kekuasaan mereka hampir sama yakni, menguasai ekonomi dan politik daerah tersebut, karena Inggris menjadi yang dituakan.

Pada permulaannya Inggris memperkuat kedudukan para penguasa Melayu. Kemudian mereka mendirikan berbagai departemen dan menunjuk pegawai-pegawai Inggris dengan tujuan mengumpulkan pajak, mengatur masalah tanah, memelihara hukum dan peraturan-peraturan lainnya. Para kepala bagian adalah orang-orang Inggris dan kemudian beberapa bangsawan Melayu diberi kesempatan untuk menempati posisi sebagai bawahan.

⁴⁶Ali : 20 cf Eing : 159.

Pegawai-pegawai Inggris kemudian mengadakan survai geologis dan mempelajari masalah tanah untuk tujuan pertanian. Penemuan-penemuan yang menguntungkan Inggris, mendorong dibukanya tambang-tambang timah dan penanaman karet secara besar-besaran⁴⁷.

Perusahaan-perusahaan Inggris bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kecil yang dimiliki oleh para kapitalis Cina dan bangsawan Melayu yang telah lama mengolah tambang-tambang sebelum kedatangan Inggris. Timah dan karet diproduksi untuk diekspor dan dalam waktu yang sama impor barang jadi dari Inggris diperbesar ke Malaya. Karena sejak revolusi industri pertengahan abad XVIII, Inggris membutuhkan bahan baku yang banyak guna mendukung industri, sesuai dengan tujuan awal penjelajahannya.

Bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan-kemajuan di bidang administrasi, timbullah kota-kota baru sebagai akibat dari aktivitas tersebut. Jalan kereta api dan jalan raya dibangun untuk menghubungkan tambang-tambang dengan perkebunan-perkebunan serta kota-kota dengan pelabuhan-pelabuhan. Sebagai kota administrasi dan perdagangan, kota-kota baru itu memiliki rumah sakit, sekolah, dan perkantoran. Negeri itu kelihatannya makmur dan inilah yang menyebabkan rakyat Malaya terlena. Meskipun kehidupan orang-orang

⁴⁷Eing : 215 - 217 ; 220 - 221 ; 224 - 228.

Melayu di pedesaan menjadi lebih baik, karena masuknya ekonomi keuangan ke daerah pedesaan tetapi menyebabkan peluang yang lebih besar untuk mengeksploitir para petani, baik dalam produksi maupun pemasaran⁴⁸.

Ternyata kekuasaan awal Inggris di Malaya harus berakhir pada tahun 1942. Sebagai mana di negara-negara lain kemenangan Jepang di semenanjung Malaya menghancurkan mitos tidak terkalahkannya negara Barat.

1. Malayan Union

Setelah perang berakhir, Inggris menyiapkan taktik baru untuk mengekalkan kekuasaannya di Asia Tenggara dengan Malaya sebagai pusat penjajahannya di kawasan ini. Oleh karena itu pada tahun 1946, Inggris menerapkan pola baru dari sistem kolonialnya, yakni membentuk Persekutuan Malaya (*Malayan Union*) yang mulai diterapkan pada tanggal 1 April 1946. Akan tetapi dalam prakteknya Malayan Union (MU) gagal, karena tidak sesuai / tidak mampu memenuhi aspirasi orang-orang Malaya sehingga pemerintah Inggris menggantinya dengan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) pada tanggal 1 Februari 1948.

Kegagalan MU disebabkan antara lain :

- a. MU dianggap tidak menghormati adat istiadat Melayu, kedaulatan sultan diambil alih oleh

⁴⁸Ali : 23 - 24 cf Eing : 240 -244 ; 247 - 249.

Inggris dan mereka hanya dianggap sebagai simbol saja. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal utama dalam pelebagaan Malayan Union : (1) Sembilan negeri-negeri Melayu dan negeri Selat (Pulau Penang dan Malaka) dipusatkan di bawah perintah gubernur Inggris. Singapura akan menjadi sebuah koloni terpisah dari Malaya dengan gubernur sendiri ; (2) Sultan akan terus memegang jabatan mereka, tetapi kedaulatan mereka telah berkurang. Sultan hanya berkuasa penuh dalam hal yang berurusan dengan agama Islam dan menjadi presiden majelis penasehat Melayu di negerinya sendiri. Majelis ini di bawah kekuasaan pusat dan gubernur mempunyai kuasa penuh atas majelis tersebut.

b. MU dianggap mengurangi peran pribumi ; dengan penerapan *ius soli*, dan persyaratan kewarganegaraan yang muda bagi mereka yang ingin menjadi warga negara MU. Kewarganegaraan akan diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan syarat sebagai berikut : (1) Siapa saja yang dilahirkan di negeri MU dan Singapura, telah menetap disitu sebelum keputusan itu dibuat ; (2) Siapa saja yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan telah menetap di MU/Singapura selama 10 tahun dari masa 15 tahun sebelum 15 Februari 1942. Mereka terpaksa mengangkat sumpah kesetiaannya

kepada MU ; (3) Siapa saja yang dilahirkan dalam MU/Singapura pada atau sesudah keputusan tersebut ditetapkan ; (4) Siapa saja yang dilahirkan diluar MU/Singapura pada atau sesudah keputusan tersebut ditetapkan yang mana bapaknya adalah warga negara MU/Singapura ; (5) Anak-anak kecil (di bawah umur 18 tahun) kepada warga negara-warga negara yang tergolong (1) dan (2). Kewarganegaraan MU memberikan hak-hak yang sama rata kepada semua orang tanpa memandang bangsa atau asal keturunan.

- c. Penerapan MU dianggap tidak tepat, karena orang-orang Malaya baru saja berusaha untuk memperbaiki perekonomiannya sebagai akibat penjajahan Jepang dan perang.
- d. MU dipaksakan dengan menerapkan *Political Blakmail*. Raja atau sultan yang tidak menyetujui pelaksanaan MU akan dipecat dan dituduh melawan pemerintah Inggris.
- e. MU ditentang oleh para mantan pejabat Inggris di Malaya seperti Sir Frank Swettenham (Komisaris Tinggi di Malaya). Mereka menganggap pelaksanaan MU merupakan penghilangan hak istimewa orang Malaya.

2. Membentuk Bangsa Malayan

Dengan nama Malayan, Inggris membatasi

wilayahnya hanya pada negeri-negeri Melayu yang dinamakan Federation of Malaya saja. Jadi keinginan rakyat untuk bersatu dengan Kalimantan Utara dapat dicegah. Hal ini karena Kalimantan Utara bukan wilayah dari Malayan. Itulah sebabnya Inggris menolak menamakannya Malaysia.

Untuk mewujudkan motivasi politiknya Inggris sudah membayangkan rencana *Malayanization-Politic*. Artinya politik menjadikan satu bangsa Malayan untuk semua penduduk Malaya dengan menghilangkan hak politik orang Melayu. Tetapi, rencana ini baru terkuak kepermukaan pada tahun 1949 ketika perjuangan gerilya Malaya menentang kekuasaan Inggris semakin hebat⁴⁹.

Oleh karena itu Komisaris Jenderal Inggris untuk Asia Tenggara, **Malcolm Mac Donald**, membentuk panitia penghubung antar perkauman dengan maksud supaya pemimpin-pemimpin bordjuis Melayu, Cina, India, dan lain-lain berusaha atau bersedia membentuk bangsa Malayan. Kepada bangsa Malaya ini nantinya akan diserahkan oleh Inggris untuk memerintah Malaya. Sebagai timbal baliknya mereka harus bekerja sama menentang atau menghabisi pemberontak tersebut.

Ada pun langkah yang diambil oleh Inggris ialah mengubah sistem pemerintahan Federation of Malayan

⁴⁹Yaacob : 58 - 59.

menjadi *Pemerintahan Bermenteri* pada tahun 1951. Agar rakyat Malaya tidak mencurigai sistem pemerintahan baru ini maka diangkatlah beberapa orang Malaya menjadi menteri di bawah komisaris tinggi. Misalnya ketua umum UMNO, Dato Sir Onn bin Ja'afar, dijadikan Menteri Dalam Negeri. Sementara itu usaha untuk membentuk bangsa Malayan terus digalakkan dengan mengusahakan kerjasama UMNO-MCA-MIC⁵⁰.

Langkah selanjutnya ialah mengusahakan agar Dato Sir Onn bin Ja'afar membentuk IMP (*Independence Malaya Party*) yang keanggotaannya terbuka untuk semua penduduk Malaya. IMP dibentuk pada bulan September 1951. Dalam perkembangannya IMP mendapat dukungan dari MCA, MIC, orang-orang Eropa dan lainnya, sesuai harapan Inggris. Untuk memusatkan perhatiannya pada IMP, Dato Sir Onn bin Ja'afar, memutuskan keluar dari Inggris.

Inggris sangat mengharapkan segera mendapat persetujuan dari rakyat Malaya untuk melahirkan bangsa *Malayan*. Perestujuan ini diharapkan oleh Inggris untuk mempertahankan Malaya dari tuntutan perjuangan kemerdekaan golongan nasionalis progresif. Golongan ini menghendaki kemerdekaan penuh bagi Malaya, setelah rencana Briggs yang disusun oleh panglima operasi tentara Inggris di

⁵⁰Ali : 28 cf Moain : 229 - 230 cf Yaacob : 60.

Malaya untuk membasmi gerilya TPRM gagal. Bahkan Komisaris Tinggi Sir Henry Gurney mati dibunuh oleh para gerilya tersebut⁵¹.

Kekhawatiran ini menjadikan Malaya diperintah oleh seorang tentara Inggris yaitu Letnan Jenderal Sir Gerald Templer, yang menjadi Komisaris Tinggi merangkap panglima operasi tentara di Malaya. Templer memerintah dengan tangan besi. Ia menjanjikan hadiah bagi yang dapat membunuh/menangkap para gerilya itu. Kepada para gerilyawan yang tertangkap dijanjikan hadiah apabila bersedia menunjukkan tempat persembunyian para TPRM tersebut. Tetapi, Templer juga tidak bisa melenyapkan perjuangan rakyat Malaya ini.

Motivasi Inggris mendirikan bangsa Malayan ialah supaya di tengah kebangkitan dan kesadaran nasional di Asia Tenggara yang membahayakan kedudukannya, maka sangatlah penting bagi Inggris untuk mempunyai pangkalan yang kuat. Oleh karena itu caranya ialah mendirikan bangsa Malayan yang kosmopolitan itu sehingga menjadi suatu bangsa yang menggantungkan dirinya pada pertahanan dan ekonomi pada Inggris.

Keinginan Inggris tampaknya berhasil dengan bersekutunya 3 partai besar yaitu : UMNO-MCA-MIC

⁵¹Eing : 309 - 310.

pada tahun 1954. Dengan maksud itu, Tengku Abdul Rahman, ketua UMNO yang baru diangkat menjadi pengganti Dato Sir Onn bin Ja'afar. kepadanya masih dijanjikan kedudukan yang lebih tinggi lagi yaitu dengan mengusulkan diadakannya pemilihan umum pada tahun 1955 untuk membentuk pemerintahan demokrasi parlementer.

Pemilu ini dimenangkan oleh persekutuan UMNO-MCA-MIC. Dengan kemenangan ini, Tengku Abdul Rahman diberi wewenang membentuk dewan menteri di bawah komisaris tinggi Inggris pada tahun 1955 juga. Inggris merasa puas dengan persekutuan ini. Maka pada tahun 1956 sesuai dengan janji Inggris sendiri, diadakan perundingan di London untuk menentukan kemerdekaan Malaya. Perundingan memutuskan bahwa kemerdekaan Malaya akan diproklamkan pada tanggal 31 Agustus 1957⁵².

Seperti sudah diterangkan sebelumnya, disamping ketentuan taraf (status) dan bentuk pemerintahan, dengan Undang-undang Dasar yang direncanakan oleh kerajaan Inggris, ditentukan pula hak-hak istimewa Inggris di dalam bidang pertahanan, keamanan dalam negeri, keuangan, dan politik luar negeri. Hak-hak

⁵²Hidayat Mukmin, **TNI Dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia**, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 85 cf Moain : 239 - 240.

istimewa ini yaitu ⁵³:

a. Pertahanan.

Pertahanan/ketentraman Malaya tetap di bawah pengawasan angkatan perang Inggris di Asia Tenggara yang ditempatkan di Malaya. Ketentuan ini diikat oleh suatu naskah perjanjian pertahanan bersama antara kerajaan Inggris dan Malaya. Dalam hal ini Singapura merupakan benteng Inggris yang menguasai pertahanan dan keamanan rakyat Malaya.

b. Keuangan/ekonomi.

Dibuat suatu perjanjian yang menjamin kepentingan perkembangan modal Inggris di Malaya untuk meneruskan eksploitasinya dan keuangan Malaya di bawah pengawasan Inggris.

c. Keamanan dalam negeri.

Tetap di bawah urusan Inggris, terutama usahanya untuk membaemi TPRM (Inggris menamakannya komunis) dan tetap melindungi perkembangan kekuasaan kaum bordjuis-kapitalis di Malaya.

d. Politik luar negeri.

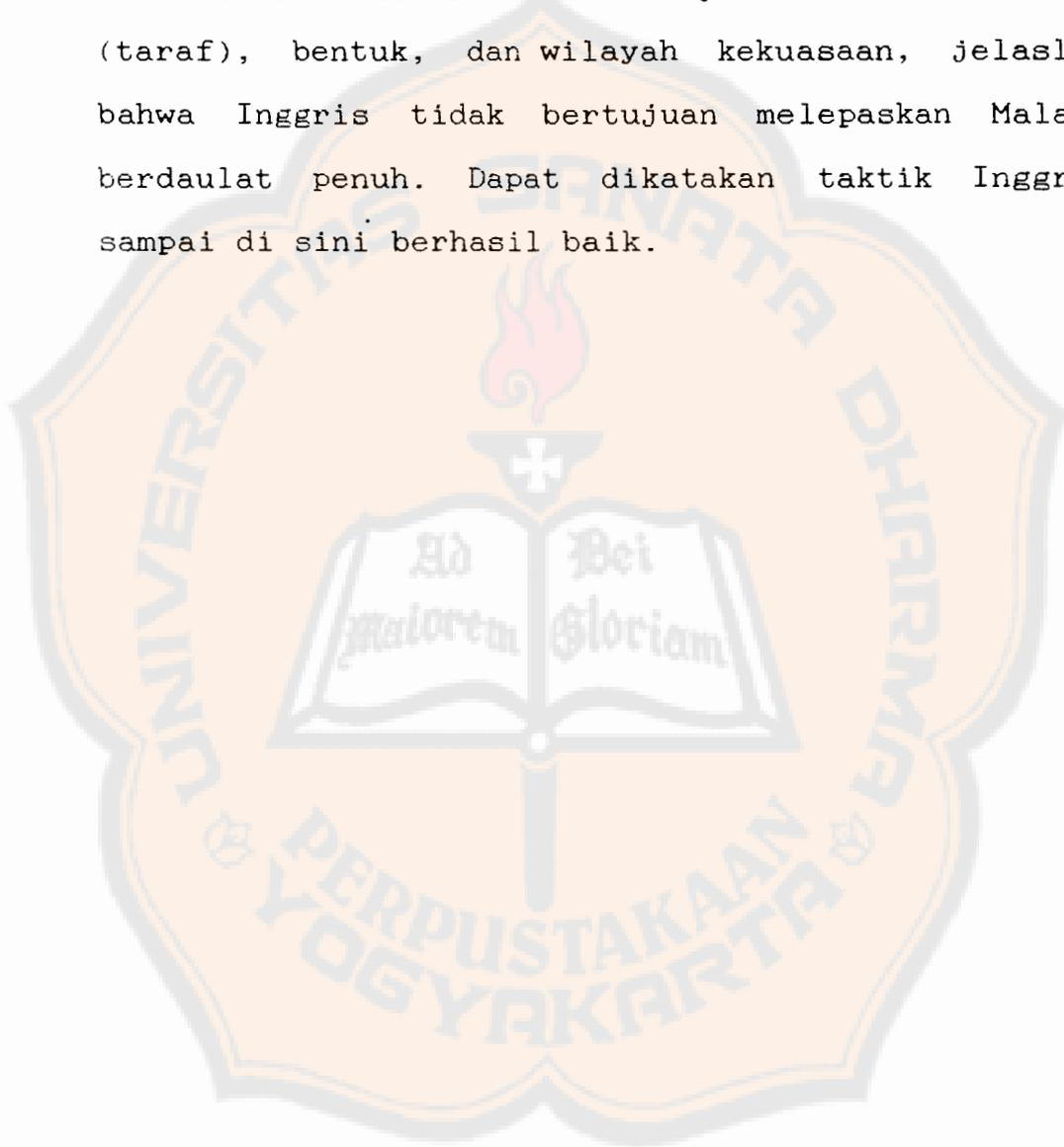
Malaya masuk blok kapitalis Barat sesuai ketentuan Inggris.

Dalam politik luar negeri, tampaklah Malaya menjadi negara boneka yang berada di dalam

⁵³Moain : 241 - 243 cf Yaacob : 11 - 13.

commonwealth Inggris, serta di dalam badan-badan internasional lain guna memperkuat suara blok Inggris.

Menilik kemerdekaan Malaya baik dari status (taraf), bentuk, dan wilayah kekuasaan, jelaslah bahwa Inggris tidak bertujuan melepaskan Malaya berdaulat penuh. Dapat dikatakan taktik Inggris sampai di sini berhasil baik.



BAB III

PERUBAHAN PTM MENJADI FEDERASI MALAYSIA

1957 - 1963

A. Peluang Perubahan

Meskipun bangsa Malaya sudah memperoleh kemerdekaan, tetapi perjuangannya belum berakhir. Masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Malaya. Belum semua daerah milik bangsa Malaya menjadi satu kesatuan. Satu hal lagi yang belum bisa dilakukan oleh bangsa Malaya adalah kemandirian secara penuh.

Bila diperhatikan dari wilayah negara Persekutuan Tanah Melayu, maka daerah jajahan Inggris di Semenanjung Malaya dan sekitarnya, belum semuanya memperoleh kemerdekaan. Pada kenyataannya, negara-negara nasional di Asia Tenggara dibentuk berdasarkan daerah administratif penjajahnya. Republik Indonesia adalah bekas wilayah jajahan Belanda, demikian juga Filipina berdasarkan bekas wilayah jajahan Spanyol. Berdasarkan fakta tersebut rakyat Malaya ingin mempersatukan Singapura, Brunei, Sabah, dan Serawak di Kalimantan Utara untuk menjadi satu negara nasional Malaysia¹.

Di samping wilayahnya belum dapat disatukan seluruhnya, Persekutuan Tanah Melayu belum mandiri

¹Ibrahim Yaacob, **Sekitar Malaya Merdeka**, (Djakarta : Kesatuan Malaya Merdeka Bagian Penerangan, 1957), hlm. 75 cf A.K. Wihar-yanto, **Peranan UMNO Dalam Kemerdekaan Malaya**, (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 1994), hlm. 31.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

74

dibidang pertahanan/keamanan, keuangan, dan politik luar negeri. Untuk semua bidang itu PTM masih bergantung dari Inggris.

Meskipun demikian proses kemerdekaan Malaya paling cepat jika dibandingkan dengan proses kemerdekaan bekas jajahan Inggris di Sri Lanka, Myanmar, India, dan Pakistan.

Sementara itu perjuangan organisasi nasional yang non-kooperasi seperti MNP dan MDU, tidak dapat menerima taraf kemerdekaan Malaya tersebut, tetapi juga tidak mampu menolaknya. Sedangkan MCP (*Malays Communist Party*) terus mengadakan gerilya.

Kaum nasionalis yang non-kooperasi tersebut meskipun tidak dapat menerima tetap menganjurkan kepada rakyat Malaya untuk menyambut hari kemerdekaan itu dengan pengertian bahwa perjuangan rakyat Malaya baru mencapai satu anak tangga kemerdekaan yang masih harus diperjuangkan lagi. Cita-cita kaum nasionalis yang sekarang sejalan dengan kehendak rakyat Malaya yaitu : menyatukan Singapura dan Kalimantan Utara ke dalam persekutuan untuk mewujudkan suatu bangsa yaitu Malaysia.

Singapura yang sebagian besar penduduknya orang-orang Cina, pada tahun 1958 akan memperoleh hak memerintah sendiri tetapi masih di bawah perlindungan Inggris.

Perpaduan antara gagasan kaum nasionalis dan UMNO



bersama pendukung-pendukungnya itulah yang merupakan cita-cita hari depan Malaya dengan di bawah bimbingan Inggris. Dengan demikian perjuangan Malaya selanjutnya difokuskan pada pembentukan Malaysia yang meliputi : Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara yang pro Inggris dan anti komunis.

Peluang untuk membentuk negara Malaya juga datang dari sikap Inggris yang sedikit lunak terhadap jajahannya. Kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 merupakan awal dari perjuangan baru. Karena itu di dalam tubuh PTM terdapat bermacam-macam keinginan untuk mewujudkan masa depan Malaya. Ada kelompok yang ingin bergabung dengan Indonesia ; ada yang ingin menjadikan Malaya menjadi negara komunis ; dan ada kelompok yang ingin merdeka sepenuhnya bebas dari campur tangan Inggris.

Menghadapi bermacam-macam keinginan ini, Inggris memutuskan menyetujui rencana Federasi Malaysia yang diajukan oleh Tengku Abdul Rahman, selaku Perdana Menteri Malaya dan sekaligus ketua UMNO pada bulan Oktober 1961. Federasi diharapkan dapat dibentuk dan terdiri dari Malaya, Singapura, dan jajahan Inggris di Kalimantan Utara (Sabah, Serawak, Brunei). Selain itu Inggris sedang berusaha melepaskan Singapura dari ancaman komunis. Pada sayap itu sayap kiri PAP (*Peoples Action Party*) yang dikuasai komunis sangat berpengaruh sekali. Inggris khawatir kalau hal tersebut dibiarkan

berlarut Singapura akan menjadi semacam Kuba bagi Malaya. Di sisi lain, Inggris juga merasa yakin dengan menyetujui rencana tersebut, ia dapat tetap berperan di dalam negara baru itu nantinya².

Federasi dirasakan sangat perlu oleh Malaya selain mewujudkan cita-cita awal, juga dalam rangka mengatasi masalah-masalah internal, terutama masalah kependudukan yang tidak seimbang dan masalah ekonomi. Pertimbangan-pertimbangan etnis tentang keseimbangan suku Melayu dan Cina sejak dahulu sangat dominan dalam kerangka pemikiran kenegaraan dan kebangsaan. Hal inilah yang menjadi penyebab ditolaknya keinginan dari Singapura untuk bergabung dengan PTM pada tahun 1957³.

Tanpa Federasi Malaysia, imbang penduduk Melayu, Cina dan India sebagai etnis yang dominan di Semenanjung adalah : 3.620.000 : 2.670.000 : 942.000 orang, sedangkan dengan penggabungan Malaya, Singapura, Sera-

²Nazaruddin Sjamsuddin (ed), **Sukarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek**, (Jakarta : Rajawali Press, 1988), hlm. 90 cf Oei Tjoe Tat, **Memoar Oei Tjoe Tat**, (Jakarta : Hasta, 1995), hlm. 142 cf Hidayat Mukmin, **TNI Dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia**, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 87 cf Amat Johari Moain, **Sejarah Nasionalisme Maphilindo**, (Kuala Lumpur : Utusan Melayu Berhad, 1969), hlm. 246 cf S. Husin Ali, **Rakyat Melayu Nasib dan Masa Depan** (terj), (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1985), hlm. 30-31 cf Tan Ding Eing, **Sejarah Malaysia dan Singapura**, (Kuala Lumpur : Fajar Bakti, 1975), hlm. 331 cf Deppen, **30 Tahun Indonesia Merdeka**, (Jakarta : PT Tira Pustaka, 1986), hlm. 23 cf R.S. Milne and Diane K. Mauzy, **Malaysia**, (London : Westview Press, 1986), hlm. 32-34.

³Hall Kosut, **Indonesia The Sukarno Years**, (New York : Fack, 1967), hlm. 84 cf Mukmin : 86.

wak, Sabah, dan Brunei, maka imbangan akan menjadi 4.707.000 : 4.302.000 : 1.178.000 orang. Walaupun Sabah dan Serawak tidak mau disebut orang Melayu, tetapi mereka bukan orang Cina dan masih serumpun dengan orang Melayu. Bila dalam hitungan persentase imbangan tersebut adalah 46,2% : 42,2% : 11,6%⁴. Sehingga komposisi penduduk Melayu tetap lebih unggul.

Dilihat dari segi keuntungan *ekonomi*, Malaya yang hanya kaya dengan karet, timah, dan kelapa sawit, dalam Federasi nanti dinarapkan akan bertambah kuat ekonominya dengan dukungan posisi Singapura sebagai pusat perdagangan, industri, dan jasa, serta Brunei yang kaya minyak buminya. Kerjasama ekonomi di antara negeri-negeri di Kalimantan Utara, Singapura, dan Malaya sendiri dengan pemerintah pusat di Kuala Lumpur akan membentuk sebuah Malaysia negara yang paling maju dari segi ekonomi di seluruh Asia Tenggara.

Dari segi *eksternal* terutama dari segi pertahanan keamanan, penggabungan daerah-daerah tersebut dalam suatu Federasi akan menyederhanakan sistem pertahanan keamanan, karena Federasi dapat dikelola bersama sebagai suatu unit strategis. Federasi akan tetap berada dalam lingkungan persemakmuran Inggris, dan Inggris akan tetap memberikan perlindungan militer kepada Federasi. Baik dalam menanggulangi ancaman komunis

⁴Mukmin : 86 - 87 cf Sjamsuddin : 91.

maupun ancaman lain.

Dilihat dari segi *politik*, yakni kekhawatiran Tengku Abdul Rahman kalau-kalau Singapura akan menjadi negara komunis, dan jika Singapura mencapai kemerdekaan dalam keadaan demikian maka tentulah akan membahayakan kedudukan Malaysia⁵.

B. Proses Perubahan dari PTM Menjadi Federasi Malaysia

Dalam tahun 1959, setelah diadakan pemilihan umum raya persekutuan dan negeri (untuk memilih parlemen federal dan wakil badan legislatif negara) untuk pertama kalinya di dalam negara PTM yang merdeka. Pemilu ini bertujuan melanjutkan pemerintahan berdemokrasi yang dipraktekkan oleh negara PTM. Sekali lagi persekutuan (UMNO-MCA-MIC) itu membuktikan pengaruhnya walaupun popularitasnya jelas mulai menurun. Pada tahun 1955, partai persekutuan mencapai 79,6% dari keseluruhan jumlah suara. Sedangkan pada tahun 1959 menurun menjadi 51,5%. Dua partai oposisi muncul dengan jumlah suara yang lumayan pada pemilu ini. Partai-partai itu adalah *Pan Malayan Islamic Party*, (PMIP) yang memperoleh 21,2% suara serta mendapat 13 kursi di parlemen. Sedangkan *Socialist Front* (SF) memperoleh 13% dari jumlah suara dan mendapat 8 kursi di parlemen. PMIP memperoleh suara mayoritas dalam badan legislatif di negara bagian

⁵Eing : 331 cf Mukmin : 87.

Trengganu dan Kelantan, dengan demikian menentukan dikedua negara bagian tersebut. Front Sosialis menguasai Dewan Kotapraja di Penang dan Malaka⁶.

PMIP sebenarnya sebagian berasal dari Dewan Agama dalam UMNO, yang memisahkan diri pada tahun 1951. Pada permulaannya dipimpin oleh Haji Ahmad Fuad, tetapi kemudian pada tahun 1956 diambil alih oleh Burhannuddin. Setelah pergantian pimpinan itu, PMIP berkembang pesat. Landasan perjuangan partai itu adalah untuk memperjuangkan dan mendirikan suatu pemerintahan yang berbentuk Islam. Partai ini menuduh UMNO menjual orang-orang Melayu dan dikontrakkan pada MCA melalui persekutuan. Seruan keras dari PMIP mendapat dukungan dari orang-orang terutama di daerah-daerah yang perekonomiannya masih tradisional. Sementara itu kedudukan Islam sangat kuat di negara bagian Kelantan, Kedah, dan Perlis.

Front Sosialis didirikan pada tahun 1957 yang dibentuk dari *Partai Rakyat Melayu* (PRM) dan *Partai Buruh Melayu* (PBM). Front Sosialis dipimpin oleh A. Boestaman dan kemudian digantikan oleh Ishak Haji Mohammad. Dukungan untuk PBM diperoleh dari orang-orang Cina perkotaan, sedangkan PRM hanya mendapat dukungan terbatas dari orang-orang Melayu. Sejak semula Front Sosialis berjuang berdasarkan prinsip sosial dan per-

⁶Ali : 28 - 31 cf Milne and Mauzy : 31 - 32 cf Moain : 243 - 245.

satuan rakyat kelas bawah, dan memperjuangkan kepentingan rakyat jelata yang merupakan mayoritas jumlah penduduk yang ada⁷.

Setelah kemenangannya pada tahun 1959, partai persekutuan (UMNO-MCA-MIC) membentuk pemerintahan dengan memilih kembali Tengku Abdul Rahman sebagai perdana menteri. Dua tahun setelah menduduki kembali jabatannya sebagai perdana menteri, Tengku Abdul Rahman mematangkan rencananya mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Rencana ini diumumkan secara resmi pada tanggal 27 Mei 1961, dan dalam lawatannya ke Singapura. Tengku Abdul Rahman menekankan bahwa PTM tidak boleh berdiri sendiri. Satu ikatan antara daerah-daerah bekas jajahan Inggris di Semenanjung dan sekitarnya harus dibentuk, dengan menyatukan dalam bidang politik dan ekonomi.

Rencana Tengku Abdul Rahman mendapat tanggapan yang beraneka ragam dari rakyat PTM, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei. Singapura menyetujui karena pada saat itu sedang menghadapi masalah dalam negeri yang cukup berat dan sulit diatasi yaitu masalah komunis. Dengan bergabung di dalam Federasi Malaysia maka kesulitan ini menurut Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura dapat diatasi bersama di samping masalah ekonomi. Rakyat Kalimantan Utara juga menyambut baik

⁷Ali : 30.

rencana itu, termasuk Brunei awalnya, karena mereka sangat menghendaki kemerdekaan. Hal ini dapat diperoleh dengan bergabung di dalam Federasi⁸.

Tindakan selanjutnya yaitu membentuk suatu badan yang diberi nama Malaysia Solidarity Consultative Committee pada bulan Juli 1961 di Singapura. Badan ini mewakili wakil-wakil dari Singapura, Serawak, Sabah, Brunei, dan PTM sendiri.

Untuk mencegah terjadinya konflik, pada tahun 1961 Tengku Abdul Rahman berkunjung ke Filipina guna menghilangkan kesalahpahaman mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia. Hasilnya ialah akan dibentuk komite bersama yang mengusulkan diadakannya suatu pertemuan tiga negara (PTM, Indonesia, dan Filipina) guna memecahkan masalah-masalah yang ada, sehingga tercapai suatu hubungan yang harmonis dan terjalin kerjasama yang baik⁹. Langkah selanjutnya ialah membicarakan rencana pembentukan Malaysia ini dengan pemerintah Inggris di London pada bulan Oktober 1961.

Pembicaraan antare Tengku Abdul RAhman dan Perdana Menteri Inggris Mc Millan ini membuahkan hasil dan diputuskan dalam tiga hal pokok. Pertama, Inggris dan Malaya menyetujui penggabungan (merger) Singapura dan

⁸Moain : 246 cf Milne dan Mauzy : 33 - 34 cf Sjamsuddin : 90.

⁹A.K. Wiharyanto, **Reaksi Terhadap Pembentukan Federasi Malaysia**, (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 1994), hlm. 41 cf Moain : 248.

Malaya. Kedua, Inggris dan Malaya akan mengadakan penyelidikan yang mendalam tentang pembentukan Federasi Malaysia. Untuk keperluan ini akan dibentuk sebuah komisi. Ketiga, persetujuan pertahanan antara Inggris dan Malaya akan diperluas meliputi seluruh daerah Federasi Malaysia¹⁰.

Sebagai tindak lanjut keputusan kedua, dibentuk Komisi Cobbold, dengan tugas meneliti kemungkinan pembentukan Federasi. Komisi ini diketuai oleh Lord Cobbold dan beranggotakan Sir Anthony Abell, Sir David Watherston, Dato Wong Po Noe, dan Enche Gazali Shafie.

Dari hasil penjajagan yang dimuat dalam *Report of The Commission of Inquiry North Borneo and Serawak* tahun 1962 diketahui adanya suara pro dan kontra terhadap pembentukan Federasi. Laporan ini menyebutkan bahwa sepertiga penduduk menyetujui tanpa syarat, sepertiga lain dengan syarat agar kepentingan daerah terjamin dan sepertiga lain terbagi dua suara. Sebagian ingin tetap terus di bawah pemerintahan Inggris, dan sepertiga lain ingin memperoleh kemerdekaan terlebih dahulu sebelum bergabung dalam Federasi.

Keputusan-keputusan lain yang dihasilkan oleh komisi Cobbold ialah perlunya suatu masa peralihan antara satu sampai sepuluh tahun. Wakil Malaya menghendaki satu tahun. Kepala Federasi akan ditunjuk oleh

¹⁰Mukmin : 87 - 88.

Yang Dipertuan Agong dengan persetujuan Ratu Inggris. Kepala negara akan dipilih di antara sultan-sultan Malaya dan Brunei. Islam menjadi agama negara, dengan jaminan kebebasan agama bagi pemeluk-pemeluk agama lain dan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional¹¹.

Pembentukan Federasi Malaysia walaupun pada umumnya memperoleh dukungan yang cukup besar dari daerah-daerah bersangkutan, bukanlah tanpa hambatan.

Terdapat banyak partai politik yang menentang pembentukan Federasi baik di Malaya sendiri maupun di Singapura dan Kalimantan Inggris (*British North Borneo*). Di Malaya, *Front Sosialis*, *Partai Islam se-Malaya* (PAS) termasuk yang menentang. Di Singapura, *Barisan Sosialis Singapura*, *Partai Pekerja* dan *Partai Rakyat Singapura* juga menentang. Sedangkan di Kalimantan Utara, *Partai Rakyat Brunei* di Brunei dan *Serawak United Peoples Party* di Serawak termasuk partai-partai yang tidak setuju terhadap pembentukan Federasi¹².

Setahun kemudian barulah ada tentangan keras terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia. Diawali dengan pecahnya pemberontakan di Brunei pada tanggal 8 Desember 1962 yang diprakarsai oleh *Tentara Nasional Kalimantan Utara* (TNKU) pimpinan Azahari. Pada tanggal

¹¹Eing : 331 - 332 cf Moain : 247 cf Mukmin : 86 cf Manai Sophiaan, **Kehormatan Bagi Yang Berhak**, (Jakarta : Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994), hlm. 31 - 32.

¹²Milne and Mauzy : 31 - 32 cf Mukmin : 88.

yang sama TNKU memproklamasikan kemerdekaan Brunei. Setelah pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Inggris, secara tiba-tiba pada permulaan tahun 1963, Sultan Brunei Sir Omar Saifuddin, menolak untuk bergabung ke dalam Federasi. Sikap tegas Brunei didukung oleh Indonesia, dengan menolak secara resmi pembentukan Federasi Malaysia pada tanggal 8 Januari 1963. Setelah sebelumnya diawali dengan ketegangan hubungan diplomatik Jakarta-Kuala Lumpur¹³.

Untuk mengatasi ketegangan ini, Filipina membawa Malaya dan Indonesia ke meja perundingan. Inisiatif ini diterima dengan baik oleh Malaya maupun Indonesia dengan menghadiri Konferensi Tingkat Wakil-wakil Menteri Luar Negeri yang diadakan di Manila dari tanggal 9 - 17 April 1963. Pertemuan ini merupakan persiapan untuk mengadakan Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri yang direncanakan akan berlangsung pada bulan Juni mendatang.

Jepang melihat bahwa proses pembentukan Federasi Malaysia sudah menjurus pada kecurigaan Indonesia sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris. Maka pada

¹³Mukmin : 88 cf Wiharyanto : 20 cf Brian Harisson, **Sejarah Asia Tenggara**, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, 1966), hlm. 291 cf A.H. Nasution, **Memenuhi Panggilan Tugas** jilid VI, (Jakarta : PT Gunung Agung , 1987), hlm. 13 cf H. Rosihan Anwar, **Sebelum Prahara**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1981), hlm. 295 cf Michael Leifer, **Politik Luar Negeri Indonesia**, (Jakarta : Gramedia, 1986), hlm. 128 cf John D. Legge, **Sukarno, Sebuah Biografi Politik**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1985), hlm. 416 cf Deppen, 30 Tahun.... : 234 cf Oei Tjoe Tat : 142.

tanggal 31 Mei - 1 Juni 1963, Jepang menyediakan tempat pertemuan di Tokyo antara Presiden Sukarno dengan Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman, untuk mengadakan pendekatan. Tujuannya ialah untuk menghilangkan kecurigaan-kecurigaan di antara kedua belah pihak. Pertemuan ini berhasil meredakan ketegangan antara kedua negara tersebut untuk sementara waktu. Pertemuan Tokyo menyepakati sebuah prinsip yaitu : tetap memelihara semangat persahabatan Indonesia-Malaya yang ditandatangani pada tahun 1959¹⁴.

Keterlibatan Jepang dalam masalah pembentukan Federasi Malaysia, dengan menyediakan Tokyo sebagai tempat perundingan merupakan keterlibatan pertama yang berdampak positif. Sebelumnya, Jepang lama absen dalam percaturan politik di Asia Tenggara setelah berakhirnya perang Pasifik.

Untuk merumuskan lebih lanjut hasil pertemuan Tokyo diadakan lagi perundingan para menteri luar negeri ketiga negara : Malaya (PTM), Indonesia, dan Filipina di Manila, dari tanggal 7 sampai 11 Juni 1963 sesuai rencana semula.

Dalam pertemuan ini diperoleh kejelasan sikap politik Indonesia dan Filipina. Kedua negara ini tidak keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia, asal hal

¹⁴Sophiaan : 28 cf Depdikbud, **Sejarah Nasional Indonesia** jilid VI, (Jakarta : Balai Pustaka, 1977), hlm. 355 cf Deppen : 234 cf Mukmin : 294 cf Legge : 420 cf Wiharyanto : 80.

itu dilakukan atas dasar *hak penentuan nasib sendiri* bagi rakyat di wilayah-wilayah yang hendak digabungkan, dan ditentukan oleh otoritas yang bebas dan tidak memihak, yaitu Sekretaris Jenderal PBB atau pejabat yang mewakilinya¹⁵.

Sementara suasana hampir mereda, pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman berangkat ke London. Tujuannya untuk menandatangani dokumen persetujuan dengan pemerintah Inggris mengenai pembentukan Federasi Malaysia, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1963. Tindakan ini menimbulkan ketegangan baru.

Meskipun demikian Konferensi Tingkat Tinggi ketiga negara tersebut berlangsung juga pada bulan Juli sampai Agustus 1963 di Manila. KTT tersebut menghasilkan tiga keputusan : **Deklarasi Manila**(Maphilindo), **Persetujuan Manila** dan **Komunike Bersama**. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia ketiga negara sepakat untuk meminta Sekretaris Jenderal PBB agar menyelidiki keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi. PTM sendiri memutuskan menunda proklamasi Federasi Malaysia sampai tim PBB mengumumkan hasilnya. Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan

¹⁵Masashi Nishihara, *Peran Penengah Jepang Dalam Konfrontasi 1963 - 1966*, dalam Ichimura dan Koentjaraningrat, **Indonesia Masalah dan Peristiwa**, (Jakarta : Gramedia, 1976), hlm. 64 - 65 cf Leifer : 126 cf Legge : 420 - 421 cf Nasution : 19 cf Mukmin : 86 cf Deppen : 234 cf Kosut : 85.

negara Malaysia, bilamana dikehendaki rakyat yang bersangkutan.

Sesuai dengan hasil KTT Manila, Sekretaris Jenderal PBB, **U Thant** membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh **Michelmores** (seorang diplomat Amerika Serikat). Tim ini bertugas untuk mengadakan penyelidikan di Serawak dan Sabah, guna memastikan kehendak rakyat di kedua daerah itu mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Misi ini mulai bekerja pada tanggal 26 Agustus 1963¹⁶.

C. Kemerdekaan Federasi Malaysia

1. Proses kemerdekaan

Atas kesepakatan antara pemerintah Inggris dengan PTM, maka pada tanggal 29 Agustus 1963, Kuala Lumpur mengumumkan penundaan pembentukan Federasi Malaysia dari tanggal 31 Agustus 1963 menjadi 16 September 1963, sebelum misi PBB selesai dengan tugasnya. Hal ini menurut Indonesia dan Filipina telah menyimpang dari kesepakatan semula dan memalukan dunia. Kemudian pada tanggal 3 September 1963, Indonesia mengajukan protes resmi kepada PTM.

Hasil misi U Thant yang diumumkan pada tanggal 14 September 1963 pada dasarnya menguntungkan Kuala

¹⁶Depdikbud : 357 cf Deppen : 235 cf Kosut : 85 cf M.C. Ricklefs, **Sejarah Indonesia Modern**, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 414 cf Wiharyanto : 50 cf Mukmin : 95 cf Legge : 442 cf Eing : 332.

Lumpur. Hasil misi tersebut menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Sabah dan Serawak menyetujui bergabung dalam Federasi. Baik Indonesia maupun Filipina tidak dapat menerima hasil dari misi PBB itu karena beranggapan karena prosedurnya tidak sah. Hal ini tidak dapat mengubah kondisi yang memang sudah terlebih dulu diantisipasi oleh PTM.

Federasi tetap dibentuk pada tanggal 16 September 1963. Segera timbul reaksi keras dari Filipina dan Indonesia, yang menuduh Tengku Abdul Rahman telah menyimpang dari KTT Manila. Kedua negara tersebut menyatakan pula untuk tidak mengakui Federasi, sampai tim PBB mengoreksi survei bulan Agustus di Sabah dan Serawak untuk menentukan apakah kedua teritori ini ingin bergabung dalam federasi atau tidak. Menteri Luar Negeri Filipina mengumumkan bahwa status Kedutaan Besar Malaya (PTM) di Manila akan kembali menjadi konsulat, sampai Filipina mengakui Federasi. Duta Besar Filipina di Kuala Lumpur dan Jakarta ditarik.

Sehari setelah pernyataan berdirinya Negara Federasi Malaysia, maka pada tanggal 17 September 1963, Malaysia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia dan Filipina. Tengku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri mengatakan bahwa Malaysia tidak punya pilihan lain. Karena, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia tanpa alasan

yang jelas, juga permohonan Manila untuk mengurangi staf kedutaannya di Kuala Lumpur tidak diterima. Konfrontasi dengan Indonesia dan Filipina terus berlanjut sampai tahun 1965¹⁷.

2. Sistem Politik dan Pemerintahan

Federasi Malaysia meliputi 4 teritori yaitu : *Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah*. Pusat pemerintahan ada di Kuala Lumpur. Parlemen Malaya kemudian diperluas untuk dapat mencapai perwakilan dari ketiga teritori tersebut. Meskipun keempat teritori tersebut sudah memerdekakan diri, tetapi basis militer Inggris tetap berada di Singapura dan Malaya. Basis militer ini diikat oleh perjanjian untuk mempertahankan Malaysia, seperti halnya Australia dan Selandia Baru. Perdana Menteri PTM, Tengku Abdul Rahman, secara otomatis menjadi PM Malaysia dan dilantik di Kuala Lumpur¹⁸. Perubahan bentuk dari PTM menjadi Federasi Malaysia, tidak banyak mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan tetap **monarkhi konstitusional**, yang diperintah oleh seorang raja dengan gelar Yang Dipertuan Agong. Raja dipilih dari salah seorang raja-raja

¹⁷Deppen : 235 cf Mukmin : 95 - 96 cf Moain : 250 cf Depdikbud : 357 cf Wiharyanto : 50 cf Ricklefs : 414 cf Legge : 422 - 423 cf Kosut : 86 cf Sophian : 33 - 34 cf Eing : 332.

¹⁸Kosut : 86 - 87.

.f#19

Melayu oleh sembilan raja itu sendiri secara bergantian setiap lima tahun sekali. Anggota dewan tetap dipilih oleh rakyat. Raja bertindak atas pertimbangan perdana menteri dan kabinet melantik hakim-hakim untuk Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi, dan menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Malaysia. Raja juga bertanggung jawab untuk memelihara kedudukan istimewa orang-orang Melayu, bumiputera Serawak, dan Sabah serta hak-hak kepentingan masyarakat lainnya¹.

Mengenai pembagian kekuasaan, tiap negara bagian dibagi atas distrik-distrik yang diketuai oleh seorang *District Officer*. Setiap distrik dibagi lagi atas Mukmin, yang diketuai oleh Penghulu. Dan tiap Mukmin terdiri dari kampung-kampung yang diketuai oleh seorang Kepala Kampung.

Pemerintah di kedua negara bagian Sabah dan Serawak masing-masing dilakukan oleh kabinet yang dikepalai oleh Ketua Menteri dibantu dengan para menteri negara bagian masing-masing.

Negara bagian Sabah dibagi menjadi 4 residensi yang masing-masing dibagi lagi menjadi daerah-daerah. Serawak dibagi menjadi 5 division, di mana tiap division dikepalai oleh seorang Pentabir

¹⁹Sekretariat Nasional ASEAN Deplu RI, **ASEAN Selayang Pandang**, (Jakarta : Sekretariat Nasional ASEAN ,1986), hlm. 160.

(administrator)²⁰.

Parlemen

Parlemen terdiri atas dua badan yaitu : Dewan Negara (State) dan Dewan Rakyat (House of Representative)²¹.

Dewan Negara

Beranggotakan 68 orang : 40 orang diangkat oleh Yang Dipertuan Agong : 28 dipilih oleh Dewan-dewan Undangan Negeri ketigabelas negara bagian (masing-masing diwakili oleh 2 orang). Dua orang diangkat Yang Dipertuan Agong dari wilayah persekutuan (Kuala Lumpur). Dewan Negara dipimpin oleh seorang Yang Dipertuan Dewan Negara dan wakilnya, yang dipilih oleh Dewan Negara dari anggota-anggotanya.

Dewan Rakyat

Dewan Rakyat beranggotakan 170 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 132 orang wakil Semenanjung Malaya, 21 orang dari Sabah, dan 24 orang dari Serawak. Anggota dewan dipilih secara langsung oleh warga negara Malaysia yang sudah berumur 21 tahun dari masing-masing daerah pemilihan (*constituency*).

²⁰Sekretariat Nasional ASEAN : 160.

²¹Sekretariat Nasional ASEAN : 160 - 161.

Dewan Rakyat diketuai Oleh Yang Dipertuan Dewan Rakyat. Ketua tersebut dipilih diantara anggota dewan rakyat atau orang luar yang mempunyai hak pilih. Dan dibantu oleh wakil yang dipilih dari anggota-anggotanya.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

REAKSI INDONESIA TERHADAP PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA

A. Latar Belakang Umum

Sewaktu Persekutuan Tanah Melayu (PTM) diproklamasikan pada tanggal 31 Agustus 1957, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei belum ikut merdeka. Hal ini dianggap aneh, sebab berdasarkan kenyataan yang terjadi di Asia Tenggara, hampir semua negara merdeka dibentuk berdasarkan daerah administrasi penjajahnya. Seperti wilayah Indonesia, misalnya, mencakup bekas wilayah jajahan Belanda. Demikian pula di Filipina juga dibentuk sesuai dengan daerah administratif penjajah Spanyol. Melihat kenyataan ini di berbagai negara tetangga itu, maka PTM atau disebut juga Malaya akhirnya ingin mempersatukan Singapura, Brunei, Sabah, dan Serawak di Kalimantan Utara untuk menjadi satu negara nasional baru yang akan disebut Malaysia¹.

Walaupun PTM telah memproklamasikan dirinya, tetapi di satu sisi belum dapat dikatakan mandiri pertahanan-keamanan, keuangan, dan luar negeri masih mengandalkan kerja sama dengan Inggris².

¹Ibrahim Yaacob, **Sekitar Malaya Merdeka**, (Jakarta : Kesatuan Malaya Merdeka, 1957), hlm. 75.

²D.G.E. Hall, **Sejarah Asia Tenggara**, (Surabaya : Usaha Nasional, 1970), hlm. 86.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia setelah ditinggalkan oleh Belanda. Perbedaan ini disebabkan oleh sistem politik antara Belanda dan Inggris yang bertolak belakang terhadap tanah jajahannya. Menurut *Davied Joel* dan *J.M. Pluvier*, dua orang ahli sejarah tentang Asia Tenggara, Inggris tidak menyebut dirinya sebagai penjajah, tetapi sebagai *pelindung*³. Hal ini dapat terlihat dalam penguasaan suatu wilayah, mereka hampir tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, tetapi dilakukan secara damai terlebih dahulu. melalui perjanjian⁴. Inggris kemudian melakukan pembinaan emansipasi politik terhadap daerah jajahannya. Akibatnya, ketika Inggris pergi, di bekas jajahan itu tidak terjadi kegoncangan politik yang menyolok. Sebab mereka tinggal meneruskan sistem politik Inggris yang sudah mereka peroleh sebelumnya.

Sebaliknya Belanda telah menjadikan kawasan jajahannya sebagai sumber energi yang patut dikuras habis-habisan. Belanda dapat dikatakan tidak pernah melakukan emansipasi politik di Indonesia. Politik Ethika, sama sekali tidak ada kaitannya dengan emansipasi politik.

Di Hindia Belanda (Indonesia), terhadap politik

³*Suara Pembaharuan*, 5 Juli 1987.

⁴Lihat pada penguasaan Pulau Penang, Province Wellesley, Singapura dan lain-lain. Sejak awal mereka lebih mengutamakan penguasaan sektor-sektor ekonomi sebagai pendukung Revolusi Industri, yang dimulai pada pertengahan abad XVIII.

Liberal yang kurang memperhatikan kesejahteraan pribumi dilemparkan banyak kritik, terutama berkisar pada persoalan kemunduran-kemunduran kesejahteraan pribumi pada akhir abad ke 19. Di antara kritikan-kritikan itu yang terpenting berasal berasal dari C.H. van Deventer yang termuat dalam majalah *de Gids* pada tahun 1899. Karangan yang memuat kritikan itu berjudul **Een Eereshuid** (Debt of Honour atau Suatu Hutang Budi). Dalam karangannya itu antara lain diketemukan bahwa kemakmuran negeri Belanda diperoleh karena kerja dan jasa orang Indonesia, karena itu Belanda berhutang budi kepada Bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang maju dan bermoral, Belanda harus membayar utang itu dengan menyelenggarakan Trias : irigasi, emigrasi (transmigrasi), dan edukasi⁵.

Pemerintahan Belanda menanggapi kritik ini dengan mengemukakan gagasan pembaharuan dalam pidato Ratu Wilhelmina pada tahun 1901, yang berjudul *Ethische Richting* atau *Nieuw Keurs* (Haluan Baru). Tetapi, pelaksanaan dari politik baru ini oleh pemerintahan tidak terlepas dari kepentingan kolonialnya. Karena itu politik baru, politik Kolonial Ethika ini, sering mendapat ejekan sebagai politik sarung tangan sutera,

⁵G. Moedjanto, **Indonesia Abad Ke-20** jilid 1, (Yogyakarta : Kanisius, 1988), hlm. 21 cf R. Niuwenhuys, *Melalui Cermin Seni Sastra* dalam H. Baudet dan I.J. Brugnans, **Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan**, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 18 - 19.

tetapi kalau tangan yang disarungi itu digunakan untuk mencekik hasilnya sama saja⁶.

Kadang-kadang politik kolonial Ethika itu sering disebut politik paternalistik, yaitu politik pemerintah yang ingin mengurus kepentingan anak negeri tanpa mengikutsertakan anak negeri. Kaum moralis liberal menanggapinya dengan menyebut politik kolonial Ethika sebagai kewajiban bangsa yang maju terhadap bangsa yang terbelakang. Bagi bangsa jajahan itu, hanyalah dalih bagi bangsa penjajah untuk melegalisasikan (mengesakan/membenarkan) penjajahan mereka⁷.

slogan dari pada kenyataan. Tiada itikad baik dan keikhlasan dalam pelaksanaannya. Mereka berbuat demikian karena takut kritik kalau-kalau politik membiarkan penderitaan pribumi terus menerus akan mendorong timbulnya perlawanan rakyat secara meluas dan terus menerus. Nampaknya memang rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang lebih baik. tetapi tujuan politik kolonial Ethika sama saja dengan politik-politik yang mendahuluinya, yaitu eksploitasi kekayaan Indonesia bagi penjajah. Dengan politik itu rakyat Indonesia hendak *dininabobokan*.

Namun politik itu tidak berhasil, karena berbagai

⁶Moedjanto : 21.

⁷Moedjanto : 22 - 23 cf W.H. van Helsdingen, *Perkembangan Ketatanegaraan* dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans, **Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan**, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 215 - 216.

faktor. Di kalangan pemerintahan dan masyarakat Belanda terdapat golongan yang menentang karena mereka tetap menganggap bangsa Belanda superior. Mereka khawatir kemajuan rakyat Indonesia akan membahayakan kelangsungan ikatan Indonesia-Netherland.

Sehingga memang perlu diakui bahwa pembentukan PTM bila dibandingkan dengan pembentukan Indonesia, Pakistan, India, dan Sri Lanka, prosesnya paling cepat.

Sebelum rencana pembentukan Malaysia diungkapkan Tengku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri PTM melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu terhadap Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei. Hasilnya sebagian besar setuju dengan rencana itu. Atas berbagai pertimbangan maka rencana itu semakin dipercepat. Pada bulan Oktober Tengku Abdul Rahman beserta rombongan berangkat ke London untuk menetapkan rencana pembentukan Malaysia dengan pemerintahan Inggris.

Pembicaraan Tengku Abdul Rahman dan Perdana Menteri Inggris McMillan ini membuahkan hasil. Dimana Inggris menyatakan kesediaannya untuk membidani kelahiran negara baru tersebut. Mereka segera membentuk panitia yang diketuai oleh Lord Cobbold, dengan tugas menjajagi. Dari hasil penjajagan diketahui adanya suara pro dan kontra terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Disebutkan sepertiga penduduk menyetujui tanpa syarat. Sepertiga lain menyetujui dengan syarat agar kepentingan daerah terjamin. Sedangkan sepertiga lainnya

terbagi menjadi dua, sebagian ingin terus di bawah pemerintahan Inggris, dan sebagian ingin memperoleh kemerdekaan terlebih dahulu sebelum bergabung dalam federasi.

Keputusan-keputusan lain yang penting ialah perlunya suatu masa peralihan antara satu sampai sepuluh tahun. Wakil PTM menuntut satu tahun. Kepala Federasi Malaysia akan ditunjuk oleh Yang Dipertuan Agong dengan persetujuan Ratu Inggris. Kepala negara akan dipilih di antara sultan-sultan Malaysia dan Brunei. Bahasa Melayu akan menjadi bahasa nasional, tetapi bahasa Inggris tetap dipergunakan⁸.

Partai-partai politik yang menentang pembentukan Federasi Malaysia terdapat di Malaya, Singapura, dan Kalimantan Inggris (British North Borneo). Di Malaya, *Front Sosialis* yang terdiri dari *Partai Ra'ayat Malaya*, *Partai Buruh*, dan *Partai Islam Se-Malaya* (PAS), termasuk golongan yang menentang. *Barisan Sosialis Singapura*, *Partai Pekerja*, dan *Partai Ra'ayat Singapura* termasuk golongan kontra. Sedangkan di Kalimantan

⁸Amat Johari Moain, **Sejarah Nasionalisme Maphilindo**, (Kuala Lumpur : Utusan Melayu Berhad, 1969), hlm. 247 cf Tan Ding Eing, **Sejarah Malaysia dan Singapura**, (Kuala Lumpur : Fajar Bakti, 1975), hlm. 331 - 332 cf Hidayat Mukmin, **TNI Dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1991), hlm. 86 cf Manai Sophiaan, **Kehormatan Bagi Yang Berhak**, (Jakarta : Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994), hlm. 31 - 32.

United People's Party juga menentang⁹. Selain mendapat tantangan dari Brunei dan Singapura, pembentukan Federasi juga mendapat tantangan yang keras dari Indonesia dan Filipina. Dari semua pihak yang menentang, Indonesia merupakan pihak yang paling keras dan tidak setuju dengan rencana itu¹⁰.

Indonesia menentang karena menurut Sukarno, Federasi Malaysia adalah gagasan Inggris untuk mempertahankan kedudukannya di Asia Tenggara dan bukan gagasan dari rakyat Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah. Inggris dianggap sebagai negara kolonialis dan imperialis baru (neokolonialisme), yang akan mengepung Indonesia dari utara.

B. Reaksi Awal Indonesia 1960 - 1961

Belanda pernah menaksakan penerapan struktur federal di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan keunggulan Republik dan berada di bawah pengaruh Belanda. Oleh karena itu, ketika mendengar gagasan pembentukan Federasi Malaysia, pihak Indonesia curiga kepada Malaysia karena bentuk konstitusi dan lingkungan

⁹A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas* jilid VI, (Jakarta : PT Gunung Agung, 1987), hlm. 11.

¹⁰Moain : 88 cf Mukmin : 247 - 248.



asing kepadanya¹¹.

Sejak berdirinya PTM, hubungan Indonesia dengan negara baru di Semenanjung Malaya itu memang tidak dapat dikatakan baik. Hubungan diplomatik yang hangat hanya dapat dipertahankan lebih kurang enam bulan pertama sejak kemerdekaan PTM.

Kekecewaan Indonesia terhadap PTM sudah timbul sebelum negara itu memerdekakan diri. Kekecewaan ini diawali oleh simpati Malaya dan koloni-koloni Inggris tetangganya terhadap tujuan pemberontakan PRRI-Permesta di Indonesia akhir tahun 1950-an. Hal ini tampak jelas dari perlindungan yang diberikan kepada tokoh-tokoh pemberontak yang melarikan diri ke Singapura dan Malaya¹². Selain itu ditambah dengan sikap abstain Malaya terhadap pemungutan suara di PBB mengenai persoalan Irian Barat pada tahun 1957.

Di samping itu, kurang akrabnya hubungan PTM dengan Indonesia juga ditimbulkan oleh perbedaan pandangan di antara kedua negara rumpun Melayu tersebut mengenai keamanan regional. PTM menganggap komunis sebagai ancaman utama ; sedangkan Indonesia menganggap kolonialis sebagai ancaman utama.

¹¹Michael Leifer, **Politik Luar Negeri Indonesia**, (Jakarta : PT Gramedia, 1986), hlm. 111 cf A.K. Wiharyanto, **Reaksi Terhadap Pembentukan Federasi Malaysia**, (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 1994), hlm. 45.

¹²H. Roeslan Abdulgani, **Indonesia Menatap Masa Depan**, (Jakarta : Pustaka Merdeka, 1987), hlm. 354.

Satu upaya saling mendekati terjadi pada bulan April 1959, dua tahun setelah PTM merdeka. Kedua kepala pemerintahan menyepakati suatu perjanjian persahabatan yang untuk Indonesia ditandatangani oleh PM Juanda dan bukan oleh Presiden Sukarno. Antara kedua kepala negara terdapat perbedaan latar belakang, pengalaman, dan kepribadian yang besar. Ternyata perbedaan itu merupakan penghalang untuk membina hubungan baik dalam suatu kawasan yang menganggap penting ikatan pribadi.

Ketika Tengku Abdul Rahman mengumumkan rencananya untuk pertama kali tentang suatu bentuk federasi yang meliputi Malaya, Singapura, dan daerah-daerah di Kalimantan Utara, bekas jajahan Inggris, Filipina menuntut haknya atas Sabah. Sedangkan reaksi awal Indonesia tidaklah terlalu menggembirakan, dengan mengatakan bahwa gagasan itu tidaklah terlalu simpatik, tetapi tidaklah terlalu mengecilkan hati. Sebaliknya gagasan itu mendapat tanggapan positif dari PM Singapura, Lee Kuan Yew¹³.

Sikap lunak Indonesia ini dikarenakan dalam rangka mencari sokongan Barat untuk membebaskan Irian Barat, dan Indonesia pada dasarnya menghargai keinginan Inggris hendak melepaskan koloninya untuk berdiri sendiri. Mengenai caranya terserah kepada Inggris dan rakyat yang bersangkutan. Hal ini dipertegas lagi di

¹³John D. Legge, **Sukarno, Sebuah Biografi Politik**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1985), hlm. 415 cf Leifer : 111.

sidang Majelis Umum PBB. Tetapi pada dasarnya anggapan tersebut tidaklah bebas sama sekali dari keberatan. Sehubungan dengan itu apa yang disampaikan tersebut hanya sekedar di permukaan saja.

Penolakan atas Malaysia dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tuntutan yang lain terhadap wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Indonesia. Pada situasi seperti ini pemerintah Indonesia tidak berani menyatakan oposisi terhadap Federasi yang diusulkan karena adanya resiko bahwa tiap konfrontasi yang terjadi akan mengundang kecurigaan pada tuntutan Indonesia atas Irian Barat.

Satu-satunya oposisi terang-terangan terhadap pembentukan Federasi Malaysia dari dalam Indonesia dikemukakan oleh Komite Sentral Partai Komunis Indonesia pada bulan Desember 1961. Federasi baru itu digambarkan sebagai *suatu konsentrasi kekuatan kolonial baru*, justru pada garis perbatasan Indonesia dan suatu intrik kolonial yang tidak dapat diterima oleh PKI yang mempunyai antipati yang wajar terhadap komunis di Asia Tenggara¹⁴.

1. Deklarasi Manila dan Awal Konfrontasi 1962 - 1963

Setelah perjanjian New York 15 Agustus 1962, yang menunjukkan keberhasilan Indonesia membebaskan

¹⁴Legge : 415 of Leifer : 111.

Irian Barat, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Subandrio yang mewakili Indonesia dan Van Rijen serta Schuurman yang mewakili Belanda, maka perhatian Indonesia terhadap gagasan pembentukan Malaysia mulai berubah¹⁵.

Reaksi Indonesia terhadap rencana pembentukan Malaysia semakin meningkat setelah pecahnya pemberontakan di Brunei 8 Desember 1962 di bawah pimpinan Atahari dengan *Partai Rakyat Brunainya*. Dengan dukungan massa yang kuat partai ini mengumumkan ketidaksetujuannya terhadap masuknya Kesultanan Brunei dalam Federasi. Dan mengajukan alternatif pembentukan suatu negara merdeka di Kalimantan Utara yang dahulu pernah menjadi wilayah kekuasaan Sultan Brunei¹⁶.

Dalam menanggapi kejadian di Brunei, Sukarno menegaskan bahwa apa yang terjadi di Kalimantan Utara tidak dapat dipisahkan dari *Nefos* (New Emerging Forces) : yaitu gerakan-gerakan dari kekuatan-kekuatan yang baru tumbuh untuk melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan yang sudah mapan (penjajah). Pernyataan ini merupakan isyarat simpatik dan dukungan terhadap pemberontakan tersebut. Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani mengajak pers untuk

¹⁵G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20* jilid 2, (Yogyakarta : Kanisius, 1988), hlm. 124.

¹⁶Legge : 416 cf Leifer : 114 - 115 cf Mukmin : 90.

memihak rakyat Kalimantan Utara yang sedang berjuang demi kemerdekaannya.

Kemudian sikap tegas PTM, ditunjukkan oleh PM Tengku Abdul Rahman dengan menuduh Indonesia memberi bantuan dalam pemberontakan tersebut. Pernyataan ini memanaskan hubungan diplomatik Jakarta-Kuala Lumpur. Karena itu Indonesia secara resmi menolak pembentukan Malaysia pada tanggal 8 Januari 1963.

Ketika itu Indonesia yakin bahwa ia ditakdirkan sebagai pihak yang harus diajak bicara dalam setiap permasalahan wilayah. Terutama bila dalam pengaturan pertahanan memberikan bekas penjajah menggunakan pangkalan terdekat yang diperlukan untuk memelihara perdamaian di Asia Tenggara.

Indera Sukarno begitu peka untuk mencium adanya bau neo-kolonialisme dalam pembentukan Malaysia. Baginya selaku seorang nasionalis, Republik Indonesia harus tetap terbesar di Asia Tenggara. Nasionalisme dalam dirinya tidak memperkenankan adanya pesaing di kawasan ini.

Untuk mencari penyelesaiannya Presiden Sukarno mengatakan bahwa *Indonesia bukan tidak mengutamakan penyelesaian secara damai, bukan tidak suka kepada perundingan, apalagi mengenai persoalan antara tetangga dengan tetangga, apalagi persoalan itu adalah persoalan anatar Bangsa Melayu dengan Bangsa Melayu sendiri*. maka harus diselesaikan oleh Bangsa

Melayu juga¹⁷.

Usaha-usaha penyelesaian secara damai pertama kali datang dari inisiatif Filipina, yang membawa Indonesia dan Malaya ke meja perundingan. Inisiatif ini diterima baik oleh Indonesia dengan menghadiri konferensi-konferensi tingkat wakil-wakil menteri luar negeri yang diadakan di Manila dari tanggal 9 - 17 April 1963. Konferensi ini membicarakan masalah rencana pembentukan federasi Malaysia, serta gagasan pembentukan satu konfederasi antara ketiga negara yang bertujuan untuk menyediakan suatu kerangka untuk mempererat kerja sama di antara mereka. Pertemuan itu merupakan persiapan untuk mengadakan konferensi tingkat menteri luar negeri yang akan diadakan dalam bulan Juni 1963 mendatang¹⁸.

Sebelum sebelum konfrontasi, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio berkunjung ke Jepang. Kesempatan ini digunakan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Ohira Mayayoshi untuk membujuk Subandrio agar mengundang PM Tengku Abdul Rahman untuk bertemu dengan Presiden Sukarno di Tokyo, dan menawarkan tempat pribadi bagi mereka untuk berunding. Jepang terlibat dalam konflik ini karena memiliki kepentingan atas proyek-proyek pembangunan minyak di

¹⁷Nasution : 16 of **Kedaulatan Rakyat**, 15 Mei 1964.

¹⁸Depdikbud, **Sejarah Nasional Indonesia** jilid VI, (Jakarta : Balai Pustaka, 1977), hlm. 354.

Sumatera Utara. Setiap adu kekuatan antara Jakarta dan Kuala Lumpur yang akan terjadi di Selat Malaka atau di perbatasan Indonesia-Malaya, di Kalimantan Utara, seandainya ini terjadi di Selat Malaka maka proyek-proyek tersebut akan menjadi sasaran utama Angkatan Bersenjata Malaysia. Dan ini tentu saja merugikan Jepang yang memiliki saham yang paling besar dalam proyek-proyek tersebut. Usulan PM Jepang ini disetujui oleh Presiden Sukarno dan PM Tengku Abdul Rahman, yang akan mengadakan pertemuan pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 1963.

Pertemuan pertama sejak sengketa diumumkan ini berjalan dengan lancar. Mereka sepakat untuk mematuhi Perjanjian Persahabatan yang ditandatangani pada tahun 1959, dan berusaha menempuh penyelesaian secara damai. Di samping itu kedua tokoh penting ini memutuskan bahwa Konfrontasi Tingkat Menteri Luar Negeri akan diselenggarakan di Manila pada bulan Juni, seperti kesepakatan semula.

Hal ini mencerminkan kesediaan pemerintah PTM untuk berkompromi atas setiap hal yang prinsipiel terhadap pembentukan Federasi.

Segera setelah pertemuan puncak antara Sukarno dan Tengku Abdul Rahman itu, perundingan para menteri luar negeri berjalan lancar dan tampaknya di luar dugaan akan menghasilkan sesuatu kesepakatan bersama. Konferensi diselenggarakan dari tanggal 7

sampai 11 Juni 1963, yang kemudian akan disambung dengan pertemuan puncak antara ketiga kepala negara. Hasil yang dicapai dari kesepakatan antara Subandrio dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari PTM, Emmanuel Palaez dari Filipina menyatakan antara lain bahwa *Indonesia maupun Filipina menyatakan tidak keberatan akan adanya Federasi Malaysia, asal hal itu dikehendaki oleh rakyat Kalimantan Utara.* Pelaksanaan mengenai penentuan kehendak rakyat Kalimantan Utara sebaiknya dilakukan oleh PBB, Sekretaris Jenderal PBB, atau pejabat yang independen dan tidak memihak. Pemerintah Filipina mengecualikan masalah Sabah menjadi sasaran akhir tuntutan wilayahnya¹⁹.

Sementara itu pada tanggal 9 Juli 1963. PM Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia di London, yang disepakati oleh PTM dan Inggris. Proklamasi negara baru itu akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1963. Tindakan ini dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu tindakan unilateral yang beretikat buruk dan menentang dari keputusan bersama yang dicapai dalam konferensi menteri luar negeri di Manila bulan Juni yang lalu.

¹⁹Masashi Nishihara, *Peran Penengah Jepang Dalam Konfrontasi 1963 - 1966*, dalam Ichimura dan Koentjaraningrat, **Indonesia Masalah dan Peristiwa**, (Jakarta : Gramedia, 1976), hlm. 64 - 65 cf Legge : 420 - 421 cf Leifer : 126 cf Nasution : 19 cf Mukmin : 86.

Walaupun penandatanganan dokumen itu telah melanggar kesepakatan bersama, namun persiapan-persiapan terus dilakukan. Akhirnya konferensi tersebut dapat dilaksanakan di Manila, dengan dihadiri oleh ketiga kepala negara : Presiden Sukarno, PM Tengku Abdul Rahman, dan Presiden Macapagal. Konferensi menyetujui rekomendasi dari pertemuan ketiga menteri luar negeri bulan Juni yang lalu²⁰.

Secara konsekuen PM Tengku Abdul Rahman menyatakan walaupun antara PTM dan pemerintah Inggris sudah memutuskan akan memproklamasikan Federasi Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1963, ia bersedia untuk menunda panitia penyelidikan yang akan diselenggarakan oleh PBB mengenai pendapat rakyat Kalimantan Utara tentang Federasi Malaysia. Ketiga pemimpin Asia itu juga menyetujui pembentukan Federasi antara rumpun bangsa Melayu, yang menangani masalah-masalah politik, ekonomi, dan militer di kawasan tersebut. Organisasi baru ini dikenal dengan nama **Maphilindo** (Malaya-Philipina-Indonesia). Ketiga negara akan mematuhi prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Manila sebagai hasil konferensi yang berlangsung dari tanggal 30 Juli - 5 Agustus 1963

²⁰Hal Kosut, **Indonesia : The Sukarno Years**, (New York : Fact, 1967), hlm. 85 cf Depdikbud, SNI VI : 356.

sebagai berikut²¹:

- a. Bahwa mereka menyatakan kembali kepatuhannya kepada persamaan dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat sebagai mana dinyatakan dalam piagam PBB dan keputusan Konferensi Bandung.
- b. Bahwa mereka bertekad demi kepentingan bersama negara mereka, untuk memelihara hubungan persaudaraan, memperkuat kerjasama di antara rakyat mereka, di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Guna mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial di daerah Asia Tenggara dan bertekad untuk mengakhiri penindasan atas manusia dan bangsa atas bangsa lainnya.
- c. Bahwa ketiga negara akan menghimpun usaha mereka dalam perjuangan menentang kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya untuk melenyapkan sisa-sisanya di daerah Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya.
- d. Bahwa ketiga bangsa sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara akan bekerjasama dalam membangun suatu dunia yang baru dan lebih baik, yang didasarkan atas kemerdekaan nasional, keadilan sosial, perdamaian abadi.
- e. Bahwa dalam rangka usaha bersama dari ketiga bangsa untuk mencapai tujuan tersebut di atas,

²¹Kosut : 86 cf Moain : 248 - 249 cf Nasution : 19 cf **Kedaulatan Rakyat**, 4 Juni 1963 Thn. XIX no 203.

mereka menyetujui untuk mengambil langkah pertama ke arah pembentukan Maphilindo dengan mengadakan pertemuan secara teratur pada skala tingkat yang dikenal sebagai musyawarah Maphilindo.

Hasil dari pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintahan berusaha untuk mendapatkan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai sumber sengketa, yaitu rencana pembentukan Federasi Malaysia.

2. Misi PBB dan Berdirinya Federasi Malaysia

Untuk meneliti sejauh mana rakyat Kalimantan Utara bersedia bergabung dalam Federasi Malaysia dan sesuai dengan hasil Konferensi Manila, Sekretaris Jenderal PBB U Thant kemudian mengirimkan misi ke Sabah dan Serawak. Misi diketuai oleh *Laurance Michelmore* (Amerika Serikat), dengan anggotanya *George Janicek* (Cekoslovakia), *George Howard* (Argentina), *Naville Kanakarathne* (Ceylon), *Kenneth Dadzie* (Ghana), *Ishad Bagai* (Pakistan), *Jasushi Akashi* (Jepang), *Abdul Dajani* (Yordania), dan *Jose Machado* (Brasilia). Terdapat pula para peninjau dari Malaysia yaitu *Zaitun Ibrahim*, *Athi Nahappan*, *Yakub Latif*, dan *Mohammad Zahir*. Dari Filipina yaitu *Benito M. Batistuta*, *Melquiades Ibanez*, *Vicento Muyo*, dan *Ramon Barrios*. Dari Indonesia adalah *Nugroho*, *Otto Abdul Rahman*, *Teuku Hasan*, dan *Rudi*

Gonta. Pemeriksaan dimulai pada tanggal 26 Agustus - 14 September 1963²².

Tetapi, sekali lagi ketika kesempatan itu dicapai saat itu pula berantakan. Muncul dua masalah baru, dan olehnya perselisihan antara Indonesia dan Malaysia sudah sulit untuk diatasi lagi. Kedua masalah itu ialah, *pertama* soal pengiriman peninjau-peninjau yang hadir selama penelitian misi PBB, dan *kedua* penentuan tanggal berdirinya Malaysia.

Persoalan pertama, hasil dari Deklarasi Manila tidak berisi ketentuan mengenai jumlah dari para peninjau untuk misi Serawak dan Sabah. Indonesia meminta haknya untuk mengirim sepuluh orang, tetapi pemerintah Inggris hanya memberikan empat visa untuk para peninjau dari Indonesia ; demikian pula halnya dengan Filipina. Indonesia berpendapat bahwa hal ini disengaja oleh Inggris untuk mencegah penelitian yang jujur berdasarkan ketentuan semula.

Persoalan kedua, Tengku Abdul Rahman yang telah menyepakati tuntutan Indonesia dan Filipina bahwa tanggal berdirinya Federasi diumumkan setelah misi PBB mengumumkan hasilnya. Tetapi Malaysia tidak menghiraukan kesepakatan ini ; pada tanggal 29 Agustus 1963 diumumkan bahwa Malaysia akan

²²Mukmin : 95.

diresmikan berdirinya pada tanggal 16 September 1963, yaitu sebelum misi PBB selesai dengan tugasnya. Hal ini dipandang sebagai penghinaan bagi Indonesia dan Filipina, serta dunia umumnya. Kemudian pada tanggal 3 September 1963, Indonesia mengajukan protes resmi terhadap PTM²³.

Hasil misi yang diumumkan pada tanggal 14 September 1963 sebenarnya menguntungkan Kuala Lumpur, karena menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Sabah dan Serawak menyetujui untuk bergabung dalam Federasi. Tetapi baik Indonesia maupun Filipina tidak dapat menerima hasil misi Michelmores itu, karena beranggapan bahwa prosedurnya tidak sah. Hal ini tidak dapat mengubah keputusan PTM. Oleh karena itu segera timbul reaksi keras dari Indonesia dan Filipina.

Penolakan Indonesia untuk mengakui Federasi Malaysia diumumkan pada tanggal 15 September 1963. Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa : Indonesia akan menahan pengakuan sampai tim PBB mengoreksi survei bulan Agustus di Serawak dan Sabah untuk menentukan secara murni, apakah kedua teritori itu ingin bergabung atau tidak.

Tindakan Malaysia selanjutnya yaitu memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia pada tanggal 17

²³Mukmin : 95 - 96.

September 1963 ; demikian halnya dengan Filipina. Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman mengatakan bahwa Malaysia tidak punya pilihan lain karena Indonesia dan Filipina telah memutuskan hubungan diplomatik tanpa alasan yang jelas. Kemudian disusul dengan tindakan kekerasan, di mana para demonstran menyerang Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur²⁴.

C. Reaksi Keras Indonesia 1963 - 1965

Pembentukan Federasi Malaysia dengan cepat menimbulkan reaksi keras dari Indonesia. Reaksi tersebut ditujukan kepada Inggris atas dukungannya kepada Malaysia. Bentuk reaksi berupa demonstrasi yang terjadi pada tanggal 18 September 1963 di Jakarta. Demonstrasi dalam hal ini adalah tindakan bersama berupa perarakan dan sebagainya untuk menyatakan protes atau tidak setuju²⁵.

Menanggapi kejadian tersebut Leimena sebagai Wakil Perada Menteri II atas nama pemerintah Indonesia, menyatakan penesalannya atas tindakan liar itu. Namun arus revolusioner sudah tidak terbendung lagi. Buruh Indonesia yang sudah dipengaruhi PKI melakukan

²⁴Kosut : 86 cf M.C. Ricklefs, **Sejarah Indonesia Modern** (terj), (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 414.

²⁵W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm. 239 cf Kosut : 86 cf Ricklefs : 414 cf Mukmin : 96 - 97 cf **Kedaulatan Rakyat**, 18 September 1963 ; 19 September 1963 ; 20 September 1963.

pengambilalihan perkebunan dan perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia. Sejak saat ini mulailah konfrontasi ekonomi dengan Malaysia.

Untuk mengatasi hal ini dikeluarkan Keputusan Presiden no 194 tahun 1963. Keputusan ini pada dasarnya berisi ketentuan **semua perusahaan-perusahaan yang bukan perusahaan tambang minyak, yang telah diambil alih oleh buruh dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia, diserahkan kepada menteri menurut bidangnya masing-masing**²⁶.

Konfrontasi ekonomi makin meninggi setelah pada tanggal 21 September 1963, Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengeluarkan surat perintah nomor 1/KOTOE/KOTI tahun 1963, yang intinya **memutuskan semua hubungan lalu lintas perekonomian dengan daerah-daerah di Malaysia dan Singapura**. Tindakan perekonomian ini dilanjutkan dengan **dedolarisasi** di Kepulauan Riau. Kemudian dilanjutkan dengan membuka pelabuhan Belawan dan Tanjung Priok sebagai **free trade zone** dan Sabang dijadikan **free port**²⁷.

Empat hari kemudian Presiden Sukarno mengumumkan bahwa ia akan **Ganyang Malaysia**. Dilanjutkan dengan

²⁶Kosut : 87 cf Mukmin : 97 cf Herbeth Feith, **Sukarno Dalam Demokrasi Terpimpin**, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 138 - 139 cf **Kedaulatan Rakyat**, 21 September 1963.

²⁷Nasution : 19 cf Ricklefs : 415 cf **Kedaulatan Rakyat**, 22 September 1963 ; 24 September 1963.

mengeluarkan dekrit pada awal bulan November. Isi dekrit tersebut: memerintahkan perebutan semua pabrik pengolahan karet milik Malaysia di Sumatra (Medan dan sekitarnya). Dan akhir tahun 1963, Presiden Sukarno menyatakan simpati dan mendukung perjuangan rakyat Kalimantan Utara²⁸.

Di Kuala Lumpur sendiri, PM Tengku Abdul Rahman tidak ingin melihat konfrontasi itu, dan ia ingin agar keadaan perang dengan Indonesia segera dihentikan. Namun, keadaan semakin memburuk. Pada tanggal 12 Desember 1963. Sukarno menuntut agar penyelidikan kembali dilakukan oleh misi PBB. Tujuannya untuk mengetahui keinginan dari rakyat Serawak dan Sabah yang sebenarnya. Kelihatannya Sukarno sangat berharap pernyataan dari kedua daerah itu bahwa mereka menolak untuk bergabung ke dalam Federasi dan memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Hal ini membuat marah pemerintah Malaysia, dengan meningkatnya kekuatan militer di daerah perbatasan Kalimantan Utara.

1. Usaha Damai

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang berjalan dari tahun 1963 hingga pertengahan tahun 1965 adalah merupakan salah satu dari peristiwa-peristiwa politik yang paling bergejolak di Asia

²⁸Kedaulatan Rakyat, 26 September 1963 ; 30 September 1963.

Tenggara sesudah Perang Dunia II, yang hanya tertutup oleh bayangan sengketa di Indo Cina. Konfrontasi Sukarno terhadap Malaysia ini didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan berusaha mendapatkan dukungan Cina. Politik anti Malaysia ini juga didukung oleh golongan militer Indonesia yang merasa khawatir bahwa mereka mungkin akan didemobilisasikan setelah selesainya masalah Irian Barat. Dengan demikian mereka tidak berdaya lagi menghadapi kekuatan-kekuatan komunis yang semakin besar. Malaysia diperkuat oleh Inggris sereta pasukan-pasukan Persemakmurnya dari Australia dan Selandia Baru. Sedangkan Inggris pada gilirannya mengusahakan sokongan Amerika sebagai imbalan bagi dukungannya pada usaha-usaha mereka di Vietnam²⁹.

Secara resmi konfrontasi itu bermula pada pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, pertengahan Januari 1963. Di sini ia mengumumkan politik konfrontasi Indonesia terhadap Federasi Malaysia. Politik ini berjalan terus selama peristiwa Pemberontakan G 30S/PKI dan berakhir pada tanggal 11 Agustus 1966. Konfrontasi ini berakhir ketika Menlu Indonesia, Adam Malik, dan Menlu Malaysia, Tun Abdul Razak menandatangani sebuah perjanjian perdamaian. Tetapi, dalam pembahasan pada penulisan ini

²⁹Nishihara : 59.

hanya berakhir pada tahun 1965.

Salah satu segi penting dari ketegangan kawasan yang berumur tiga tahun ini ialah rangkaian usaha-usaha diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara yang merasa khawatir. Usaha yang dimaksud ialah menjadi penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa. Lopez dan Macapagal dari Filipina, Thanat Khoman dari Muangthai, dan U Thant dari PBB, merasa terdorong untuk mengakhiri perselisihan Jakarta-Kuala Lumpur. Sihanouk dari Kamboja menawarkan bantuan seperti halnya Amerika Serikat dan Jepang. Bahwa salah satu pihak yang bersengketa itu, Indonesia, merupakan negara yang paling besar penduduknya, dan paling luas wilayahnya di Asia Tenggara serta letaknya yang strategis antara Samudera Hindia dan Pasifik, terlalu penting untuk diabaikan begitu saja³⁰.

Usaha damai dari pihak Indonesia sendiri dimulai oleh KSAD Jenderal A.H. Nasution yang melakukan perjalanan luar negeri dari tanggal 13 November sampai 24 Desember 1963. Perjalanan ini bertujuan menjelaskan kedudukan Indonesia dalam konfrontasi dengan Malaysia. Selain itu juga meminta negara-negara lain untuk membantu Indonesia seandainya Inggris benar-benar melaksanakan embar-

³⁰Nasution : 67 cf Leifer : 136 cf Nishihara : 60.

gonya dan menyerang Indonesia³¹.

Usaha damai selanjutnya dilakukan oleh Presiden Sukarno dengan berkunjung ke Manila, Phnom Penh, dan Tokyo. Pertemuan Sukarno dengan Macapagal tanggal 11 Januari 1964, menghasilkan suatu pernyataan bersama antara Indonesia dan Filipina. Mereka menyatakan *harapan akan dapat mengadakan pertemuan baru dengan PM Tengku Abdul Rahman untuk mencapai penyelesaian bagi sengketa Malaysia*³².

Dalam pernyataan itu Presiden Sukarno menjanjikan bantuan Indonesia bagi tuntutan Filipina atas Sabah. Kedua, Presiden Sukarno menegaskan kesetiaan mereka kepada prinsip-prinsip Persetujuan Manila dan Maphilindo sebagai alat yang efektif untuk menyelesaikan masalah Asia oleh bangsa Asia.

Pada saat yang sama Menteri Pertahanan Inggris menginspeksikan angkatan perangnya di Malaysia. Pada

³¹Setelah kembali dari misi ini Nasution menyatakan kepada pers ; kami menjelaskan di mana-mana bahwa RI tidak mempunyai klaim di luar RI, tetapi telah dan akan membantu rakyat di manapun juga untuk mengusir kolonialisme, nekolonialisme, untuk itu kami selalu bersedia memberikan latihan yang diperlukan dan kami tidak akan melarang putra-putra Indonesia di mana pun membantu anti kolonialisme. Kami tidak akan memulai perang, tetapi kalau diserang sudah lama kami bersiap untuk menangkis dan memukul kembali. Indonesia menolak Malaysia, karena tidak terlaksananya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Kalimantan Utara seperti rencana yang telah disepakati oleh Indonesia-Filipina-Malaya. Orang-orang Indonesia menyerbu ke Kedutaan Malaysia setelah Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur diserbu. Indonesia menambah tentaranya di Kalimantan Utara setelah Inggris melipatgandakan kekuatannya (Nasution : 60 - 61).

³²**Kedaulatan Rakyat**, 12 Januari 1963 ; 8 Juli 1963.

tanggal 10 Januari 1964, pemerintah Inggris menyatakan bahwa pasukan-pasukan Inggris, Malaysia, Gurkha, pasti dapat menguasai keadaan di Kalimantan Utara. Sikap ini tentu saja tidak disenangi oleh pemerintahan Indonesia yang menginginkan perdamaian.

Dalam usaha menengahi, Presiden Amerika Serikat, Lyndon B Johnson, mengirim Jaksa Agung Robert Kennedy ke Tokyo pada tanggal 18 Januari 1964, untuk menemui Presiden Sukarno ³³ : kemudian ke Manila dan Kuala Lumpur menemui PM Tengku Abdul Rahman, untuk mendorong kemblinya ketiga pemimpin Asia itu ke meja perundingan. Pada tanggal 22 Januari 1964, Kennedy kembali mengadakan pertemuan dengan Presiden Sukarno di Jakarta. Keesokan harinya ia menyatakan di depan pers di Istana Merdeka, Jakarta maupun Kuala Lumpur telah menyatakan persetujuan bahwa masalah diakui tidaknya Malaysia tidak akan mempengaruhi suatu pertemuan untuk mendapatkan penyelesaian secara damai yang diharapkan dapat diselenggarakan kelak antar pihak-pihak yang bersangkutan ³⁴.

Memang Indonesia bersedia menghentikan ketegangan di perbatasan, dengan maksud membuka kembali jalan bagi ketiga kepala pemerintahan Maphilindo untuk menjernihkan suasana dan memulihkan hubungan

³³Ketika itu Preside Sukarno berada di Tokyo.

³⁴**Kedaulatan Rakyat**, 19 Januari 1963.

diplomatik.

Usaha ini ternyata tidak sia-sia, dan menggugah Presiden Filipina, Macapagal, untuk membawa Malaysia dan Indonesia ke meja perundingan. Duta Besar Salvador Lopez dari Filipina mengusahakan konsesi dari PM Tengku Abdul Raman untuk mengadakan perundingan di antara ketiga negara yang berkepentingan di Tokyo. Sebelumnya didahului dengan pertemuan tiga Menlu, Subandrio-Tun Abdul Razak-Lopez di Bangkok pada tanggal 5 - 11 Febuari 1964.

Kembali terdapat kesulitan teknis mengenai *cease fire* seperti ketika Indonesia dengan Belanda pada masa perang kemerdekaan. Indonesia tidak bersedia memenuhi tuntutan Malaysia untuk menarik kembali para sukarelawan dari kantong-kantongnya di Kalimantan Utara sebelum ada penyelesaian politik. Lopez menyarankan agar tuntutan Malaysia tersebut diganti dengan pengertian *tidak saling melibatkan diri bagi pasukan-pasukan atau disengagement of forces*. Perundingan ini mengalami jalan buntu, dan para menteri luar negeri hanya memutuskan untuk memperpanjang waktu perundingan³⁵.

Seminggu kemudian Sukarno-Macapagal menyetujui

³⁵Depdikbud : 358 - 359 cf Nasution : 68 cf Mukmin : 97 cf Ide Anak Agung Gde Agung, **Surat-surat Anak Agung-Moh. Hatta**, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 50 - 51 cf Cindy Adams, **Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia**, (Jakarta : Gunung Agung, 1966), hlm. 414.

usul bersama Kepala Pemerintahan Muangthai supaya pada tanggal 3 Maret 1964 di Bangkok diadakan pertemuan kedua antara Indonesia-Filipina-Malaysia, tingkat menteri luar negeri.

Perundingan tiga Menlu pada bulan Maret tersebut gagal karena Malaysia hanya mau membicarakan soal penarikan mundur sukarelawan dari Sabah dan Serawak ; sedangkan Indonesia telah mundur dan memberi konsensi yaitu mengusulkan rumusan *gradual disengagement in conformity with the progress of the political situation*. Pendirian Indonesia ialah agar soal politik dibicarakan dan diselesaikan seraya mempertahankan *cease fire* di Kalimantan Utara. Tetapi, Malaysia menolaknya. Malaysia tidak bisa mundur dari tuntutanya mengenai penarikan mundur sukarelawan Indonesia. Sikap keras ini didukung oleh tokoh-tokoh Cina dari MCA yang duduk dalam Alliance, tapi ditentang dari partai oposisi yaitu Front Sosialis dan Partai Islam di bawah pimpinan Burhanuddin. Dengan ketentuan itu *cease fire* yang dinyatakan oleh Presiden Sukarno tanggal 23 Januari 1964, tidak berlaku lagi, sehingga konfrontasi meningkat.³⁶

³⁶Deppen, **Kumpulan Pidato Sukarno**, (Jakarta : 1964), hlm. 314 cf H. Rosihan Anwar, **Sebelum Prahara**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1981), hlm. 257 cf Nasution : 69 cf Moedjanto : 119 cf S. Husin Ali, **Rakyat Melayu Nasib dan Masa Depan**, (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1985), hlm. 30 cf Mukmin : 97 - 98 cf Leifer : 140 - 141 cf **Kedaulatan Rakyat**, 23 April 1964.

2. Dwikora dan Konfrontasi Terbuka

Ikhtiar untuk menyelesaikan masalah *Malaysia* melalui diplomasi mengalami jalan buntu. Maka pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Sukarno mengucapkan Komando Ganyang *Malaysia* yang ditujukan kepada rakyat Indonesia yaitu : Dwi Komando Rakyat³⁷. Isi Dwikora ialah : 1) Perhebat ketahanan Indonesia ; 2) Bantulah perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan membubarkan *Malaysia*.

Arti konfrontasi mengganyang *Malaysia* sendiri kabur bagi rakyat banyak. Mereka kurang memahami mengapa *Malaysia*, suatu negara berbangsa dan sama-sama sebagian besar penduduknya beragama Islam, harus diganyang. Rakyat kecuali pengikut PKI, tidak antusias untuk mendukung pengganyangan itu meskipun presiden telah mengomandokan Dwikora.

Bagi rakyat banyak masalahnya lain dengan pembebasan Irian Barat dengan Trikornya. Di samping itu keadaan di dalam negeri semakin memburuk. Kesulitan ekonomi telah begitu memuncak sehingga rakyat menjadi acuh tak acuh.

Ternyata soal *Malaysia* dan pemecahannya merupakan masalah pokok bagi Indonesia. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa persoalan *Malaysia*

³⁷Anak Agung : 98 cf **Kedaulatan Rakyat**, 4 Mei 1964 ; 5 Mei 1964.

berkaitan dengan keadaan ekonomi dalam negeri.

Tindak lanjut dari Sukarno yaitu membentuk Komando Siaga untuk menghadapi Inggris dan Malaysia pada tanggal 16 Mei 1964. Sebagai penglimanya ditunjuk Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani. Sebagai wakilnya. Panglima I Laksamana Muda (L) Muljadi, dan wakilnya Panglima II Brigadir Jenderal Achmad Wiranatakusumah. Dengan meningkatnya operasi militer, Komando Siaga kemudian disempurnakan menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang membawahi Komando Mandala I dan II. Komando Operasi Tertinggi (KOTI) kemudian merumuskan tugasnya sebagai berikut ³⁸:

- a. Dalam rangka pelaksanaan Dwikora menyumbangkan dan menyelenggarakan tepat waktu operasi-operasi dalam memperjuangkan dan mempertahankan rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei dalam membubarkan Malaysia.
- b. Memimpin dan memepgunakan baik segala pasukan bersenjata maupun segala macam barisan sukarelawan, baik sukarelawan bekas Trikora mapun sukar-elawan departemen-departemen yang ada dan dibentuk pada wakyu itu, dalam rangka Dwikora serta unsur-unsur perlawanan rakyat dan unsur potensi

³⁸Markas Besar ABRI, **40 Tahun Indonesia Merdeka**, (Jakarta : Almanak, 1985), hlm. 26 cf Deppen, **30 Tahun Indonesia Merdeka**, (Jakarta : Tira Pustaka, 1986), hlm. 247 cf Nasution : 70 cf Ricklefs : 415 cf **Kedaulatan Rakyat**, 17 Mei 1964.

nasional yang berada dalam lingkungan kekuasaan, guna tugas pokok tersebut.

Perundingan terus diupayakan, tetapi tidak membawa hasil yang memuaskan. Perundingan tingkat tinggi yang diadakan di Tokyo juga gagal sehingga keadaan kian tidak menentu. Pada tanggal 24 Juni 1964 dalam amanat yang disampaikan oleh presiden ketika meresmikan Monumen Pahlawan di taman segitiga Menteng. Sukarno menyampaikan dalam pidatonya untuk meningkatkan konfrontasi terhadap Malaysia³⁹.

Politik konfrontasi telah banyak merusak citra kepemimpinan Indonesia di lingkungan Asia-Afrika. Di sidang PBB rekan-rekan dari kedua benua itu tidak mendukung politik Indonesia. Pada konferensi Non-Block di Kairo, Indonesia mendapat kritikan tajam atas politik yang dipertahankannya. Hal ini semakin mempersulit Indonesia di percaturan politik internasional terutama negara-negara Barat mengucilkan Indonesia dan lebih bersimpati terhadap lawannya. Hanya RRC yang menunjukkan minatnya membantu Indonesia.

Kegagalan KTT Tokyo menandai permulaan kembalinya gerilya Indonesia di Serawak. Kekuatan infantri Indonesia kira-kira 140 orang mendarat di Malaya

³⁹Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* jilid II, (Jakarta : PT Gunung Agung, 1965), hlm. 582 - 583 cf *Kedaulatan Rakyat*, 24 Juni 1964 ; 25 Juni 1964.



tanggal 17 Agustus 1964. Pertarungan diperkuat dan meluas dengan diturunkannya gerombolan gerilyawan Indonesia di daratan utama Malaysia, Malaya, selama bulan Agustus-September 1964.

Pada tanggal yang sama Malaysia mengajukan protes atas pendaratan gerilyawan Indonesia di Semenanjung Malaya. Sehari sesudahnya Menlu Indonesia, Subandrio, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengetahui mengenai pendaratan tersebut. Ketegangan terus berlangsung di daerah perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Utara (Serawak-Sabah). Mengenai persediaan senjata Indonesia didukung oleh Uni Soviet dan Malaysia oleh Inggris serta negara-negara Persemakmuran, juga Amerika secara tidak langsung⁴⁰.

Dewan Keamanan PBB yang bersidang pada bulan September 1964 mempertimbangkan tuduhan Malaysia terhadap agresi Indonesia. Pada sidang pembukaan Dewan Keamanan, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sudjarwo Tjondronegoro, mengatakan bahwa Indonesia tidak berjuang melawan Malaysia tetapi menyerang kolonialisme yang berada di balik pembentukan itu.

Situasi ini semakin ketika Sidang Umum PBB pada tanggal 29 Desember 1964 memutuskan untuk

⁴⁰Kosut : 94.

menyetujui masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini merupakan pukulan sekaligus penghinaan bagi Indonesia, karena usahanya membasmi kolonialisme di Asia Tenggara hanya dipandang sebelah mata oleh dunia. Karena itu Indonesia dengan gagah berani pada tanggal 7 Januari 1965 menyatakan diri keluar dari PBB⁴¹. Alasannya bahwa PBB telah dikuasai oleh Oldefos (Old Established Forces) yang identik dengan kapitalisme-imperialisme, lawannya Nefos (New Emerging Forces)⁴².

Pernyataan ini mendapat dukungan positif dari ERC. Indonesia menentang dunia, dan poros Jakarta-Peking menjadi politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri bebas dan aktif tinggal namanya saja.

D. Arti dan Dimensi Konfrontasi

Secara panjang lebar telah diuraikan sebab-sebab terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia tetapi belum disinggung apa arti dan dimensi konfrontasi. Oleh karena itu ada baiknya mengenai masalah konfrontasi diberikan penjelasan lebih lanjut.

⁴¹Deppen, **Berdiri Di Atas Kaki Sendiri**, (Amanat politik Presiden Pada Sidang Umum III). Jakarta, 4 April 1965 cf Brian Harrison, **Sejarah Asia Tenggara**, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, 1966), hlm. 98 cf Nishihara : 73 cf Depdikbud : 36 cf Legge : 424 cf Mukmin : 100.

⁴²Mukmin : 102.

Konfrontasi dapat diartikan sebagai bentuk sengketa atau konflik antara dua negara atau lebih yang menggunakan segala cara kecuali perang terbuka. Dilihat dari sebabnya maka yang terlibat pada konfrontasi sebenarnya bukan hanya dua melainkan tiga negara yaitu : Indonesia- Malaysia-Filipina. Hanya bedanya dengan Indonesia, Filipin tidak menggunakan istilah konfrontasi tetapi konflik.

Selanjutnya konfrontasi setidaknya dapat dilihat dari tiga segi. Pertama, dilihat dari segi situasi. Kedua, dilihat dari segi kondisi, dan ketiga dari segi tujuan.

Dari segi situasi, konfrontasi dapat diartikan sebagai suatu suasana di mana dua negara atau lebih beranggapan akan adanya kepentingan yang berbeda, yang satu dengan yang lain tidak dapat diakomodasikan.

Perbedaan yang paling menonjol dan sangat mempengaruhi hubungan Indonesia Malaysia yaitu perbedaan ideologi, dibandingkan dengan perbedaan kepentingan dalam bidang ekonomi dan militer.

Indonesia mencapai kemerdekaan melalui revolusi fisik melawan Belanda. Semangat anti kolonialisme dan imperialisme serta cinta kemerdekaan sangat dominan, sebagai mana tercermin pada pembukaan UUD 1945. Dengan semangat anti penjajah melawan Belanda masa revolusi fisik dan Trikora, kemudian didukung oleh politik luar negeri yang didasarkan atas pidato Presiden Sukarno di

depan Sidang Umum PBB, **Membangun Dunia Kembali**, yang bersumberkan konsep dialektika. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa revolusi belum selesai, dan bangsa Indonesia masih dikepung oleh musuh-musuh kolonialis imperialis antara Malaysia dan Inggris. Pembentukan Malaysia merupakan salah satu bukti⁴³.

Sebaliknya Malaysia dengan dukungan Inggris beranggapan bahwa musuh mereka selain komunis yang datang dari utara juga dari selatan yaitu Indonesia, yang dipimpin oleh Sukarno dengan dukungan PKI. Sebab lain, Malaysia dan Singapura dapat dikatakan memperoleh kemerdekaan secara damai dari penjajahnya, Inggris. Mereka memiliki tradisi politik dan konstitusional yang kuat berdasarkan tertib hukum, sehingga kedua bangsa ini beranggapan bahwa setiap perubahan politik harus dilakukan melalui cara-cara damai dan konstitusional. Doktrin evolusi menolak segala bentuk politik yang revolusioner⁴⁴.

Malaysia dan Singapura beranggapan bahwa musuh justru datang dari Indonesia, negara yang terletak di sebelah selatannya, karena setiap perubahan **status quo** politik di Indonesia selalu dilakukan dengan kekerasan. Buktinya ialah proses kemerdekaan dan cara Indonesia

⁴³Deppen : 217 cf Mukmin : 103 - 104 cf Legge : 394 cf **Kedaulatan Rakyat**, 20 Juli 1964.

⁴⁴Mukmin : 104 cf **Kedaulatan Rakyat**, 28 Juli 1964.

memperoleh Irian Barat dari tangan Belanda⁴⁵. Kecurigaan ini ditambah dengan dukungan yang diberikan Indonesia atas perjuangan Azahari di Kalimantan Utara.

Sebagai kondisi, konfrontasi berarti suatu keadaan di mana dua negara berada dalam hubungan yang bermusuhan, karena ada perbedaan kepentingan yang saling tidak dapat diakomodasikan⁴⁶. Hubungan Indonesia-Malaysia-Singapura pada tahun 1963 - 1965, berada dalam kondisi terburuk sepanjang sejarah terbentuknya ketiga negara itu.

Sebagai tujuan, konfrontasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan masing-masing. Bagi Sukarno, dengan konfrontasi sampai pada saat tertentu, yaitu sampai meletusnya G 30 S/PKI ia telah berhasil mempersatukan potensi nasional dalam melawan Nekolin (Neo kolonialisme imperialisme) dan memelihara citra kepemimpinannya⁴⁷. Walaupun ada beberapa orang atau

⁴⁵Kita telah menjalankan revolusi besar untuk menundukkan kekuatan-kekuatan imperialisme. Kita telah mengadakan revolusi besar, tenaga besar untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Sekarang kita masih ada dalam tahapan revolusi baru untuk menghancurkan, mengganyang kolonialisme Malaysia. Dengan kembalinya Irian Barat bukan berarti RI sudah bebas dari imperialisme karena Malaysia dipasang di muka pintu RI, sebagai penjaga imperialisme. Untuk itu jangan takut saudara-saudaraku, ganyang terus Malaysia. *Berdiri Di Atas Kaki Sendiri* (Amanat Politik Presiden Sukarno Pada Sidang Umum III), 4 April 1965.

⁴⁶Mukmin : 104 cf Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Grasindo, 1992), hlm. 152.

⁴⁷Soepono Soemardjo, *Mewarnai Perjuangan Bangsa dalam Aristides Katoppo, 80 Tahun Bung Karno*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1981), hlm. 294 cf Mukmin : 106.

kelompok tertentu yang tidak menyetujui kebijakan konfrontasi, tetapi tidak ada suatu potensi nasional pun yang berani menentangnya secara terbuka.

Bagi Tengku Abdul Rahman, ia telah berhasil mengantarkan Federasi dari langkah-langkah awal suatu mitos menjadi realistas yang lugas. Namun, realistas tersebut harus dia tebus dengan harga yang mahal, seperti apa yang terjadi di Kalimantan Utara, yaitu di Brunei dan kemudian Singapura. Di samping itu, secara eksternal, pembentukan Federasi mengakibatkan distorsi hubungan Malaysia dengan Indonesia dan Filipina.

Hanya Filipina yang sedikit beruntung walaupun Filipina harus mengendorkan tuntutanannya atas Sabah, dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia, negara ini dapat memainkan peranan yang lebih bebas. Melalui gagasan Maphilindo, Macapagal, dapat menaikkan citra kepemimpinannya di Asia Tenggara. Walaupun gagasan ini diterima dengan curiga oleh Singapura, yang memandang Maphilindo sebagai persekutuan ras Melayu melawan ras Cina.

Terlepas dari pencapaian tujuan masing-masing, dari gagasan pemebentukan Federasi yang kontroversial itu timbul hikmah perlunya keterpaduan dan kerjasama yang erat antar bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Dari hikmah inilah setahun setelah berakhirnya konfrontasi, lahirlah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

E. Pandangan Dunia Sukarno

Pandangan Sukarno terhadap dunia tidak banyak berubah, sejak masa muda sampai pada puncak kekuasaannya. Sikapnya yang anti imperialisme seperti yang dikemukakannya dalam pembelaan di depan sidang kolonial Belanda, tetap mewarnai konsep politik luar negeri Indonesia⁴⁸.

Memasuki dekade 60-an, sikap anti imperialisme Sukarno diwujudkan dalam konsep Nekolim. Nekolim adalah pandangan tentang adanya bentuk-bentuk baru dalam kolonialisme dan imperialisme. Pandangan ini semakin nyata ketika Presiden Sukarno mengomentari rencana pembentukan Federasi Malaysia. Komentar ini ternyata berkelanjutan menjadi aksi, yang kemudia tercetus dalam Dwikora dengan Ganyang Malaysia. Mengganyang Malaysia adalah suatu keharusan revolusi Indonesia. Indonesia sudah mengetahui tujuan sebenarnya dari proyek neo-kolonialisme Malaysia, jauh sebelum Tengku Abdul Rahman ditonjolkan sebagai boneka Inggris. Indonesia mengetahui bahwa maksud sebenarnya negara baru yang diarsiteki oleh Inggris ialah menahan revolusi Indonesia⁴⁹. Keberhasilan Indonesia melawan Belanda dalam pengembalian Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi ingin ditunjukkan lagi oleh Sukarno kepada Inggris. Jauh sebelumnya soal

⁴⁸Sukarno, *Indonesia Menggugat*, (Jakarta : Departemen Penerangan, 1956), hlm. 15.

⁴⁹*Kedaulatan Rakyat*, 4 Mei 1964 ; 5 Mei 1964.

anti imperialisme-kolonialisme ditunjukkannya dalam keberhasilan menggalang persatuan Asia-Afrika pada tahun 1955 di Bandung.

Sukarno memandang dunia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu Nefos (*New Emerging Forces*) dan Oldefos (*Old Established Forces*). Konsep tersebut pertama kali diucapkan di depan sidang umum PBB pada bulan September 1960, dalam pidatonya yang berjudul *To Build The World a New*⁵⁰. Nefos adalah kekuatan-kekuatan (dalam hal ini negara) yang sedang tumbuh. Sedangkan Oldefos adalah kekuatan-kekuatan yang sudah mapan. Hal ini menunjukkan bahwa di dunia terdapat negara-negara yang telah maju. Meskipun demikian pandangan Sukarno tersebut belum mampu memberikan gambaran yang menyeluruh tentang adanya perbedaan di dunia. Artinya konsep Nefos dan Oldefos belum bisa menjelaskan keadaan dunia secara menyeluruh saat itu.

Konsep Nefos kontra Oldefos dikumandangkan lagi oleh Sukarno di Beograd (Yugoslavia) pada Konferensi Negara-negara Non-Blok. Sukarno secara tegas menguraikan Nefos dan Oldefos⁵¹.

⁵⁰Legge : 394 cf Imam Yudotomo. *Sebagian Ucapannya Justru Relevan Untuk Masa Kini* dalam Aristides Katoppo, **80 Tahun Bung Karno**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1981), hlm. 304 cf Feith : 142 cf Soemarno Sastroatmojo, *Pandangan Jauh* dalam Aristides Katoppo. **80 Tahun Bung Karno**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1981). hlm. 324.

⁵¹Legge : 344 cf Sastroatmojo : 322 cf H. Mahbud Djunaedi, *Sukarnoisme Suatu Ujian Sejarah* dalam Aristides Katoppo. **80 Tahun Bung Karno**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1981), hlm. 266.

Kerangka Nefos dan Oldefo ini diterapkan oleh Sukarno dalam politik luar negerinya secara samar-samar pada tahun 1962, ketika meletus pemberontakan rakyat Brunei di Kalimantan Utara. Di sini ditegaskan oleh Sukarno, bahwa apa yang terjadi di Kalimantan Utara itu tidak dapat dipisahkan dari gerakan Nefos. Gerakan dari bangsa terdajah untuk memerdekakan bangsa dan tanah airnya. Pernyataan ini merupakan dukungan moral bagi perjuangan tersebut. Dukungan dari Indonesia baru diberikan secara terang-terangan setelah gagalnya KTT di Tokyo pada tahun 1964. Di mana kegagalan konferensi ini memperkuat posisi Indonesia untuk membubarkan *Malaysia* buatan Inggris⁵². Kegagalan KTT ini disebabkan oleh kesombongan Malaysia.

Setahun sebelumnya, tepatnya pada bulan Februari 1963, Indonesia memutuskan keluar dari International Olympic Committee (IOC). Hal ini berawal dari tidak diakuinya keabsahan dari Asia Games IV, yang diselenggarakan di Jakarta, karena Indonesia menolak permintaan visa bagi kontingen-kontingen dari Taiwan dan Israel. Kedua negara tersebut tidak dapat mengikuti Asian Games. Alasan ditolaknya permintaan Taiwan karena Indonesia mengakui satu Cina, yaitu RRC. Sedangkan dengan Israel, belum adanya hubungan diplomatik, lagi pula Indonesia menentang Israel dalam masalah Palesti-

⁵²Kedaulatan Rakyat, 25 Juni 1964.

na⁵³.

Setelah keluar dari IOC, Indonesia mengalihkan kegiatan olah raga internasional ke dalam **Games of The New Emerging Forces**, (GANEFO). Peresmian badan olah raga ini dilakukan di Jakarta. Tindakan ini reaksi dari IOC. berupa tidak diakuinya Ganefo, juga banyak organisasi olah raga sedunia yang melarang anggotanya turut serta. Tetapi, mereka kurang menyadari faktor-faktor politik di sekitar Ganefo ini.

Ganefo adalah pertandingan olah raga internasional antar bangsa-bangsa yang disebut Nefos yaitu bangsa-bangsa tertindas dan progresif revolusioner menentang imperialisme dan kolonialisme. Ganefo diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 10 sampai 22 November 1963. Pesta olah raga ini diikuti oleh 48 kontingen.

Sukarno, yang sejak awal sudah mencium bau imperialisme dalam pembentukan Malaysia, memutuskan keluar dari PBB tahun 1965. ketika negara itu terpilih menjadi anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB. Alasannya, PBB sebagai badan internasional telah dikuasai oleh Oldefos yang identik dengan kapitalis-imperialis. lawannya Nefos.

Tindakan ini masih berkelanjutan dengan dibentuknya Jakarta Peking (Jakarta-Pnom Penh-Pyongyang-

⁵³Deppen, 1986 : 217 cf Feith : 112 cf **Kedaulatan Rakyat**. 8 Juli 1964 cf Aboe Bakar Loebis, **Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku, dan Saksi**, (Jakarta : UI Press, 1992), hlm. 298 - 300.

Peking). menurut istilah Sukarno. Kemudian Sukarno merencanakan mengadakan konferensi negara-negara yang sedang tumbuh, atau yang dikenal dengan nama *Conference of The Emerging Forces* (Conefo). Tetapi, rencana ini tidak sempat dilaksanakan karena berakhirnya kekuasaan Sukarno⁵⁴.



⁵⁴Mukmin : 101.

BAB V

REAKSI NEGARA LAIN TERHADAP PEMBENTUKAN
FEDERASI MALAYSIA

A. Latar Belakang Umum

Pada bagian ini akan dibahas mengenai reaksi-reaksi yang datang dari Filipina, Brunei, dan Singapura. Brunei dan Singapura termasuk ke dalam bagian dari rencana Federasi yang diultimatumkan oleh PM Tengku Abdul Rahman pada tahun 1961, antara lain mengatakan :

Federasi diharapkan dapat dibentuk dan terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei¹.

Federasi dirasakan sangat mendesak oleh Malaya dalam rangka mengatasi masalah-masalah internal, terutama masalah kependudukan yang tidak seimbang dan ekonomi. Pertimbangan etnis tentang keseimbangan suku Melayu dan Cina sejak dahulu sangat dominan dalam kerangka pemikiran kenegaraan dan kebangsaan.

Tanpa Federasi Malaysia imbalan penduduk Melayu, Cina, dan India adalah : 3.620.000 : 2.670.000 : 942.000 orang, sedangkan dengan penggabungan Singapura, Serawak, dan Sabah, imbangannya akan menjadi : 4.707.000 : 4.302.000 : 1.178.000. Dengan demikian

¹Nancy McHenry Fletcher, *The Separation of Singapore From Malaysia*, (New York : Departement of Asian Studies Cornell University, Ithaca, 1969), hlm. 17.

masalah ketidakseimbangan jumlah penduduk terpecahkan. Dalam arti jumlah penduduk Melayu tetap lebih unggul dibandingkan Cina dan India². Imbangan penduduk tidak hanya penting dari segi demografi saja, tetapi juga dari segi politis, di mana diharapkan agar partai-partai politik yang menentukan kebijaksanaan pemerintahan nantinya juga tidak dikuasai oleh golongan minoritas Cina.

Dilihat dari kepentingan ekonomi, Malaya yang hanya kaya dengan karet, timah, dan kelapa sawit, dalam Federasi nanti diharapkan akan bertambah kuat ekonominya dengan dukungan posisi Singapura sebagai pusat perdagangan, industri, dan jasa, serta Brunei yang kaya dengan minyak bumi.

Ditinjau dari segi eksternal terutama dari segi pertahanan keamanan, penggabungan daerah-daerah tersebut dalam suatu Federasi akan menyederhanakan sistem pertahanan keamanan karena bisa dikelola bersama sebagai suatu unit strategis. Federasi akan tetap berada dalam lingkungan Persemakmuran Inggris, dan Inggris akan tetap memberikan perlindungan militer pada Federasi, baik menanggulangi ancaman komunis maupun yang lainnya. Diantaranya yang dipandang membahayakan Malaya yaitu keinginan dari beberapa golongan dalam negeri

²Hidayat Mukmin, **TNI Dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia**, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 87.

untuk bergabung dengan Indonesia, dengan alasan ras : sama-sama ras Melayu.

Ketakutan-ketakutan itulah yang mendasari dari Persekutuan Tanah Melayu dengan dukungan Inggris sepakat untuk memperluas wilayahnya.

Sebenarnya sejak awal sudah ada usaha-usaha pencegahan agar tidak terjadi konflik dengan negara-negara tetangga. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan Tengku Abdul Rahman ke Filipina pada akhir tahun 1961, untuk menghilangkan kesalahpahaman mengenai pembentukan Malaysia. Hasil pertemuan itu adalah sebuah komite bersama yang mengusulkan diadakannya suatu pertemuan tiga negara (PTM, Indonesia, dan Filipina) guna memecahkan masalah *Malaysia* dan menghilangkan salah pengertian yang ada, sehingga suatu hubungan yang harmonis dan kerja sama antar ketiga negara dapat ditingkatkan³.

Walaupun ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari setiap pertemuan itu selalu menggembirakan, tetapi setelah sampai pada pelaksanaannya, ternyata menimbulkan kecurigaan-kecurigaan atau salah pengertian ketiga negara itu.

Sesuai dengan rencana semula yaitu memperluas wilayah Malaya ; dengan menggabungkan Sabah, Serawak, Brunei, dan Singapura, di dalamnya, sehingga menjadi Federasi Malaysia. Tetapi pada prakteknya tidak semua

³A.K. Wiharyanto, **Reaksi Terhadap Pembentukan Negara Malaysia**, (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 1994), hlm. 41.

daerah yang akan digabungkan itu dengan mudah menerima gagasan tersebut. Terdapat dua koloni Inggris yang akhirnya menentang gagasan pembentukan Federasi Malaysia dengan caranya masing-masing. Tentangan yang sama juga datang dari negara-negara tetangga Malaya yaitu Filipina.

Dari koloni Inggris yang kemudian menentang pembentukan Federasi Malaysia adalah Brunei dan Singapura. Meskipun pada awalnya Brunei setuju untuk bergabung dalam Federasi. Demikian halnya dengan Singapura. Singapura ikut diproklamasikan menjadi bagian dari Malaysia tanggal 16 September 1963, tetapi kemudian memilih berdiri sendiri pada tahun 1965.

B. Reaksi Filipina

Usaha Tengku Abdul Rahman dan Inggris dalam menggabungkan Malaya, Sabah, Serawak, Brunei, dan Singapura ke dalam Federasi Malaysia mendapat tantangan dari Filipina soal Sabah. Filipina mengklaim Sabah yang didasarkan atas hak-hak historis.

Klaim atas Sabah dimulai dari hak yang semula dipegang oleh Sultan Sulu, Jamal Alam, berkebangsaan Filipina. Sultan Sulu memperoleh kedaulatan atas Sabah pada awal abad XVII. Sejak itu Sultan Jamal Alam ber-

daulat atas Sabah dan kepulauan Sulu⁴.

Pada tahun 1878 Sultan Sulu menyewakan Sabah kepada seorang warga negara Austria, Gustavus Baron de Over Beck. Guna mengurus wilayah tersebut ia bersama rekannya yaitu Alfred Dent, seorang berkebangsaan Inggris, membentuk kongsi dagang British North Borneo Company yang mengelola wilayah ini sampai tahun 1946.

Setahun kemudian, tepatnya tanggal 16 Juli 1946, Inggris memasukkan wilayah Sabah ini sebagai bagian dari daerahnya serta dinamai Koloni Mahkota Borneo Utara. Penggabungan wilayah Sabah tersebut didasarkan pada penyerahan yang dilakukan oleh British North Borneo Company. Inggris berdaulat atas wilayah tersebut sejak saat itu.

Ketika pada tahun 1961 PM Tengku Abdul Rahman mengemukakan gagasannya mengenai Federasi Malaysia dengan memasukkan Sabah di dalamnya, Filipina menunjukkan keberatannya. Masalah Sabah secara hukum belumlah terselesaikan, dan pemilik yang sah tetaplah Filipina, bukan Inggris dan bukan Malaysia⁵. Untuk menyelesaikan masalah itu, dalam bulan Juni dan September 1961, Filipina mengajukan tuntutananya kepada

⁴Amat Johari Moain, **Sejarah Nasionalisme Maphilindo**, (Kuala Lumpur : Utusan Melayu Berhad, 1969), hlm. 255 of A.H.Nasution, **Memenuhi Panggilan Tugas**, jilid VI, (Jakarta : PT Gunung Agung, 1987), hlm. 43 of Manai Sophian, **Kehormatan Bagi Yang Berhak**, (Jakarta : Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994), hlm. 26.

⁵H. Rosihan Anwar, **Sebelum Prahara**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1981), hlm. 302.

Inggris. Tetapi tidak mendapat tanggapan yang jelas dan memuaskan dari Inggris. Di samping itu Filipina mempunyai rencana tersendiri untuk membentuk suatu persekutuan yang lebih luas dan mencakup Malaya, Kalimantan Utara, Indonesia, dan Filipina sendiri. Persekutuan yang dimaksud bukanlah dalam bentuk suatu federasi tetapi konfederasi. Dengan konfederasi ini diharapkan arus komunis dari selatan dan utara dapat dibendung oleh kekuatan tersebut⁶.

Oleh karena itu ketika pada bulan Desember 1962 pecah pemberontakan di Brunei, yang dipimpin oleh Azahari dengan Partai Rakyat Bruneinya, Filipina secara tidak langsung mendukung gerakan ini sesuai tujuannya semula yaitu mendapatkan kembali haknya atas Sabah.

Walaupun reaksi dari Filipina tidak sekeras Indonesia, pada prakteknya kedua negara ini berusaha bekerjasama untuk meluruskan kembali ide pembentukan Federasi ini dari pengaruh kolonialis, yang selalu berada dan mendukung Malaya⁷. Untuk itu Wakil Presiden

⁶Mukmin : 90 - 91 of Depdikbud, **Sejarah Nasional Indonesia** jilid VI, (Jakarta : Balai Pustaka, 1977), hlm. 354 - 355.

⁷Sejak Malaya memerdekakan diri, campur tangan Inggris didalamnya masih sangat berpengaruh. Sejauh itu keberadaan Inggris belum dipermasalahkan. Tetapi setelah Tengku Abdul Rahman berkonsultasi dengan PM McMillan di London dalam bulan Oktober 1961 dan bulan Juli 1962, mengenai rencana pembentukan Federasi, timbul dugaan yang makin kuat di pihak Indonesia dan Filipina, bahwa gagasan pembentukan Federasi Malaysia adalah gagasan Inggris, yang bertujuan mengekalkan kekuasaannya dalam bentuk baru.

merangkap Menteri Luar Negeri Filipina yaitu Emmanuel Palaez menyerukan agar diadakan pertemuan antar ketiga kepala pemerintahan dalam waktu dekat. Pertemuan ini dimulai dengan Konferensi Tingkat Wakil Menteri Luar Negeri yang diadakan di Manila dari tanggal 9 - 17 April 1963. Konferensi awal sebagai pembukaan ini dilanjutkan dengan pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 7 - 11 Juni, di mana Filipina kembali menjadi tuan rumah. Hasil dari konferensi Manila ini menyatakan bahwa Filipina dan Indonesia tidak berkeberatan atas rencana pembentukan Federasi Malaysia dengan menggabungkan Serawak, Sabah, Brunei, dan Singapura di dalamnya, asalkan hal itu dikehendaki oleh rakyat yang bersangkutan. Pelaksanaan dari hak menentukan nasib sendiri hendaknya ditentukan oleh badan otoritas yang bebas dan tidak memihak. Sekretaris Jenderal PBB, atas pejabat yang mewakilinya⁸.

Untuk mempermudah segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia, konferensi kembali diadakan dari tanggal 30 Juli sampai 5 Agustus 1963 yang dihadiri oleh pemimpin pemerintahan dari ketiga negara yang bersangkutan. Dalam konferensi

⁸Masashi Nishihara, *Peran Penengah Jepang Dalam Konfrontasi 1963-1966*, dalam Ichimura dan Koentjaraningrat, **Indonesia Masalah dan Peristiwa**, (Jakarta : Gramedia, 1976), hlm. 62 - 64 cf John D Legge, **Sukarno, Sebuah Biografi Politik**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1985), hlm. 420 - 421 cf Michael Leifer, **Politik Luar Negeri Indonesia**, (Jakarta : Gramedia, 1986), hlm. 126 cf Nasution : 14 cf Mukmin : 94 - 95 cf Sophian : 29

ini Tengku Abdul Rahman mengatakan bahwa ia bersedia menunda proklamasi Federasi Malaysia sampai menunggu hasil dari penyelidikan tim PBB tentang pendapat dari rakyat Kalimantan Utara. Sebelumnya Malaya (PTM) dan pemerintahan Inggris telah menetapkan hari jadi negara baru tersebut. Hasil lain dari konferensi ini adalah rencana untuk membentuk suatu federasi baru antara ketiga negara serumpun yang disebut Maphilindo (Malaysia-Philipina-Indonesia), yang dilontarkan oleh Presiden Macapagal, akhirnya disetujui. Doktrin ini menyatakan bahwa **masalah Asia hendaknya diselesaikan oleh bangsa Asia sendiri**⁹. Tetapi peristiwa yang terjadi kemudian di luar perkiraan Filipina. PM Tengku Abdul Rahman pada tanggal 29 Agustus 1963 mengumumkan bahwa Federasi Malaysia akan diproklamkan pada tanggal 16 September 1963. Sedangkan misi U Thant dengan ketua pelaksana Laurence Michelmores belum selesai melaksanakan tugasnya. Hal ini dipandang oleh Filipina sebagai penghinaan terhadap Konferensi Manila yang telah disepakati sebelumnya. Peristiwa ini menambah kecurigaan Filipina bahwa Inggris berada dibalik semua itu.

Filipina sebenarnya tidak berkeberatan terhadap pembentukan Federasi Malaysia, asalkan tim PBB sudah terlebih dahulu memastikan kehendak rakyat di Serawak dan Sabah berdasarkan pemilu yang telah dilangsungkan

⁹ **Kedaulatan Rakyat**, 4 Juni 1964 Thn XIX no 206 of Nasution : 19 - 20.

di sana : bahwa kedua teritori itu bersedia bergabung dalam federasi atau tidak¹⁰. Tetapi pelaksanaan pemastian kehendak rakyat di Serawak dan Sabah disambut oleh pihak Inggris dengan menghalang-halangi datangnya tim peninjau dari Filipina dan juga Indonesia yang mendampingi tim PBB. Regu-regu peninjau dari kedua negara ini sampai di Serawak dan Sabah setelah misi PBB mulai bekerja. Hal ini terjadi karena Inggris menunda visa mereka. Di sini terlihat kekhawatiran Inggris apabila kedua teritori itu tidak mau bergabung ke dalam Federasi Malaysia. Jika hal ini terjadi setidaknya akan berpengaruh bagi keberadaan Inggris di dalam negara baru tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB kemudian mengumumkan hasil kerja yang dikirim atas permintaan pemerintah ketiga negara, berupa kesimpulan bahwa rakyat Serawak dan Sabah setuju untuk bergabung dengan Federasi Malaysia. Tetapi Filipina memandang cara tersebut tidak sesuai dan telah menyimpang dari kesepakatan semula.

Misi PBB yang semestinya bekerja dari tanggal 22 Agustus sampai 16 September 1963, telah melaporkan hasil penelitiannya sebelum masa tugas berakhir, yaitu pada tanggal 14 September 1963. Berdasarkan laporan ini Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Serawak dan Sabah menyetujui Federasi Malaysia

¹⁰Nasution : 28

dan menjadi bagian dari federasi tersebut. Pada tanggal 16 September 1963 berdirilah Federasi Malaysia. Wilayah kekuasaannya meliputi : Malaya, Sabah, Serawak, dan Singapura. Dan tiba-tiba Malaysia menyatakan bahwa tuntutan Filipina atas Sabah tidak mempunyai dasar yang kuat. Sikapnya semakin keras di mana sehari setelah proklamasi, Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Filipina.

Walaupun usaha penyelesaian lewat pembicaraan formal telah gagal, nampaknya Filipina tetap menuntut Sabah. Masalah Sabah tidak terselesaikan sehingga merupakan ganjalan bagi hubungan kedua negara itu.

C. Reaksi Brunei

Pembentukan Federasi Malaysia juga mendapat tentangan dari Brunei. Daerah ini semula direncanakan oleh PTM beserta Inggris untuk menjadi bagian dari negara baru yang akan dibentuk.

Ketika untuk pertama kalinya rencana tersebut diungkapkan di Singapura pada tahun 1961, federasi diharapkan dapat dibentuk berdasarkan seluruh daerah jajahan Inggris di kawasan itu. Brunei menyatakan bahwa pada prinsipnya ia setuju. Tetapi akhirnya di awal tahun 1963 Brunei secara resmi menolak untuk bergabung. Dan sejak itu Brunei berjuang sendiri untuk memerdekakan negerinya.

Penolakan Brunei ini membuat PTM kecewa. Sikap ini

dipandang melawan arus sehingga timbul kekhawatiran pada diri PTM, apabila daerah Inggris di kawasan itu juga akan mengundurkan diri dan membentuk pemerintahan sendiri. Dua tahun kemudian sejarah telah membuktikan bahwa sikap Brunei kemudian diikuti oleh Singapura.

Persekutuan Tanah Melayu mempunyai maksud-maksud tertentu di dalam memasukkan Brunei sebagai bagian dari rencananya itu. Selain masalah jumlah penduduk antara ras Melayu dan Cina yang tidak seimbang, terdapat sebab lain yang lebih dominan, yaitu masalah ekonomi. Brunei kaya minyak bumi. Seandainya Brunei masuk federasi maka faktor ini sangat menguntungkan Malaysia pada perkembangan selanjutnya.

Walaupun pada awalnya Brunei menyatakan setuju untuk bergabung tetapi hal itu belum dapat dijadikan sebagai pegangan yang kuat. Karena Partai Rakyat Brunei yang berhasil menguasai massa tidak setuju dengan pendapat dan keinginan Sultan Brunei untuk bergabung dalam federasi tersebut.

Ketidaksetujuan ini menjadi kenyataan dengan meletusnya pemberontakan di Brunei pada tanggal 8 Desember 1962. Setahun setelah rencana pembentukan federasi diumumkan. Pasukan pemberontak yang menamakan diri Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) berhasil menduduki beberapa tempat yang penting di Kasultanan Brunei. Tujuan pemberontakan ini sebenarnya ialah agar Brunei segera memerdekakan diri dari Inggris dan mem-

bentuk negara sendiri¹¹.

Azahari sendiri sebagai pemimpin pemberontakan itu pernah menimba ilmu di Sekolah Peternakan Bogor pada masa revolusi fisik 1946 - 1949. Ia sangat terkesan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah Belanda. Ia juga bercita-cita mengusir Inggris dari Brunei dan memerdekakan tanah leluhurnya. Untuk itu ia mendirikan Partai Ra'ayat Brunei pada tahun 1956.

Partai Ra'ayat Brunei pada pemilu bulan Agustus 1962, yang merupakan pemilu pertama memenangkan 54 dari 55 kursi di Dewan Distrik dan menguasai 16 diantara 33 kursi di Dewan Legislatif.

Dewan Legislatif Brunei yang seluruhnya terdiri dari anggota Partai Ra'ayat Brunei di bawah pimpinan Azahari mengadakan sidangnya yang pertama. Hasil dari sidang ini ialah suatu mosi penolakan yang akan diajukan kepada Dewan Kementerian Tanah Jajahan yang diharapkan dapat dibicarakan pada tanggal 5 Desember 1962, ternyata dibatalkan oleh pemerintah Inggris.

Menurut Dewan Kementerian Tanah Jajahan tanggal 3 Desember 1962 atas perintah pemerintah Inggris di London mengatakan bahwa mosi-mosi yang diajukan oleh

¹¹Brian Harrison, **Sejarah Asia Tenggara**, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, 1966), hlm. 291 cf Moain : 247 - 248 cf Anwar : 295 cf Leifer : 124 cf Nasution : 13

Dewan Legislatif Brunei itu tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Inggris di Brunei. Kecuali pemerintahan Inggris di Malaya. Sebelum mosi itu ditolak, wakil-wakil rakyat Sabah, Serawak, dan Brunei yang tidak setuju dengan pembentukan Malaysia mengadakan rapat rahasia di Kalimantan Utara. Rapat ini mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan dari Negara Kesatuan Kalimantan Utara (NKKU) pada tanggal 8 Desember 1962. Sesungguhnya keputusan ini sudah lama dipersiapkan sebagai langkah akhir bila segala usaha melalui jalan damai gagal. Dan telah diadakan latihan militer sekedarnya secara diam-diam dalam rangka pengamanan proklamasi¹².

Pemberontakan ini berlangsung dengan dukungan rakyat dan menguasai Brunei selama 8 hari sebelum tentara gabungan Inggris menumpasnya. Waktu terjadi pemberontakan, Azahari sedang berada di Filipina dalam rangka memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Kalimantan Utara yang terdiri Brunei, Sabah, dan Serawak. Dengan susunan pemerintahannya : Sultan Sir Omar Syaifuddin sebagai kepala negara ; A.M. Azahari sebagai Perdana Menteri merangkap menteri Luar Negeri dan Pertahanan ; Zaini Haji Ahmad sebagai Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian.

Pemberontakan ini dapat dihentikan oleh pasukan

¹²Nasution : 13.

gabungan Inggris dengan mengirimkan satu resimen Gurkha, satu batalyon Quenn's Highlanders, satu batalyon Green Jacket, dan satu Komando Inggris, yang seluruhnya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Glennie. Hal ini merupakan bukti bahwa pembentukan Federasi Malaysia tidaklah semudah yang dibayangkan oleh Tengku Abdul Rahman dan Inggris¹³.

Sebagai panglima kesatuan-kesatuan tersebut ditunjuk Mayor Jenderal Walker, seorang perwira yang berpengalaman dalam kesatuan anti gerilya dan sudah melatih pasukan Malaya selama 12 tahun dalam menumpas gerakan komunis. Pasukan-pasukan dari persemakmuran yang terdiri dari pasukan yang didatangkan dari Australia, New Zealand, dan Inggris sendiri, terus bertambah melawan gerilya Tentara Nasional Kalimantan Utara. Ini berarti kekalahan secara militer di pihak Brunei. Tetapi secara politik Azahari telah membuka mata dunia bahwa Federasi Malaysia dibentuk bukanlah tanpa tentangan. Sebagian besar dari rakyat Kalimantan Utara menghendaki kemerdekaan penuh dari Inggris.

Setelah pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh pasukan Inggris, permulaan tahun 1963 secara tiba-tiba Sultan Brunei, Sir Omar Syaifuddin menolak untuk bergabung ke dalam Federasi Malaysia dengan alasan :

- (1) Sisa pemberontakan Partai Ra'ayat Brunei yang

¹³Anwar : 295 Nasution : 15 - 16 of Mukmin : 90.



melarikan diri ke Semenanjung Malaya dilindungi oleh PTM ; (2) Jumlah kontribusi yang harus dibayar oleh Sultan Brunei kepada pemerintah federal sebesar \$40.000.000 setiap tahun sebagai kompensasi bahwa pemerintah federal tidak akan memungut pajak federal, tetapi sumber-sumber minyak baru akan dikenakan pajak, hal ini dirasakan terlalu berat oleh Brunei ; (3) Sultan Brunei merasa lebih senior terhadap monarkhi federal, didukung oleh urutan kedudukan Sultan Brunei yang jauh berada di luar jangkauan kemungkinan menjadi Yang Dipertuan Agong, sehingga dilihat dari segi politis dan simbolis, Brunei akan berkedudukan lebih rendah dari Malaya¹⁴. Masih banyak alasan lain yang menyebabkan Brunei menolak untuk bergabung. Misalnya adalah kesalahan Malaysia karena ia mengambil daerah Limbangan, yang dulunya masuk Serawak, sehingga wilayah Brunei terbagi dua. Jika daerah Limbangan diserahkan kepada Brunei, maka wilayah Brunei akan menyatu. Usaha Sultan Brunei untuk mendapatkan daerah ini selalu gagal. Faktor kegagalan itu karena Serawak tidak mau menyerahkannya dan Malaysia kelak akan bersikap sama¹⁵.

Di samping itu, sisa-sisa ketakutan kepada Indonesia yang mendukung pemberontakan Azahari secara tidak langsung dalam usaha menentang Federasi Malaysia,

¹⁴Mukmin : 88 of Wiharyanto, 1994 : 20.

¹⁵Wiharyanto , 1994 : 20 - 21.

menyebabkan Brunei tidak jadi menggabungkan diri agar kemarahan Indonesia tidak menjadi-jadi. Karena bagaimanapun Brunei memiliki ketakutan kepada Indonesia yang jumlah penduduknya terbesar di Asia Tenggara dan wilayahnya berbatasan langsung dengan Brunei, ditambah pengalaman-pengalaman pada masa revolusi membuat Indonesia matang¹⁶.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut akhirnya Sultan Sir Omar Syaifuddin, menyatakan bahwa keputusan Brunei adalah resmi dan final.

D. Reaksi Singapura

Singapura, yang penduduk Cinanya paling besar sehingga ditakuti oleh Malaya, memutuskan untuk berdiri sendiri. Keputusan itu diambil setelah dua tahun bergabung dalam Federasi Malaysia.

Reaksi yang datang dari Singapura memang sedikit berbeda dari Brunei, maupun negara lainnya. Lee Kuan Yew sebagai PM Singapura, menginginkan untuk bergabung dengan Federasi Malaysia ketika Tengku Abdul Rahman menawarkan hal ini pada tahun 1961. Walaupun partai-partai politik di dalam negeri yang cukup berperan tidak setuju dengan ide tersebut. Partai yang berbeda pendapat tersebut ialah : *Barisan Sosial Singapura*,

¹⁶ *Kedaulatan Rakyat*, 25 Juni 1964, Thn XIX no 222.

*Partai Pekerja, Partai Rakyat Singapura*¹⁷.

Sebelumnya, pada tahun 1957 ketika PTM mempersiapkan kemerdekaannya, Singapura pada waktu itu di bawah kekuasaan pemerintahan David Marshall, merencanakan untuk bergabung dengan PTM. Tetapi Tengku Abdul Rahman menolaknya dengan alasan ras dan komunisme. Penolakan ini mengakibatkan Singapura pada tahun yang sama mengajukan kepada pemerintah Inggris di London status untuk berdiri sendiri dan kemerdekaan bagi Singapura. Untuk itu berlangsung Pemilihan Umum Raya pada bulan Juni 1959, yang diperebutkan oleh tiga partai besar yaitu : *Partai Tindakan Rakyat / People's Action Party (PETIR)*, *Perserikatan Rakyat Singapura / Singapore People's Alliance (SPA)*, *United Malay National Organization (UMNO)-Malayan Chinese Association (MCA)*. Pemilu tersebut dimenangkan oleh PETIR. Inilah kerajaan pertama yang didirikan dalam sebuah negara Singapura yang berkerajaan sendiri. Sebagai Yang Dipertuan Agong pertama ialah Sir William Goode (bekas Gubernur Singapura) dan Lee Kuan Yew (pendiri dan sekaligus ketua PAP/PETIR), sebagai perdana menterinya. Sir William Goode kemudian digantikan oleh Tun Yusuf Ishak yang menjadi Yang Dipertuan Agong yang pertama dari ras Melayu sejak

¹⁷Fletcher : 17.

Singapura memerdekakan diri¹⁸.

Lee Kuan Yew menyadari bahwa Singapura belum mampu berdiri sendiri. Untuk ia menyetujui rencana yang diajukan PM Tengku Abdul Rahman, dengan memasukkan Singapura sebagai bagian dari Federasi Malaysia. Kesediaan Singapura ini dipertegas oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Legislatif Singapura pada tanggal 6 Desember 1961, di mana Singapura menerima syarat-syarat dari penggabungan tersebut. Syarat-syarat yang ditentukan oleh PTM adalah : (1) Singapura menyerahkan urusan luar negeri, pertanian, pertahanan, dan keamanan kepada pemerintah federal tetapi urusan bidang keuangan, tenaga kerja, dan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Singapura ; (2) Singapura akan memiliki 15 kursi dalam parlemen baru persekutuan yang mempunyai 159 ahli ; (3) Singapura memiliki struktur kerajaan dan Dewan Perundangan serta Yang Dipertuan Agong sendiri ; (4) Singapura akan memiliki 60% dari pada hasil pendapatan negara ; (5) Akan dibentuk kesatuan keamanan dan pasar bersama antara pemerintah federal dengan Singapura¹⁹.

Persekutuan Tanah Melayu mempunyai tujuan sendiri dengan menyertakan Singapura yang pernah ditolakny

¹⁸Moain : 264 - 265 cf Fletcher : 37 - 38 cf Tan Ding Eing, **Sejarah Malaysia dan Singapura**, (Kuala Lumpur : Fajar Bakti, 1977), hlm. 323.

¹⁹Eing : 332.

pada tahun 1957. Secara ekonomi, Singapura berkembang pesat jauh di atas PTM dan hal ini disadari sepenuhnya oleh Malaya. Dengan bergabungnya Singapura, maka perekonomian Malaya dengan sendirinya akan terangkat, karena pelabuhan-pelabuhan penting berada di sini. Jika Singapura bergabung dan ditambah dengan Sabah, Serawak, dan Brunei (awalnya setuju), maka ras Melayu masih dominan. Di sisi lain Malaya yang didukung oleh Inggris khawatir apabila Singapura menjadi negara Komunis yang akan sangat membahayakan Malaya. Karena pada waktu itu *People's Action Party* (PAP)/PEIR yang dikuasai komunis sangat berpengaruh sekali²⁰. Jika hal itu tidak diantisipasi terlebih dahulu Inggris khawatir Singapura akan menjadi semacam Kuba bagi Malaya nantinya.

Singapura menerima gagasan itu secara positif karena pertimbangan ekonomi dan politik. Secara ekonomi Singapura akan terbantu untuk melemparkan sebagian besar hasil industrinya ke daratan Malaya. Di samping itu Malaya akan merupakan sumber penghasil barang-barang mentah yang diperlukan bagi industrinya yang pada waktu itu sudah berkembang pesat. Secara politik, dengan bergabung ke dalam federasi maka masalah komunis dapat diatasi.

²⁰Fletcher : 24 cf Eing : 331 cf Nazaruddin Sjamsuddin (ed), **Soekarno, Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek**, (Jakarta : Rajawali Press, 1988), hlm. 89 cf A.K. Wiharyanto, **Perkembangan Singapura**, (Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma, 1991), hlm. 54 cf Harrison : 292.

Dengan versi masing-masing yang saling menguntungkan ini, Singapura memutuskan untuk bergabung dalam federasi yang diproklamkan pada tanggal 16 September 1963.

Tetapi penyatuan atas dasar perhitungan politik dan ekonomi tersebut, tidak mendukung kondisi sosial yang berlatarbelakang kecurigaan dan sentimen rasial antar kelompok di Malaysia dan Singapura. Pertentangan yang terpendam sudah sejak ini akhirnya membawa pertentangan konsep politik dan partain politik. Keadaan yang kacau ini menjadi semakin keruh ketika terjadi pergolakan antar etnis di Singapura dalam tahun 1964²¹. Hal ini menyebabkan pemerintah federal terpaksa turun tangan untuk mengamankan Singapura. Perbedaan-perbedaan ini berjalan terus sebagai reaksi dari rakyat serta didorong oleh rasa cinta kepada bangsa dan tanah air yang begitu mendalam, untuk mendirikan negara sendiri. Pertentangan ini samapai pada puncaknya, bulan Agustus 1964²².

Akhirnya tidak ada jalan lain. Semangat

²¹Lee Kuan Yew telah menuduh UMNO sebagai pihak yang telah menimbulkan ketegangan-ketegangan rasial di Singapura. Ia mengatakan dalam suatu rapat bahwa propaganda politik UMNO harus diatasi karena hal itu menyangkut seluruh negara. Jika propaganda itu melampaui batas, maka negara akan runtuh. Ketegangan rasial telah memuncak dan sulit untuk dihindarkan (**Kedaulatan Rakyat**, 23 Juli 1964, Thn. XIX no 245).

²²Anwar : 528 cf S. Husin Ali, **Rakyat Melayu Nasib dan Masa Depan**, (Jakarta : Sinar Aksara, 1985), hlm. 30 - 31 cf Moain : 266.

nasionalisme yang tinggi dan perbedaan pendapat yang sulit disamakan mendorong Singapura untuk mendirikan negara sendiri. Singapura resmi keluar dari Federasi Malaysia pada tanggal 9 Agustus 1965. Singapura akhirnya menjadi negara berbentuk Republik²³. Kini Singapura, negara kecil diperbatasan Malaysia dan Indonesia itu berkembang menjadi negara paling maju di Asia Tenggara dan dunia pun mengakui akan *kepintaran* dengan luas wilayah yang demikian kecilnya.

Uraian di atas menggambarkan bahwa pembentukan Federasi Malaysia bukanlah tanpa hambatan yang berarti, baik dari segi ekonomi maupun politik.

Dari segi *ekonomi*, Malaya berupaya menarik Singapura dan Brunei agar bergabung di dalam Federasi Malaysia, hal ini disebabkan karena perekonomian Singapura berkembang pesat jauh di atas Malaya. Jika Singapura bergabung ditambah dengan Brunei yang kaya minyak bumi, akan menjadikan Malaya dalam perkembangannya sebagai pemimpin di Asia Tenggara.

Dari segi *politik*, hambatan itu datang dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, hambatan itu datang dari daerah yang semula ditargetkan menjadi bagian dari federasi yaitu Brunei. Brunei akhirnya memutuskan menolak untuk bergabung dengan Malaya karena syarat-syarat yang diajukan oleh Malaya, dipandang oleh

²³Eing : 332 cf Anwar : 528 cf Moain : 266 - 267:

Brunei sangat memberatkannya. didukung oleh perbedaan pandangan di antar keduanya mengenai sistem pemerintahan dan bentuk negara. Demikian halnya dengan Singapura. Dari luar negeri, hambatan itu datang dari Filipina dan Indonesia yang menentang pembentukan Federasi Malaysia dengan alasan masing-masing.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI

P E N U T U P

Sistem penjajahan Inggris memang berbeda dengan Belanda. Inggris lebih bersikap membimbing penduduk tanah jajahan menuju kemerdekaan. Karena itu tingkat kemerdekaan yang diperoleh tanah jajahan berjalan tahap demi tahap, khususnya di Malaya. Walaupun demikian Inggris tidak hanya membimbing penduduk tanah jajahan, tetapi mencari keuntungan pribadi. Hanya cara yang digunakan Inggris di Malaya lebih lunak, agar tidak meninggalkan kesan buruk untuk bekas tanah jajahanannya. Inggris mengetahui bagaimana menguasai rakyat Malaya yang kosmopolitan ini agar tujuan imperialismenya tercapai.

Meskipun Inggris selalu memperhatikan kehendak rakyat Malaya, ini bukan berarti tanpa ada perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Perjuangan rakyat Malaya ini karena Inggris hanya memperhatikan masalah sosial, sehingga tidak memberikan kesempatan bumiputera untuk berpolitik.

Perjuangan rakyat Malaya terkesan tidak transparan, dan melalui beberapa tahapan, yaitu agama 1906 - 1926, sosial ekonomi 1926 - 1937, dan politik 1937 - 1948. Dari tiga tahap perkembangan nasionalisme ini, perjuangan rakyat Malaya tampak lebih aktif setelah PD

II. Keaktifan ini disebabkan oleh Inggris yang ingin kembali menguasai koloninya, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tahun 1945. Untuk itu Inggris menggunakan siasat baru dengan membentuk Malayan Union.

Dengan dibentuknya Malayan Union, hampir semua gerakan nasional di Malaya bangkit bersama-sama. Keadaan seperti ini tidak menguntungkan Inggris karena akan dimanfaatkan oleh komunis. UMNO yang merupakan satu-satunya organisasi yang pro Inggris justru menentang Malayan Union ; karena UMNO yang merupakan organisasi persatuan bangsa Melayu justru lahir akibat perampasan hak-hak bangsa Melayu dalam rancangan Malayan Union.

UMNO digerakkan oleh kaum terpelajar dari kalangan bangsawan, karena itu bersifat konservatif. Dalam perjuangannya UMNO dan kaum nasionalis radikal berbeda pandangan mengenai cara untuk memerdekakan Malaya. UMNO memilih bekerjasama dengan penjajah demi mempertahankan status raja. Sedangkan kaum nasionalis radikal memilih berjuang sendiri dan tidak menghendaki adanya raja, yang dianggap memisahkan atau mengkotak-kotakkan rakyat, sehingga rakyat Malaya sulit untuk disatukan. Tetapi ternyata kedudukan UMNO yang loyal dengan penjajah lebih kuat dibanding kaum nasionalis radikal yang dituduh bekerja sama dengan komunis oleh Inggris.

Berkat kerja sama UMNO dan situasi yang tidak menguntungkan Inggris, maka pada tanggal 1 Februari

1948 Malayan Union dibubarkan. Kemudian diganti dengan Federation of Malaya. Inggris mengembalikan kekuasaan simbolis raja-raja Melayu. Pada tahun yang sama di Malaya meletus pemberontakan komunis, kemudian disusul dengan berdirinya Malayan Chinese Association (MCA) dan Malayan Indian Congress (MIC). Kedua organisasi ini pada awalnya menuntut kemerdekaan dari Inggris di Malaya tetapi pada tahap berikutnya mereka bekerjasama dengan UMNO.

Untuk menstabilkan keadaan, Inggris membentuk panitia penghubung antar golongan dan menawarkan kerjasama dengan Inggris. Hasilnya Federation of Malaya disempurnakan menjadi Pemerintahan Bermenteri pada tahun 1951. Ketua UMNO, Dato Sir Onn bin Ja'afar diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebaliknya dalam prakarsa baru ini, Inggris tetap pada keinginan semula yaitu menjadikan Malaya sebagai negara dengan kebangsaan baru. Maksudnya bahwa bangsa Melayu, Cina, India, dan lain-lainnya merupakan satu bangsa Malaya. Semua adalah warga negara Malaya yang mempunyai hak yang sama. Kebangsaan baru ini disebut dengan **Malayan Nationality**. Maksud Inggris dengan kebangsaan baru ialah agar bangsa yang kosmopolitan ini tetap bergantung padanya. Karena menurut Inggris bangsa baru ini tidak akan dapat membentuk suatu kesatuan untuk memerdekakan Malaya seutuhnya.

Untuk itu Inggris meminta Dato Sir Onn bin Ja'afar

membentuk **Independence of Malaya Party** (IMP) sebagai partai tandingan UMNO. Keanggotaan IMP terbuka untuk semua penduduk Malaya dan bertentangan dengan prinsip UMNO yang mengutamakan hak-hak orang Melayu. UMNO kemudian memilih Tengku Abdul Rahman Putera sebagai ketua baru menggantikan Dato Sir Onn bin Ja'afar menghususkan diri pada IMP.

Sikap tegas UMNO menggagalkan tujuan IMP. Kegagalan ini mengecewakan Inggris. Inggris segera membujuk MCA dan MIC untuk bekerja sama dengan UMNO dan menjanjikan kemerdekaan ; jika ketiga organisasi yang mewakili ras besar di Malaya bersama-sama mengusir komunis dari Malaya.

Untuk melemahkan IMP, UMNO menerima tawaran tersebut. Persekutuan UMNO-MCA-MIC mendapat dukungan dari seluruh rakyat Malaya. UMNO kemudian merubah pandangannya untuk menerima bentuk Malayan tetapi mengusahakan agar orang-orang Melayu dapat menguasai kedudukan kunci dalam pemerintahan. Kemudian Tengku Abdul Rahman diangkat sebagai pengganti Dato Sir Onn bin Ja'afar dan masih dijanjikan kedudukan yang lebih besar lagi, dengan mengusulkan pemilu pada tahun 1955 untuk membentuk pemerintah berkabinet dengan demokrasi parlementer.

Pemilu ini dimenangkan Persekutuan UMNO-MCA-MIC. Inggris merasa puas dengan hasil yang dicapai oleh persekutuan itu. Untuk itu sudah saatnya Malaya diberi kemerdekaan. Sebagai tindak lanjut maka diadakan

perundingan antara wakil-wakil persekutuan, utusan raja-raja Melayu, dan wakil-wakil dari kerajaan Inggris di London pada tahun 1956. Hasil dari perundingan ini Malaya akan memperoleh kemerdekaan dengan status hak penuh memerintah sendiri di dalam lingkungan British Commonwealth pada tanggal 31 Agustus 1957. Bentuk pemerintahan yaitu kerajaan berfederasi. Tengku Abdul Rahman kemudian diangkat sebagai perdana menteri mendampingi Yang Dipertuan Agong. Kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan masih berada di bawah kekuasaan Inggris.

Kemerdekaan ini diterima oleh rakyat Malaya sebagai satu anak tangga pertama menuju bentuk yang dicita-citakan yaitu kemerdekaan sepenuhnya yang meliputi Malaya, Kalimantan Utara, dan juga Singapura sebagai satu kesatuan negara nasional Malaysia.

Empat tahun setelah PTM memperoleh kemerdekaan, Tengku Abdul Rahman memantapkan cita-cita rakyat Melayu untuk membentuk negara kesatuan Malaysia. Kematangan rencana ini juga disebabkan oleh kekhawatiran Tengku karena jumlah penduduk Cina semakin meningkat dan secara ekonomi mendesak penduduk bumiputera.

Dengan bergabungnya Singapura dan ditambah beberapa daerah di Kalimantan Utara, maka masalah imbalanced penduduk bisa diatasi. Di sisi lain Tengku Abdul Rahman menyadari bahwa Malaya membutuhkan Singapura yang pernah ditolak pada tahun 1957 dengan alasan ras.

Kini Singapura telah berkembang pesat jauh di atas Malaya.

Pembentukan federasi ini disetujui oleh Inggris. karena kedudukan Inggris di Malay mulai goyah jika ia tetap bertahan pada keinginannya semula. Selain itu Inggris sedang berusaha melepaskan Singapura dari ancaman komunis. Jika hal ini dibiarkan maka Singapura akan menjadi ancaman bagi Malaya. Inggris juga berkeyakinan bahwa perannya di dalam negara baru nanti tetap besar.

Pembentukan federasi ini tidaklah berjalan mulus sesuai rencana, walaupun akhirnya Federasi dapat terbentuk pada tanggal 16 September 1963, yang mencakup : Semenanjung Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah.

Reaksi di dalam berasal dari Brunei dan Singapura. Brunei yang pada awalnya setuju untuk bergabung, pada awal tahun 1963 secara resmi menyatakan penolakannya. Sebaliknya dengan mengesampingkan kritikan dari dalam negeri memutuskan untuk bergabung dalam Federasi dengan pertimbangan politik dan ekonomi sebagai alasannya. Tetapi penyatuan atas dasar politik dan ekonomi tersebut, tidak mendukung kondisi sosial yang berlatar belakang kecurigaan dan sentimen rasial antar kelompok di Malaya dan Singapura. Akhirnya Singapura memutuskan keluar dari federasi pada tahun 1965.

Reaksi dari luar berasal dari Filipina dan Indonesia. Filipina sudah sejak awal mengajukan klaimnya

atas Sabah ; karena tanah itu dulunya milik Sultan Sulu seorang warga negara Filipina. Sedangkan dikemudian hari daerah tersebut diurus oleh Inggris dengan status disewakan, karena itu sudah selayaknya bila Sabah dikembalikan kepada Filipina. Sampai terbentuknya federasi masalah ini belum bisa diselesaikan.

Reaksi yang paling keras datang dari Indonesia. Presiden Sukarno sebagai seorang nasionalis sejati begitu peka terhadap model imperialisme yang dianggapnya membahayakan Indonesia. Dengan cara mengobarkan semangat nasionalisme seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara, maka dimulailah proyek **Ganyang Malaysia**. Tindakan ini kemudian diikuti dengan keluarnya Indonesia dari PBB pada tahun 1965, ketika diputuskan bahwa Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan.

Masalah pembentukan federasi ini di kemudian hari bisa diselesaikan dengan baik sehingga terwujud kerja sama antar negara-negara tersebut untuk menciptakan kedamaian dan memupuk semangat kekeluargaan di Asia Tenggara.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Aboe Bakar Loebis
1992 **Kilas Balik Revolusi, Pelaku dan Saksi.** Jakarta : UI Press.
- Anak Agung Gde Agung-Moh. Hatta
1987 **Surat-surat Anak Agung-Moh. Hatta.** Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Amat Johari Moain
1969 **Sejarah Nasionalisme Maphilindo.** Kuala Lumpur : Utusan Melayu Berhad.
- Aristides Katoppo
1981 **80 Tahun Bung Karno.** Jakarta : Sinar Harapan.
- Badri Yatim
1985 **Sukarno, Islam dan Nasionalisme.** Jakarta : Inti Sarana Aksara.
- Baudet, H., dan Brugmans I.J.,
1987 **Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan.** Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Butwell, Richard
1988 **Negara dan Bangsa** jilid 3 (terj). Jakarta : Glorier International INC.
- Depdikbud
1977 **Sejarah Nasional Indonesia VI.** Jakarta : Balai Pustaka.
- Deppen
1964 **Kumpulan Pidato-pidato Sukarno.** Jakarta.
1965 *Berdiri Di Atas Kaki Sendiri* (Amanat Politik Presiden Sukarno Pada Sidang Umum III). Jakarta. 4 April.
1980 **Ensiklopedi Indonesia V.** Jakarta : Icktiar Baru.
1989 **30 Tahun Indonesia Merdeka.** Jakarta : Tira Pustaka
1995 **Fifty Years Independence of Indonesia.** (1945-1995). Jakarta : PT Citra Media Persada.
- Eko Prasetyo, et.all (ed)
1996 **Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan.** Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Feith, Herbert
1995 **Sukarno Dalam Demokrasi Terpimpin.** Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Fletcher, Nancy Mchenry
1969 **The Separation of Singapore From Malaysia.** New York.
- Green, Marshall
1992 **Dari Sukarno ke Suharto.** Jakarta : PT Pustaka Gramedia.
- Gottschalk, Louis
1975 **Mengerti Sejarah** (terj). Jakarta : UI Press.
- Harrison, Brian
1966 **Sejarah Asia Tenggara.** Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Hidayat Mukmin
1991 **TNI Dalam Politik Luar Negeri, Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia.** Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Husin Ali, S
1985 **Rakyat Melayu Nasib dan Masa depannya** (terj). Jakarta : Inti Sarana Aksara.
- Ibrahim Yaacob
1957 **Sekitar Malaya Merdeka.** Djakarta : Kesatuan Malaya Merdeka Bagian Penerangan.
- Ichimura, S., & Koentjaraningrat
1976 **Indonesia Masalah dan Peristiwa.** Jakarta : PT Gramedia.
- Kardiyat Wiharyanto, A.,
1991 **Peranan UMNO Dalam Perjuangan Malaya.** Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma.
- 1992 **Perkembangan Singapura.** Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma.
- 1994 **Reaksi Terhadap Pembentukan Federasi Malaysia.** Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- 1994 **Perkembangan Nasionalisme Asia Tenggara.** Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- 1994 **Asia Tenggara Diambang Nasionalisme.** Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

- Kartini Kartono
1980 **Pengantar Metodologi Research Sosial.** Bandung : ALUMNI.
- Koentjaraningrat
1993 **Metode-metode Penelitian Masyarakat.** Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kohn, Hans
1961 **Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya** (terj.). Jakarta-New York : Franklin Publications INC.
- Kosut, Hal
1967 **Indonesia : The Sukarno Years.** New York : Fack.
- Legge, John D.,
1985 **Sukarno, Sebuah Biografi Politik.** Jakarta : Sinar Harapan.
- Leifer, Michael
1986 **Politik Luar Negeri Indonesia.** Jakarta : Gramedia.
- Lexy J Moleong
1994 **Metodologi Penelitian Kualitatif.** Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Lembaga Reseachr Kebudayaan Nasional- LIPI
1986 **Latar Belakang Terbentuknya ASEAN.** Jakarta : Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Mahatir bin Mohammad
1985 **Dilema Melayu** (terj.). Jakarta : Sinar Harapan.
- Manai Sopiaan
1994 **Kehormatan Bagi Yang Berhak.** Jakarta : Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.
- Markas Besar ABRI
1985 **40 Tahun Indonesia Merdeka.** Jakarta : Almanak.
- Milne, R. S., & Diane Mouzy, K..
1984 **Malaysia.** London : Westview Press.
- Moedjanto, G.,
1988 **Indonesia Abad Ke-20 jilid 1.** Yogyakarta : Kanisius.
Indonesia Abad Ke-20 jilid 2. Yogyakarta : Kanisius.
- Nasir, M.,
1985 **Metode Penelitian.** Jakarta : Ghalia.

Nasution, A.H..

1987 **Memenuhi Panggilan Tugas** jilid VI. Jakarta : Gunung Agung.

Nazaruddin Sjamsuddin (ed)

1983 **Sukarno Pemikiran Dan Kenyataan Praktek**. Jakarta : rajawali Press.

Oei Tjoe Tat

1985 **Memoar Oei Tjoe Tat**. Jakarta : Hasta Mitra.

Pcerwadarminta, W.J.S..

1978 **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta : Balai Pustaka.

Renan, Ernest

1984 **Apakah Bangsa Itu terj**). Bandung : ALUMNI.

Ricklefs, M.C..

1988 **Sejarah Indonesia Modern** (terj). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Roeslan Abdulgani, H..

1987 **Indonesia Menatap Masa Depan**. Jakarta : Pustaka Sinar Merdeka.

Roesihan Anwar, H..

1981 **Sebelum Prahara**. Jakarta : Sinar Harapan.

Sartono Kartodirdjo,

1982 **Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Suatu Alternatif**. Jakarta : PT Gramedia.

1981 **Pengantar Sejarah Indonesia Baru** jilid II. Jakarta : PT Gramedia.

1982 **Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah**. Jakarta . PT Gramedia.

Sekretaris Nasional Departemen Luar Negeri RI

1986 **ASEAN Selayang Pandang**. Jakarta : Sekretaris Nasional ASEAN Deplu RI.

Singarimbun, Masri & Sofian Effendi (ed)

1987 **Metode Penelitian Survai**. Jakarta : LP3ES.

Suhartono

1984 **Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi Tahun 1908-1945**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sukarno

1988 **Indonesia Menggugat**. Djakarta : Deppen.

1965 Di **Bawah Bendera Revolusi** jilid 2. Jakarta : PT Gunung Agung.

Tan Dung Eing

1975 **Sejarah Malaysia Dan Singapura**. Kuala Lumpur : Fajar Eakti.

Winstedt, R.O.,

1982 **A History of Malaya**. Singapore : Marican.

Wiyono

1982 **Sejarah Asia Tenggara Modern**. Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma.

Surat Kabar dan Majalah

Suyatno, *Timbul dan Perkembangan Nasionalisme Indonesia*
Basis nomer XXXIV tahun 1985.

Forum no 15 Th. II, 11 Januari 1985.

Kompas, 17 Januari 1997.

Suara Pembaharuan, 5 Juli 1987.

Kedaulatan Rakjat, 18 September 1963.

Kedaulatan Rakjat, 19 September 1963.

Kedaulatan Rakjat, 20 September 1963.

Kedaulatan Rakjat, 22 September 1963.

Kedaulatan Rakjat, 23 September 1963.

Kedaulatan Rakjat, 26 September 1963.

Kedaulatan Rakjat, 30 September 1963.

Kedaulatan Rakjat, 12 Januari 1964.

Kedaulatan Rakjat, 19 Januari 1964.

Kedaulatan Rakjat, 23 April 1964.

Kedaulatan Rakjat, 4 Mei 1964.

Kedaulatan Rakjat, 5 Mei 1964.

Kedaulatan Rakjat, 25 Mei 1964.

Kedaulatan Rakjat, 3 Juni 1964.

Kedaulatan Rakjat, 4 Juni 1964.

Kedaulatan Rakjat, 24 Juni 1964.

Kedaulatan Rakjat, 25 Juni 1964.

Kedaulatan Rakjat, 8 Juli 1964.

Kedaulatan Rakjat, 20 Juli 1964.

Kedaulatan Rakjat, 23 Juli 1964,

Kedaulatan Rakjat, 28 Juli 1964.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



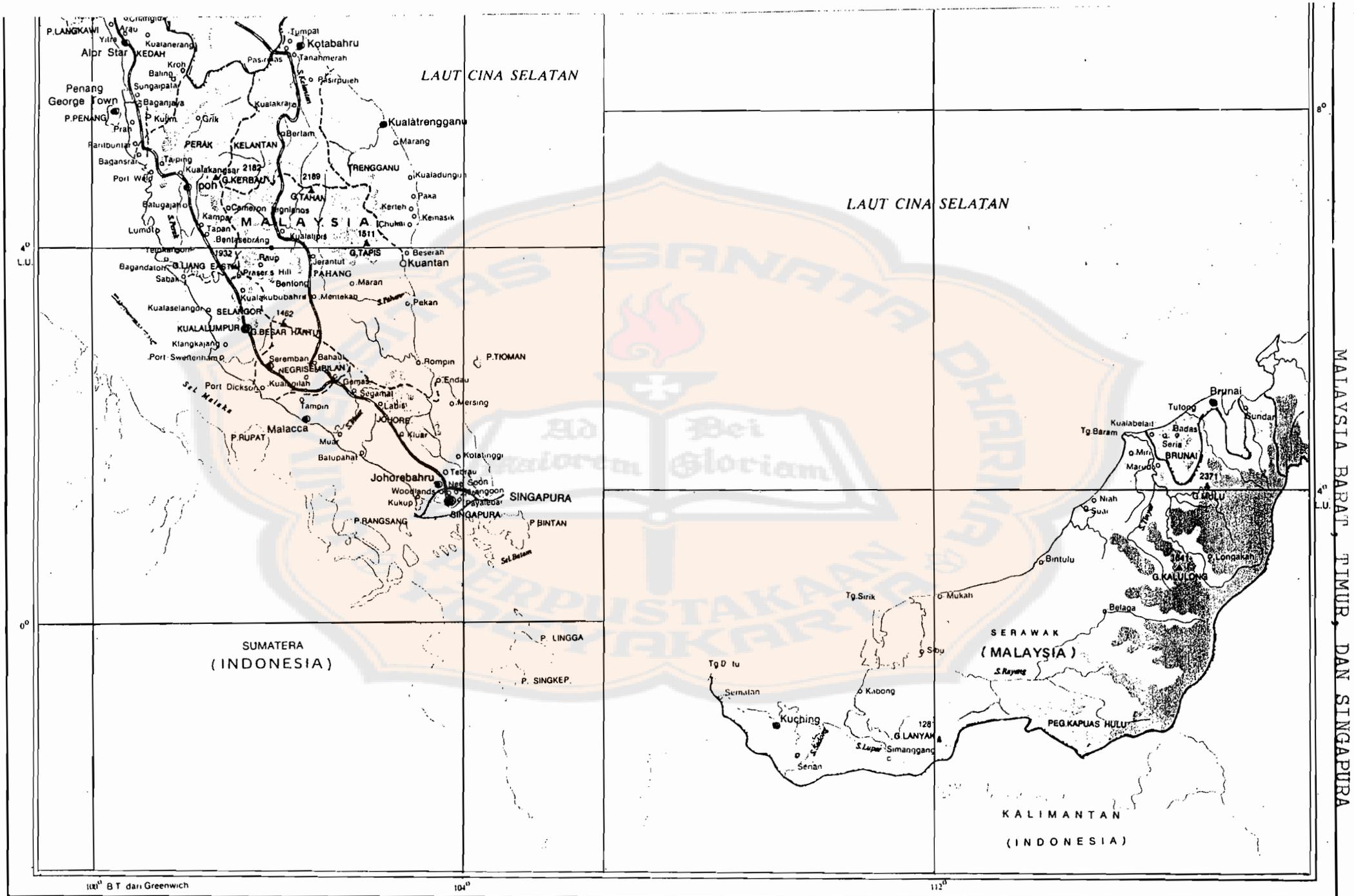
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



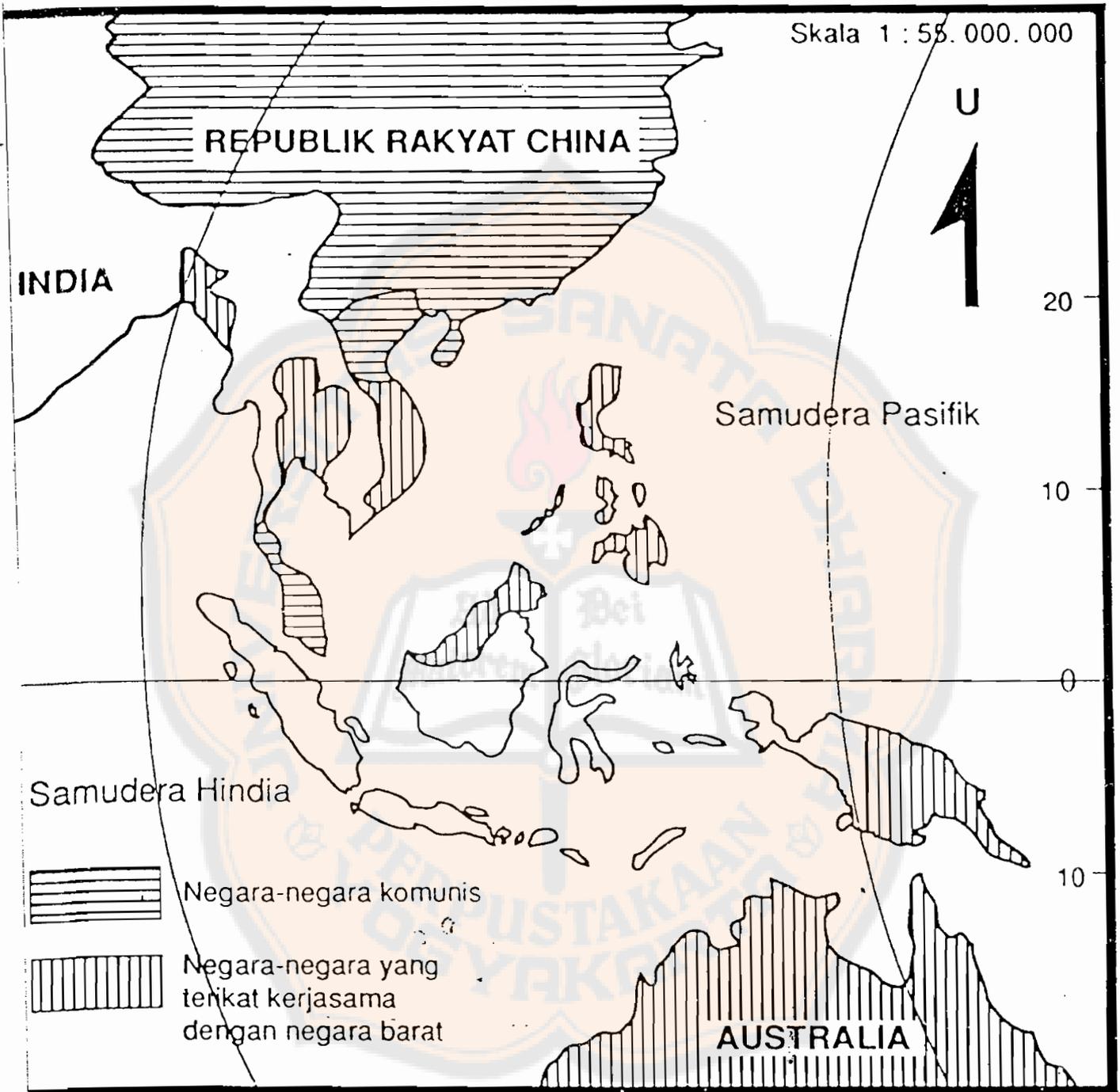
SKALA 1 : 20.000.000

Copyright GHALIA INDONESIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PETA POLITIK ASIA TENGGARA DAN SEKITARNYA (1963 - 1966)



ber: Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

at Mukmin, TMI Dalam Politik Luar Negeri. (Jakarta: Pustaka
Harapan, 1991), hlm 196

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Susunan Kabinet Tengku Abdul Rahman

Hasil Pemilu 25 April 1964 yang dilantik pada tanggal 25 Mei 1964.

1. Perdana Menteri : Tengku Abdul Rahman
2. Wakil Perdana Menteri : Tun Abdul Razak
3. Menteri Luar Negeri : Tengku Abdul Rahman
4. Menteri Pertahanan dan Keamanan : Tun Abdul Razak
5. Menteri Dalam Negeri : Dr. Ismail
6. Menteri Penerangan : Senu Abdul Rahman
7. Menteri Perindustrian : Lim Swee
8. Menteri Pertanian : Moh Khir Johari
9. Menteri Keuangan : Tan Siew Sin
10. Menteri Kesehatan : Bahaman Samsudin
11. Menteri Penerangan : A. Rahman Talib
12. Menteri Sosial : Haji Abdul Hamid Khan
13. Menteri Kebudayaan : Tengku Abdul Rahman
14. Menteri Sukan dan Pemuda : Tengku Abdul Rahman
15. Menteri Perburuhan : V. Manjckavasagam
16. Menteri Pemerintahan Daerah dan Perumahan : Knaw Kai Boh
17. Menteri Urusan Serawak : Datok Temenggung Jogah
18. Menteri Pembangunan Nasional dan Masyarakat Desa : Tun Abdul Razak
19. Menteri Tanah dan Pertambangan : Tun Abdul Razak
20. Menteri Kehakiman : Dr. Ismail
21. Menteri Imigrasi : Dr. Ismail
22. Menteri Pekerjaan Umum : V.T. Sambathan
23. Menteri Perhubungan : Sardon Judia
24. Menteri Tanpa Portfolio Merangkap Dubes Amerika Serikat : Ong Yoke Lin

Sumber : Kedaulatan Rakyat, 5 Mei 1964.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Konferensi Asia-Afrika di Bandung berlangsung dari tanggal 18 sampai 25 April 1955. Konferensi ini diprakarsai lima negara Asia yaitu : Indonesia, India, Pakistan, Birma, dan Sri Langka. Konferensi Asia-Afrika menghasilkan berbagai keputusan penting yang dituangkan di dalam suatu komunique bersama. Di samping itu, telah pula disetujui prinsip-prinsip hubungan internasional dalam rangka memelihara dan memajukan perdamaian dunia. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan **Dasasila Bandung**.

Lengkapnya Dasasila Bandung adalah sebagai berikut :

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai dengan piagam PBB.
6. a. Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar.
b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan/ancaman-ancaman ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial/kemerdekaan politik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrase/penyelesaian hukum/cara damai lain-lain lagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Sumber : **30 Tahun Indonesia Merdeka**. (Jakarta : Tira Pustaka, 1985), hlm. 79-80.



Lampiran-lampiran.

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1962
tentang
KEADAAN TERTIB SIPIL.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menelaah: Usul-usul Panitia Tudjubelas (Panitia Penghapusan Keadaan Bahaja) jang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1962;

Menimbang:

1. bahwa program pemulihan keamanan telah hampir selesai sepenuhnya dan perdjangan mengembalikan Irian Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia telah pula mengindjak taraf penjelesaiannya, hingga keadaan bahaja jang berlangsung dipelbagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia dapat ditindjau kembali dan sudah tibalah pula waktunya untuk mengalihkan daja kemampuan dan kegiatan Angkatan Perang Republik Indonesia bersama-sama dengan alat Negara lainnya serta segenap rakjat Indonesia untuk melantjarkan pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta;
2. bahwa dalam hubungan itu, perlu tetap terdjamin kedudukan kekuasaan tertinggi Presiden selaku Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
3. bahwa dalam hubungan itu, perlu pula tetap terdjamin kelandjutan operasi-operasi ekonomi;

Mengingat:

1. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
2. Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1962;

Sumber : Kumpulan-kumpulan pidato Sukarno (Jakarta : Dep - pen, 1965), hlm. 35 - 51.

3. Pasal IV Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 berhubungan dengan pasal 10 Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960;
4. Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 — Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 — Tambahan Lembaran Negara No. 2113);

Mendengar: Musjawarah Pimpinan Negara dan Dewan Per-tahanan Nasional pada tanggal 21 Desember 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KEADAAN TERTIB SIPIL.

Pasal 1.

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, keadaan bahaja dengan berbagai-bagai tingkatannya, dibagian-bagian wilayah Negara Republik Indonesia diturunkan tingkatannya/ dihapuskan keadaan bahajanya, hingga selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 keadaan bahaja itu telah dihapuskan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2.

Setelah dihapuskannya keadaan bahaja seperti dimaksud dalam pasal 1, maka bagian-bagian wilayah Negara Republik Indonesia jang telah tidak lagi dalam keadaan bahaja, berada dalam keadaan tertib-sipil.

Pasal 3.

(1) Tertib-sipil seperti dimaksud dalam pasal 2, adalah tertib-sipil dalam rangka mentjapai penyelesaian tudjuan revolusi Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar dan Ketetapan

ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I dan II/MPRS/1960 jang berisi Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara dan Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961—1969;

(2) Tertib-sipil seperti dimaksud dalam ajat (1) pasal ini didjalankan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar, pula sebagai Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia berdasarkan Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I dan II/MPRS/1960.

Pasal 4.

(1) Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia, Presiden mendjalankan kekuasaan seperti diatur dalam Undang-undang Dasar serta kekuasaan penuh berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung belum dibentuk menurut Undang-undang Dasar.

(2) Sebagai Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, Presiden memegang kekuasaan-penuh untuk melaksanakan Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I dan II/MPRS/1960 berdasarkan pasal IV Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 berhubungan dengan pasal 10 Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960.

(3) Sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia berdasarkan pasal IV Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 berhubungan dengan pasal 10 Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960, Presiden memegang pimpinan tertinggi atas revolusi Indonesia.

Pasal 5.

(1) Dibagian-bagian wilayah Negara Republik Indonesia, yang telah berada dalam keadaan tertib-sipil, Organisasi Pembantu Penguasa dalam Keadaan Bahaja di Daerah-daerah seperti diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 berhubungan dengan Undang-undang Keadaan Bahaja 1959 dihapuskan.

(2) Apabila seluruh wilayah Negara Republik Indonesia telah berada dalam keadaan tertib-sipil, Organisasi Pembantu Penguasa dalam Keadaan Bahaja di Pusat seperti diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1960 berhubungan dengan Undang-undang Keadaan Bahaja 1959 dihapuskan.

Pasal 6.

(1) Untuk membantu Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam hal kebidjaksanaan pengaturan khusus dan darurat dalam rangka pengamanan mentjapai penjelesaian tudjuan revolusi Indonesia seperti dimaksud dalam Penetapan Presiden ini, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dibantu oleh Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi yang susunannya diatur kemudian.

(2) Untuk membantu Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dalam pekerdjaannya sehari-hari, dibentuk suatu Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum yang diangkat oleh Presiden.

(3) Segala sesuatu mengenai Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi diatur dalam Pedoman Tatakerdja Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7.

Kebidjaksanaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam keadaan tertib-sipil, dilaksanakan di Daerah-daerah dibawah pimpinan Kepala Daerah yang akan ditentukan oleh Presiden.

Pasal 5.

(1) Dibagian-bagian wilayah Negara Republik Indonesia, jang telah berada dalam keadaan tertib-sipil, Organisasi Pembantu Penguasa dalam Keadaan Bahaja di Daerah-daerah seperti diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 berhubungan dengan Undang-undang Keadaan Bahaja 1959 dihapuskan.

(2) Apabila seluruh wilayah Negara Republik Indonesia telah berada dalam keadaan tertib-sipil, Organisasi Pembantu Penguasa dalam Keadaan Bahaja di Pusat seperti diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1960 berhubungan dengan Undang-undang Keadaan Bahaja 1959 dihapuskan.

Pasal 6.

(1) Untuk membantu Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam hal kebidjaksanaan pengaturan khusus dan darurat dalam rangka pengamanan mentjapai penjelesaian tudjuan revolusi Indonesia seperti dimaksud dalam Penetapan Presiden ini, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dibantu oleh Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi jang susunannya diatur kemudian.

(2) Untuk membantu Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dalam pekerdjaannya sehari-hari, dibentuk suatu Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum jang diangkat oleh Presiden.

(3) Segala sesuatu mengenai Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi diatur dalam Pedoman Tatakerdja Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7.

Kebidjaksanaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam keadaan tertib-sipil, dilaksanakan di Daerah-daerah dibawah pimpinan Kepala Daerah jang akan ditentukan oleh Presiden.

Pasal 8.

(1) Untuk menghadapi dan menampung akibat perubahan lingkungan dan penghapusan keadaan bahaya diberbagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia seperti dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, semua alat kelengkapan Negara diwajibkan segera menyesuaikan organisasi dan tatakerdjanja dengan tertib-keadaan bahaya atau tertib-sipil yang berlaku bagi daerahnya masing-masing.

(2) Dalam rangka ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kegiatan semua alat-kelengkapan Negara dan seluruh rakjat Indonesia dikerahkan untuk meng-konsolidasi dan menstabilisasi hasil-hasil pelaksanaan Triprogram Pemerintah dan Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.

Pasal 9.

(1) Berhubung dengan penghapusan keadaan bahaya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka daya-kemampuan dan kegiatan Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian serta alat-alat Negara lainnya bersama-sama dengan segenap rakjat Indonesia dialihkan kedalam pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dalam rangka penyelesaian entjapai tudjuan revolusi Indonesia.

(2) Kebidjaksanaan dalam melaksanakan ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, didasarkan atas ketentuan dalam Lampiran A No. 51 Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960, bahwa Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian diikut-sertakan dalam proses produksi dengan tidak mengurangi tugas utamanya.

(3) Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, pembangunan Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian didasarkan atas prinsip Pertahanan Rakt Semesta yang berintikan tentara-sukarela dan milisi, seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960.

Pasal 10.

Segala peraturan dan tindakan hukum jang didasarkan atas Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 — Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 — Tambahan Lembaran Negara No. 2113), akan berachir dan penampungannja dimana perlu akan disesuaikan dengan tertib-sipil jang berlaku.

Pasal 11.

Segala sesuatu jang belum ditetapkan dalam Penetapan Presiden ini, akan diatur lebih landjut oleh Presiden.

Pasal 12.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Desember 1962.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 28 Desember 1962.

SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 No. 97

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 142 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa dengan kembalinja kekuasaan pemerintah atas Wilayah Irian Barat, tugas Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dapat dikatakan telah selesai;
2. bahwa Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat telah membuktikan kedajagunaannja dalam mentjapai Program Pemerintah Pembebasan Irian Barat, dengan adanja keserasian antara perdjuaan dibidang diplomasi dan perdjuaan dibidang pengerahan potensi nasional dibawah pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat;
3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat perlu dikembangkan menjadi Komando Operasi Tertinggi, jang mempunjai tugas jang lebih luas;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar: Pertimbangan musjawarah gabungan Musjawarah Pimpinan Negara, Dewan Pertahanan Nasional, Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Membubarkan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat seperti jang dimaksud dalam Keputusan Presiden

nomer 620 tahun 1961 beserta Staf Gabungan dan Staf Operasi yang diatur dengan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Ketua Dewan Pertahanan Nasional nomer 2 tahun 1962 dan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat nomer 12/Plm.Bs tahun 1962.

KEDUA: Membentuk Komando Operasi Tertinggi, disingkat KOTI, dengan tugas pokok, fungsi utama dan organisasi sebagai berikut:

Pasal 1.

Tugas pokok KOTI adalah:

Operasi pengamanan terhadap pelaksanaan Program Pemerintah pada umumnya, khususnya dibidang konfrontasi terhadap unsur-unsur kontra revolusi, unsur-unsur kolonialisme/imperialisme dalam segala manifestasinya serta pengamanan terhadap pelaksanaan program ekonomi.

Pasal 2.

Fungsi utama dari KOTI adalah:

Penilaian, perentjanaan, pengendalian serta pengawasan dari pelaksanaan tugas pokok tersebut dalam pasal 1 dengan mengkoordinasikan segala unsur pelaksanaan dan potensi nasional.

Pasal 3.

KOTI dipimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 4.

Pada KOTI ada Staf Gabungan yang dipimpin oleh Kepala Staf KOTI dan terdiri dari:

- a. Gabungan I, Intelligence.
- b. Gabungan II, Operasi.
- c. Gabungan III, Pengerahan Tenaga.

- d. Gabungan IV, Logistik.
- e. Gabungan V, Politik, Ekonomi dan Sosial.
- f. Seksi Anggaran.
- g. Seksi Penerangan.
- h. Seksi Telekomunikasi.
- i. Seksi Sekretariat.

jang masing-masing dipimpin oleh seorang pendjabat jang diangkat oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 5.

Disamping Staf Gabungan ada Musjawarah Komando atau Dewan Penasihat jang terdiri dari para Menteri atau pendjabat lain jang hanja ditundjuk, bersidang dan bekerdja, apabila diperintahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

KETIGA: Segala sesuatu mengenai pelaksanaan pengembangan dan perubahan organisasi dari Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mendjadi KOTI, diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Presiden.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuli 1963.

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 226 TAHUN 1963.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa berhubung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan neo-kolonialisme disekeliling wilayah Negara Republik Indonesia, maka hal itu merupakan gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara dan dapat membahayakan jalannya penyelesaian tujuan revolusi Indonesia;
2. bahwa oleh karena itu, Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi menganggap perlu mengambil kebidjaksanaan pengaturan khusus dan darurat dalam rangka pengamanan hidup Negara dan pengamanan mentjapai penyelesaian tujuan revolusi Indonesia;
3. bahwa dalam hubungan itu pula, Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi perlu mengingatkan dan memerintahkan kepada segenap potensi Nasional, Angkatan Bersendjata dan seluruh Rakjat, untuk mengadakan kewaspadaan dan kesiap-siagaan;

Mengingat: Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962 berhubung dengan pasal 12 Undang-undang Dasar;

Mendengar: Musjawarah dalam sidang gabungan Dewan Per-tahanan Nasional, Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi, Komando Operasi Tertinggi dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi yang diselenggarakan pada tanggal 24 dan 25 Okto-ber 1963 di Djakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- I. Menjatakan, bahwa Presiden/Panglima Tertinggi/Pemim-pin Besar Revolusi mengambil kebidjaksanaan khusus dan

darurat dalam rangka pengamanan hidup Negara dan pengamanan mentjapai tudjuan revolusi Indonesia.

- II. Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi dalam mengambil kebidaksanaan khusus dan darurat itu dan dalam memegang pimpinan tertinggi atas revolusi Indonesia, mendasarkan pada segala hukum dari perundang-undangan jang ada dan segala hukum jang bersumber pada djalannja revolusi jang djuga merupakan landasan, dasar dan alat revolusi.
- III. Mengingat dan memerintahkan kepada segenap potensi Nasional, Angkatan Bersendjata dan seluruh Rakjat, untuk waspada dan siap-siaga, mengamankan hidup Negara dan mengamankan djalannja penjelesaian tudjuan revolusi Indonesia.
- IV. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Nopember 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

**AMANAT PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI**

Beberapa saat yang lalu saja telah mengeluarkan keputusan yang berbunyi:

- I. Menjatakan, bahwa Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi mengambil kebidaksanaan khusus dan darurat dalam rangka pengamanan hidup Negara dan pengamanan mentjapai tudjuan revolusi Indonesia.
- II. Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi dalam mengambil kebidaksanaan khusus dan darurat itu dan dalam memegang pimpinan tertinggi atas revolusi Indonesia, mendasarkan pada segala hukum dari perundang-undangan yang ada dan segala hukum yang bersumber pada djalannya revolusi yang djuga merupakan landasan, dasar dan alat revolusi.
- III. Mengingat dan memerintahkan kepada segenap potensi Nasional, Angkatan Bersendjata dan seluruh Rakjat, untuk waspada dan siap-siaga, mengamankan hidup Negara dan mengamankan djalannya penjelesaian tudjuan revolusi Indonesia.

Saja mengambil keputusan demikian setelah saja mengadakan musjawarah gabungan antara Dewan Pertahanan Nasional, Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi, Komando Operasi Tertinggi dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi pada tanggal 25 Oktober ini, dan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan anggota-anggota dari badan-badan tersebut, yang terdiri dari Wakil-wakil partai dan golongan masyarakat, Menteri-menteri serta Pendjabat-pendjabat tehnik tingkat tinggi. Berdasarkan pertimbangan itulah saja mengambil keputusan demikian.

Adapun alasan-alasan yang mendjadi dasar untuk mengambil kebidaksanaan itu, adalah karena adanya kegiatan-kegiatan

jang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan neo-kolonialis disekeliling wilayah Negara kita jang merupakan gedjala-gedjala jang dapat membahayakan hidup Negara dan membahayakan djalanja penyelesaian tudjuan revolusi Indonesia.

Sebagaimana telah berulang kali saja tandaskan, Negara dan Rakjat Indonesia menentang dengan konsekwen pembentukan Negara „Malaysia” itu, karena Negara „Malaysia” jang ditjip-takan oleh Negara kolonialis dan tidak sesuai dengan keinginan rakjat didaerah-daerah tersebut, hanja mempunjai latar belakang keinginan negara kolonial itu untuk tetap mempertahankan modalnja dan memperkuat kedudukan militernja didaerah Asia Tenggara ini. Maksud-maksud mereka ini langsung, atau tidak langsung, menjangkut kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia.

Mereka selalu berusaha untuk mengisolir kedudukan kita, mempersempit ruang gerak kita, pada pokoknja memperlemah potensi Nasional kita.

Dewasa ini mereka sedang giat melakukan persiapan-persiapan militer disekitar wilayah perairan Republik Indonesia dan di Kalimantan Utara, jang menggambarkan adanja maksud-maksud mereka untuk memaksakan dengan kekerasan kepada Indonesia untuk tunduk pada keinginan dan maksud mereka.

Mereka sangat giat melakukan hasutan-hasutan dan fitnah-an-fitnahan terhadap kita dengan maksud untuk memperlemah moril rakjat Indonesia.

Bahkan mereka telah melakukan provokasi-provokasi dan aktivitas-aktivitas subversi di Negara kita dengan maksud untuk menimbulkan kekatjauan disegala bidang di Indonesia.

Segala kegiatan, antjaman dan bahaya jang mereka lakukan itu harus kita hadapi dengan kekuatan dan kemampuan jang setimpal. Kita harus selalu dalam keadaan waspada dan setiap saat siap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Potensi Nasional kita, sosial, politik, ekonomi dan militer harus dapat kita kerahkan setjara serempak setiap saat diperlukan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Maka untuk mempertinggi kewaspadaan Nasional, agar supaya pembinaan dan pengerahan segala potensi Nasional, khususnya Rakyat bersama-sama Angkatan Bersendjata dapat dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnja dan seeffisien-effisiennja guna menanggulangi antjaman dan bahaya yang saja sebutkan diatas, maka saja dengan penuh kejakinan, mengambil kebidjaksanaan sebagaimana yang saja uraikan diatas tadi.

Baru beberapa bulan yang lalu, jaitu sedjak tanggal 1 Mei 1963, saja menghapuskan keadaan bahaya dalam segala tingkatanja diseluruh wilayah Indonesia, setelah kita dapat menyelesaikan program-program pemerintah, jaitu „keamanan” dan „pembebasan Irian Barat”. Sedjak saat itu kita berada dalam keadaan tertib-sipil dengan tekad untuk menyelesaikan program ketiga, „Sandang-Pangan” berdasarkan DEKON.

Saja dapat menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa pelaksanaan kebidjaksanaan khusus dan darurat dalam rangka pengamanan hidup Negara dan pengamanan mentjapai tujuan revolusi akan tetap mendjamin pelaksanaan DEKON dalam menyelesaikan program ketiga Pemerintah. Pun pelaksanaan dan pertumbuhan Demokrasi Terpimpin dalam lembaga-lembaga negara dan organisasi-organisasi rakyat dan kalangan masyarakat pada umumnya akan tidak terganggu oleh karena Keputusan baru ini.

Dalam hubungan itu semua, saja mintakan perhatian sepenuhnya, bahwa kebidjaksanaan khusus dan darurat itu hanya ada pada saja yang memegang pimpinan tertinggi atas revolusi Indonesia.

Demikian djuga Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang pada tanggal 10 Nopember kemarin telah saja buka dengan resmi dalam rangka menggalang persatuan dan kekuatan Bangsa-bangsa didunia yang tergolong dalam New Emerging Forces, harus dapat berlangsung dengan sukses.

Chusus kepada seluruh peserta dan petugas Ganefo terutama yang datang dari luar negeri, saja tegaskan bahwa mereka tidak

perlu khawatir dan ragu-ragu akan suksesnya Ganefo, segala fasilitas yang diperlukan untuk mensukseskan penyelenggaraan Ganefo akan disediakan seluas-luasnya. Keamanan dan keselamatan para peserta akan tetap terjamin. Bukankah Asian Games ke-IV tahun yang lalu yang diselenggarakan di Djakarta juga dapat kita selenggarakan dengan sukses, meskipun waktu itu Negara dan Bangsa Indonesia juga sedang berjuang mati-matian menghadapi konfrontasi dengan kolonialis dalam rangka pembebasan Irian Barat. Oleh karena itu saja serukan kepada seluruh peserta Ganefo, agar supaya mereka berjuang dengan semangat persahabatan dan persatuan untuk mentjapai hasil-hasil yang gemilang.

Untuk itu semua saja mengharapkan keinsjafan dan keichlasan seluruh lapisan masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Kita semua akan menghadapi tugas-tugas dan beban-beban yang diperlukan untuk melawan musuh-musuh yang sedang mengantjam kita. Semua lembaga negara, semua organisasi dan umumnja seluruh rakyat Indonesia hendaknja tetap dapat bekerja sama dan membantu Angkatan Bersendjata kita yang akan mempunyai peranan utama dalam mengamankan dan mempertahankan keutuhan Negara dan Bangsa dari bahaya yang sedang mengantjam itu.

Saja minta supaya setiap warganegara tetap bekerja giat dibidangnja masing-masing, bahkan lebih giat dari waktu yang sudah-sudah, tanpa mengurangi kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk melaksanakan perintah-perintah yang akan saja berikan. Dalam hubungan ini, saja ingatkan kembali akan kata-kata saja dalam Amanat saja pada tanggal 1 Mei 1963, dalam menjambut penghapusan keadaan bahaya diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

„Tugas dan tanggung-djawab kita sungguh masih berat. Selama revolusi kita yang multi-kompleks ini belum selesai, kita masih harus tetap berjuang, bekerja keras dan bahkan masih diperlukan korban-korbanan”.

Saja yakin, apabila setiap rakyat Indonesia tetap bekerja giat dilapangan masing-masing, tetapi dalam keadaan waspada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



dan siap-siaga mendjalankan komando-komando saja, maka dapatlah dihimpun potensi Nasional jang maha kuat dan ampuh, sehingga Insja Allah dapat dikerahkan untuk melawan dan mengalahkan musuh-musuh kita jang bagaimanapun tjorak dan kekuatannja, disamping dapat mentjapai sukses dibidang-bidang jang lain.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu memberikan Rachmat dan Taufik-Nja kepada Negara dan Bangsa Indonesia jang sedang berdjoang menjelesaikan revolusinja.

Djakarta, 12 Nopember 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENDJATA/PEMIMPIN BESAR
REVOLUSI,
SUKARNO